DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

DNIKS

DARI MASA KE MASA

17 Juli 1967 - 17 Juli 2025

Penyusun:

Dr (Cand). Mulyadin Permana, M.Si

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Edisi Revisi 2025

Supported by :

JAPFA

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk

DNIKS

DARI MASA KE MASA

17 Juli 1967 - 17 Juli 2025

DNIKS

DARI MASA KE MASA

Penanggung Jawab :

Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H
(Ketua Umum DNIKS Periode 2024-2029)

Penyusun :

Dr (Chand). Mulyadi Permana, M.Si

Layout :

Aula Afif Kurniawan

Desain Sampul :

Aula Afif Kurniawan

Dicetak oleh :

Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial

Edisi Revisi Tahun 2025

PENGANTAR PENYUSUN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku "DNIKS Dari Masa ke Masa" ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Perjalanan panjang dalam menyusun buku ini dimulai dari kesadaran akan pentingnya mendokumentasikan sejarah organisasi yang telah berperan strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia selama lebih dari lima dekade. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai organisasi yang didirikan pada 17 Juli 1967 oleh tujuh tokoh visioner bangsa, telah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Ketertarikan penyusun untuk mendokumentasikan sejarah DNIKS berawal dari pengamatan bahwa organisasi dengan peran strategis ini belum memiliki dokumentasi sejarah yang komprehensif dan utuh. Sebagai akademisi yang berkecimpung dalam bidang antropologi dan kebijakan

publik, serta kini menjadi bagian dari kepengurusan DNIKS sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan periode 2024-2029, penyusun merasakan urgensi untuk menghadirkan narasi sejarah yang tidak hanya informatif tetapi juga inspiratif bagi generasi penerus.

Proses penyusunan buku ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Salah satu kesulitan utama adalah keterbatasan dokumentasi tertulis yang lengkap dan sistematis tentang perjalanan DNIKS sejak berdiri hingga saat ini. Berbagai dokumen sejarah tersebar di berbagai tempat, sebagian telah rusak atau hilang, dan sebagian lagi hanya tersimpan dalam ingatan para tokoh yang telah berpengalaman memimpin organisasi ini.

Ketiadaan dokumentasi sejarah yang utuh ini menjadi tantangan metodologis yang signifikan. Sebagai peneliti yang terbiasa dengan pendekatan etnografi dan sejarah lisan, penyusun harus melakukan pendekatan multi-sumber dengan menggabungkan arsip organisasi yang tersedia, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci, serta penelusuran dokumen-dokumen resmi dari berbagai periode kepengurusan.

Buku ini ditulis dengan beberapa tujuan mendasar. Pertama, untuk menghadirkan dokumentasi sejarah DNIKS yang komprehensif dan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti, praktisi kesejahteraan sosial, dan masyarakat umum yang ingin memahami perkembangan organisasi sosial di Indonesia. Kedua, untuk memberikan apresiasi yang layak kepada para tokoh dan pengurus DNIKS yang telah berdedikasi dalam membangun kesejahteraan sosial bangsa. Ketiga, buku ini bertujuan memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya komitmen dalam membangun kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Keempat, sebagai bentuk akuntabilitas historis organisasi kepada masyarakat yang telah memberikan

kepercayaan kepada DNIKS untuk menjadi wadah koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional.

Manfaat yang diharapkan dari buku ini meliputi: (1) tersedianya referensi sejarah organisasi sosial Indonesia yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang perkembangan civil society di Indonesia; (2) memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan tantangan dalam mengelola organisasi sosial lintas periode politik yang berbeda; (3) menjadi bahan pembelajaran tentang best practices dalam koordinasi dan kolaborasi antar lembaga kesejahteraan sosial; dan (4) menginspirasi lahirnya generasi baru pemimpin kesejahteraan sosial yang berkomitmen dan berintegritas.

Buku ini disusun dalam sepuluh bab yang mengikuti kronologi sejarah dan tematik yang sistematis. Dimulai dari sejarah kelahiran DNIKS dengan profil para deklaratornya, kemudian membahas landasan eksistensi organisasi, perjalanan kepemimpinan dari periode ke periode, hingga visi dan program strategis untuk masa depan.

Ruang lingkup pembahasan mencakup aspek sejarah organisasi, dinamika kepemimpinan, pencapaian dan tantangan setiap periode, serta pemikiran-pemikiran strategis untuk masa depan kesejahteraan sosial Indonesia. Pendekatan yang digunakan menggabungkan perspektif historis, sosiologis, dan antropologis untuk memberikan gambaran yang holistik tentang perkembangan DNIKS.

Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih yang pertama dan utama kepada Dr. H.A.Effendy Choirie, M.Ag., M.H., Ketua Umum DNIKS periode 2024-2029, yang tidak hanya memberikan kepercayaan kepada penyusun untuk menyusun buku ini, tetapi juga menyediakan akses ke berbagai dokumen

organisasi, mensupersivi langsung seluruh proses penyusunan buku ini, dan memberikan wawasan strategis tentang visi masa depan DNIKS.

Apresiasi yang tinggi penyusun sampaikan kepada H. Sudarto SM., M.M., Sekretaris Jenderal DNIKS yang telah memfasilitasi proses penyusunan, kepada Rudi Andries, MBA dan Drs. Zarman Syah, Ph.D yang selalu sabar menjadi reviewer dan editor draft buku ini, Hatta Taliwang, M.Si yang telah memberikan masukan substansial dan membantu dalam proses verifikasi data historis, Dr. Dian Novita Susantto, SH., M.Sos dan RM. Sentot Janinto Modjo yang telah membantu dalam koordinasi dan penyediaan data, serta Drs. Agus Eko Cahyono yang telah mendukung dalam aspek komunikasi dan dokumentasi.

Penghargaan khusus penyusun sampaikan kepada Prof. Dr. H. Haryono Suyono, M.A., Ph.D., Ketua Badan Pertimbangan DNIKS dan mantan Ketua Umum periode 2005-2017, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara mendalam dan berbagi pengalaman berharga selama memimpin DNIKS. Terima kasih juga kepada Dr. Dewi Motik Pramono, mantan Wakil Ketua Umum, yang memberikan perspektif penting tentang dinamika organisasi dan tantangan yang dihadapi DNIKS, Dr. Hendratmoko, M.Si., yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Edwil S. Djamaludin, S.H., M.Si., mantan Sekretaris Jenderal yang telah berbagi pengalaman penting dari periode kepemimpinannya di DNIKS, serta kepada seluruh pengurus DNIKS periode 2024-2029 yang telah memberikan dukungan moral dan data yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Penyusun menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Sebagai karya dokumentasi sejarah yang pertama tentang DNIKS secara komprehensif, buku ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penelitian dan penyusunan selanjutnya yang lebih mendalam dan spesifik.

Harapan penyusun, buku ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang sejarah organisasi sosial di Indonesia dan menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu-isu kesejahteraan sosial. Lebih dari itu, penyusun berharap buku ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas dan jati diri DNIKS sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis dalam pembangunan bangsa.

Kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan karya-karya selanjutnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap masa depan kesejahteraan sosial Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, Juni 2025

Dr. (Cand) Mulyadin Permana, M.Si
Penyusun

SAMBUTAN

Ketua Umum DNIKS

Periode 2024 - 2029

Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H.

SAMBUTAN KETUA UMUM DNIKS

"Ikhtiar Menghormati Pelaku Sejarah DNIKS"

Audzu Billahi Minassyaitannirrajim
Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Segalanya, Tuhan Pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Shalawat dan salam untuk kekasih dan rasul-Nya, Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Atas berkat rahmat dan ridha-Nya dan didorong oleh keinginan luhur untuk menghormati para deklarator, para ketua umum dari masa ke masa, semua pengurus, serta aktivis DNIKS dari tahun 1967 hingga 2025 ini, maka kami merasa perlu menyusun sejarah dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 DNIKS yang jatuh pada tanggal 17 Juli 2025. Kami sadar, penyusunan sejarah dalam buku **"DNIKS DARI MASA KE MASA"** ini tidaklah sempurna. Penyempurnaan penyusunan sejarah diharapkan akan dilanjutkan oleh generasi DNIKS berikutnya. Generasi baru DNIKS mendatang insya Allah akan lebih baik, akan memahami berbagai disiplin ilmu termasuk menguasai tentang teori dan prinsip penyusunan sejarah.

Prinsip-prinsip dalam menyusun sebuah sejarah, yaitu : 1. Sumber dari pelaku sejarah; 2. Dari saksi sejarah; 3. Tempat sejarah; 4. Latar belakang munculnya peristiwa. Menyusun secara cermat konteks sebab dan akibat, memberikan makna kepada pelaku, gagasan, dan peristiwa. Dalam penyusunan sejarah juga dikenal prinsip kesadaran sejarah, yaitu terkait perbedaan, konteks, dan proses sejarah.

Penyusun sejarah DNIKS ini, saudara **Mulyadin Permana,** anak muda yang cerdas dan kreatif, juga berusaha menaati prinsip-prinsip tersebut. Meskipun tidak sempurna, tetapi buku ini secara umum sudah cukup memadai. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada saudara Mulyadin Permana.

Satu hal terpenting dari penyusunan sejarah DNIKS ini adalah sebuah ikhtiar kecil untuk menghormati jasa-jasa para deklarator, aktivis, dan para pemimpin DNIKS yang telah berkorban demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Kita sebagai generasi penerus DNIKS “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” (Jas Merah) karena sejarah memiliki peran penting dalam memahami masa lalu dan memberikan pelajaran berharga untuk masa depan. Maka, buku ini menjadi cermin dan inspirasi bagi generasi DNIKS dan aktivis kesejahteraan sosial ke depan.

Sebagai ketua umum DNIKS yang baru berjalan 6 bulan pada periode 2024-2029 ini dan melalui momentum HUT ke-58 tahun DNIKS, saya menyampaikan penghargaan, penghormatan, dan tahniah kepada para deklarator, para ketua umum, pengurus, dan aktivis DNIKS yang telah

mewariskan sebuah institusi yang membawa visi, misi, dan tujuan yang sangat mulia untuk kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan bagian dari tujuan kemerdekaan Indonesia. Dalam Pancasila ada sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam alinea keempat UUD 1945, juga ada tugas pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan Sosial juga ada dalam UUD 1945 Bab XIV. Sebagai turunan dari UUD 1945, telah dibentuk UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Profesional.

Terkait dengan kesejahteraan sosial, ternyata bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga kewajiban agama. Terutama dalam kitab suci Al-Qur'an, banyak disebutkan ayat dan surah yang mengharuskan atau minimal menganjurkan saling menolong, saling membantu, dan saling menyejahterakan. Oleh karena itu, siapapun yang terlibat dalam proses mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan hamba-hamba Tuhan yang mulia dan warga negara yang baik karena ikut menyukseskan salah satu dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dan tujuan beragama.

Selama ini, di tengah masyarakat muncul pertanyaan yang tidak pernah ada jawaban pasti. Mengapa rakyat Indonesia tidak kunjung sejahtera? Padahal kekayaan alam Indonesia melimpah. Ada di darat, laut, dan udara. Siapa yang menikmati kekayaan itu? Ironisnya lagi, berbagai jenis pungutan kepada rakyat makin bertubi-tubi. Fakta yang kita

saksikan, para pejabatnya menikmati fasilitas yang mewah, para pengelola BUMN gajinya besar dan hidup bermewah-mewah, dan para konglomerat kekayaannya makin merajalela. Tak lupa, para koruptor tak pernah jera. Sementara, rakyat biasa yang memiliki kedaulatan dalam demokrasi, kehidupan mereka tetap merana.

Kita baca data yang diumumkan oleh PBB bahwa rakyat miskin Indonesia ada sekitar 190 juta dari jumlah penduduk 270 juta, atau 70% dari jumlah rakyat Indonesia miskin. Meskipun miskin, dalam riset yang dilakukan oleh salah satu universitas di Amerika, rakyat Indonesia berjiwa sosial tinggi.

Apa yang salah? Siapa yang salah? Pemerintah, konglomerat, ataukah koruptor?

Namun, kini ada kabar baru yang memberi harapan. **Presiden Prabowo** pada awal pidato pelantikannya di gedung MPR tahun 2024, menyatakan komitmennya untuk menyejahterakan rakyat, menghapus kemiskinan, dan bahkan zero kemiskinan pada tahun 2035. Hal ini bisa kita saksikan melalui kebijakannya, misalnya program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan berbagai kebijakan lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga atau badan termasuk oleh kementerian sosial. Ini merupakan bagian pelaksanaan dari salah satu **Asta Cita** Presiden Prabowo.

DNIKS sebagai lembaga swasta yang memiliki kerangka kerja **“Asta Bhakti”** dan selama ini telah menjadi

kontrerpat atau mitra Kementerian Sosial sejak kelahirannya 58 tahun lalu, tentu mendukung sepenuhnya program pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Aspek yang akan menjadi konsen DNIKS adalah pemberdayaan sosial ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, selain ikut menyukseskan program kesejahteraan sosial pemerintah, DNIKS juga akan mengajak kolaborasi berbagai pihak, BUMN dan BUMS. Gotong royong untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Sejahtera Untuk Semua” adalah tema HUT ke-58 DNIKS. Dirgahayu DNIKS. Kami mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih kepada semua pihak. Semoga Allah SWT merahmati, memberkahi, dan meridhoi pergerakan kita semua. Amin.

Jakarta, Juni 2025

Dr. H.A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUSUN
SAMBUTAN KETUA UMUM DNIKS
BAB I SEJARAH DNIKS 1
BAB II FILOSOFI DASAR, VISI, MISI DNIKS 16
BAB III DEKLARATOR DNIKS 25
BAB IV DASAR EKSISTENSI DNIKS 50
BAB V PERJALANAN KEPEMIMPINAN DNIKS 66
BAB VI PENGURUS DNIKS DARI PERIODE KE PERIODE 137
BABA VII CAPAIAN SETIAP PERIODE KEPENGURUSAN DNIKS 183
BAB VIII ASTA BHAKTI DNIKS 202
BAB IX AKTIVITAS DAN KEGIATAN DNIKS PERIODE 2024-2029 278
BAB X HUT KE-58 DNIKS : "SEJAHTERA UNTUK SEMUA" 279
BAB XI PIKIRAN DAN HARAPAN 310
BAB XII LAMPIRAN – LAMPIRAN 353
TENTANG PENYUSUN 372

DNIKS

DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

SEJARAH DNIKS

Sejarah Lahirnya DNIKS

Menyadari bahwa perwujudan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bangsa Indonesia untuk menyempurnakan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dihimpunlah segala potensi kemanusiaan dan sumber daya dalam suatu wadah nasional yang berbentuk Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang diawali dengan pembentukan Komite Nasional Kesejahteraan Sosial melalui Piagam Pendirian tertanggal 17 Juli 1967.

DNIKS terbentuk atas pemikiran kolektif para delegasi Indonesia seusai memenuhi undangan *The Thirteenth International Conference* of ICSW (*International Council on Social Welfare*) di Washington DC Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh PBB pada 1 September 1966. ICSW ini merupakan sebuah organisasi kesejahteraan sosial tingkat global yang didirikan di Paris tahun 1928. Kemudian, para mantan delegasi Indonesia yang terdiri dari Mr. Soemantri Praptokoesomo, A.M. Pasila, S.Th. Djajat Drajat, Mr. Alwi Sutan Oesman, Dr. Salekan. Mr. Ijas Suhanda, Narasaruddin Latif, pada tanggal 8 Juli 1967 meresmikan pembentukan Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (KNKS), dengan penandatanganan piagam pendiriannya oleh ketujuh orang tersebut pada tanggal 17 Juli 1967, yang kemudian menjadi tanggal kelahiran DNIKS.

Sejak berdiri hingga tahun 2025 ini, DNIKS telah mengalami beberapa kali periode kepengurusan : Deklalator (1967 – 1970), Johana Sunarti A.H. Nasution (1970 – 1985), Raden Panji H. Mohammad Noer (1985 – 1990), Brigadir Jenderal TNI (Purn.) H. Gatot Soeherman (1990-1995), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Bustanil Arifin, SH (1995 – 2005), Prof. Dr. Haryono Suyono (2005-2017), Tantyo Adji P. Sudharmono (2017 – 2023), Dr. Hendratmoko, M.Si (Plt Ketua Umum 2023 - 2024), dan Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H. (2024 - 2029).

DNIKS mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diprioritaskan kepada masyarakat dengan kriteria kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di tingkat provinsi dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) sebagai LKKS tingkat kabupaten/kota. Terdapat 38 BKKKS (sesuai jumlah provinsi di Indonesia) sebagai anggota atau jaringan kerja tingkat provinsi. Baik LKKS tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masing-masing bersifat otonom. DNIKS dan LKKS provinsi dan kabupaten/kota adalah lembaga berbadan hukum berbentuk perkumpulan, ada juga yang berbentuk yayasan. Selain itu, DNIKS menghimpun 35 Organisasi Sosial Nasional (Orsosnas) dan yayasan sebagai anggota hingga saat ini.

Latar Belakang Pendirian DNIKS

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) lahir di tengah kondisi sosial-ekonomi Indonesia yang kompleks pada tahun 1967. Pasca pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial. Inflasi tinggi, kemiskinan meluas, dan ketimpangan sosial menjadi pemandangan umum di masyarakat. Situasi ini mendorong sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang untuk menggagas pembentukan sebuah lembaga yang fokus pada pemajuan kesejahteraan sosial.

Pendirian DNIKS dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud. Pembentukan lembaga ini muncul dari pemikiran bahwa pencapaian tujuan tersebut merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia dalam menyempurnakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Ide awal pembentukan DNIKS muncul dari diskusi intensif antara para tokoh sosial, agamawan, akademisi, dan praktisi kesejahteraan sosial yang prihatin dengan kondisi masyarakat Indonesia. Mereka melihat perlunya wadah yang dapat menjembatani upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Wadah ini diharapkan dapat menjadi forum untuk mengembangkan pemikiran, kebijakan, dan tindakan praktis dalam bidang kesejahteraan sosial.

Gejolak Sosial, Politik, dan Ekonomi Orde Lama

Kemegahan Gelora Bung Karno (dahulu GANEFO - Games of New Emerging Forces) di bilangan Senayan, Jakarta, ternyata tidak mampu mengubah kehidupan ekonomi rakyat di sekitarnya. Bahkan, kondisi masyarakat Jakarta secara keseluruhan tetap memprihatinkan. Serupa dengan menjulang tingginya Tugu Monas yang bertahtakan emas, kemegahan simbol-simbol kemerdekaan tersebut tidak membawa penduduk Betawi terangkat dalam kemakmuran dan pendidikan. Krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan sejak pemotongan mata uang pada tahun 1959 menjadikan rakyat semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan yang tidak menentu dan tak berujung pangkal.

Di tingkat pemerintahan, Presiden Sukarno terus memekakkan agenda "Trikora" di setiap kesempatan. Tiga Komando Rakyat tersebut berisi: rebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Bumi Irian Barat, dan kobarkan api perjuangan di kalangan pemuda untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda. Untuk mewujudkan misi ini, Mayjen Soeharto dilantik sebagai Panglima Komando Tertinggi Mandala, memimpin Operasi Gabungan Pembebasan Irian Barat. Meskipun peperangan laut berlangsung singkat, gugurnya Komodor Laut Yos Sudarso di Laut Aru menjadi pengorbanan besar bangsa. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia.

Tidak berhenti di sana, Presiden Sukarno terus meniupkan sangkakala peperangan di tengah badai ekonomi nasional

yang menghempas. Kali ini melalui "Dwikora" yang memukau. Dua Komando Rakyat tersebut berisi: ganyang Negara Boneka Malaysia dan usir neokolonialisme Inggris dari Tanah Malaya. Dua sersan Marinir, Usman bin Muhammad Ali dan Harun bin Said alias Tahir, gugur di tiang gantungan di kota Singapura sebagai kusuma bangsa sebelum mereka sempat meledakkan bom di tengah kota dan markas militer milik Inggris. Politik di era tersebut benar-benar menjadi panglima dengan semboyan "satu tangan pegang bedil dan satu tangan lagi pegang pacul".

Wajar bila kemudian inflasi nasional membumbung hingga angka 650 persen akibat pemerintah terus mencetak uang. Utang luar negeri untuk kepentingan pembelian alutsista dari Rusia dan Eropa Timur membobolkan devisa negara hingga kosong melompong, bahkan minus. Anggaran untuk kepentingan militer saat itu memicu defisit sebesar Rp 1,32 triliun atau empat kali lipat dari defisit tahun sebelumnya pada 1963.

Puluhan panti pelayanan kaum penyandang disabilitas tercekik dan merasa tidak sanggup lagi melaksanakan kegiatannya. Panti-panti tersebut terancam tutup dan gulung tikar. Prahara nasional ternyata bukan saja telah meluluh lantakkan kehidupan rakyat jelata, bahkan hingga pada lini kewajiban negara untuk turut melindungi kaum rentan, para penyandang disabilitas, dan lansia yang pernah pula mengangkat senjata menegakkan berkibarnya Sang Saka Merah Putih di awal kemerdekaan. Di setiap sudut dan pelosok negeri terjadi antrean untuk memperoleh beras, lauk, serta minyak tanah sebagai bahan bakar kompor. Gelandangan, pengemis, dan para penderita gangguan jiwa

bergentayangan bebas di jalanan kota Jakarta maupun kota lainnya. Pengorbanan rakyat tak kunjung berakhir.

Langkah cepat untuk mengatasi krisis tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan Djuanda melalui Regulasi 26 Mei 1963. Sayangnya, kebijakan tersebut kandas di tengah jalan. Bradley R Simpson menyebutnya sebagai "Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968".

Badan Kerja Sama Panti Asuhan (BKSPA) yang lahir sejak 1957 menjadi organisasi pertama yang mencoba menyampaikan situasi pelayanan sosial kepada pemerintah, baik di Jakarta maupun di kota lainnya. Organisasi ini terdiri dari sejumlah lembaga sosial yang berada di bawah payung Aisyah Muhammadiyah, Muslimat NU, Dewan Gereja Indonesia, Darul Aitam, Hollands Women Council, serta beberapa kelompok lainnya. Sebelumnya, pada masa pendudukan Jepang, mereka juga sudah ada dengan nama "Naikubu Kosaika", meskipun tidak begitu besar dan tidak banyak kegiatannya.

Rombongan BKSPA didampingi oleh Prof. Raden Mas H. Sumantri Praptokusumo (Muhammadiyah) yang ketika itu menjabat sebagai Dirjen Departemen Sosial, beserta koordinator delegasi Johana Sunarti Nasution berupaya menghadap Presiden Sukarno. Mayor Sabur, yang ketika itu menjadi ajudan kepercayaan Presiden, menerima rombongan tersebut. Namun, acara yang sudah dijadwalkan istana tersebut batal. Keesokan harinya, keluarlah pemberitaan di media-media nasional pernyataan keras Penyambung Lidah Rakyat tentang "Go to Hell with Your Aid". Hal ini diduga

karena sudah ada yang melaporkan bahwa lebih dari separuh organisasi sosial yang datang menghadap ke istana berada di bawah payung internasional. Mereka yang turut hadir bersama BKSPA saat itu adalah Peter Van Berg, Pimpinan Panti Asuhan Vicentius Putera, Broeder Wynand, Zuster Augusta, Mevrouw de Vreede, Ny. Tjoa (Chúnjié de xīn), Ny. Oetardjo dan Ny. Titi Said (Mother Wings), Ny. Soma (Putera Setia), Vera Oei Hong Luan, Ny. Lauw (Chandra Naya) dan Prof. Dr. Hendarmin (Hollands Women Council) serta beberapa lagi lainnya.

Merasa tidak ditanggapi oleh Presiden Sukarno, Johana Sunarti Nasution yang kala itu juga menjabat sebagai Ketua Persit (Persatuan Istri TNI) didesak oleh mereka yang kecewa atas sikap presiden untuk mengadakan pertemuan. Mereka menggagas kembali langkah-langkah organisasi sosial nasional dalam mewujudkan negeri yang sejahtera, dengan atau tanpa pemerintah. Anggota yang turut serta juga semakin bertambah, di antaranya adalah Ny. Tika Gondokoesoemo, Ny. Siregar, Ny. Shiil Abdurachim, Ny. Soemarno (istri Gubernur Jakarta Dr. Soemarno), dan beberapa lainnya dari kelompok Katolik, Protestan, Islam, maupun organisasi internasional.

Tepat empat minggu sebelum pecahnya G30S PKI, pada 2 September 1965, Johana Sunarti Nasution didaulat sebagai pimpinan Badan Kerja Sama Panti Asuhan (BKSPA). Posisi ini menjadi penting dalam perjalanan sejarah menuju pembentukan DNIKS.

Upaya Pembangunan Sosial Ekonomi Era Orde Baru

Pada bulan Februari 1967, setelah pemerintahan dipegang oleh Presiden Suharto, delegasi ekonomi Indonesia antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Drs. Radius Prawiro, Sumitro Djojohadikusumo serta beberapa lagi lainnya menuju Den Haag, Belanda. Yakni membicarakan persoalan ekonomi nasional yang tengah tepuruk dan membutuhkan bantuan donator luar negeri. Maka, bertemulah delegasi tersebut dengan Perdana Menteri (PM) Berend Jan Udink dan mengadakan perundingan selama lima hari. PM Belanda Jan Udink sepakat untuk menjadi Koordinator IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*). Anggota donator tersebut selain sejumlah negara kaya, juga bank-bank internasional. Jan Udink juga mengingatkan bahwa jangan terulang kembali dana yang diberikan guna pembangunan ekonomi, dialokasikan untuk memperkuat militer.

"Tentu saja tidak. Karena era sudah berbeda," tegas Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bahkan, Sri Sultan juga meyakinkan Jan Udink bahwa pemerintah nantinya akan lebih memperhatikan pula persoalan-persoalan pembangunan sosial masyarakat yang di masa lalu terabaikan. Anggaran guna pembangunan panti-panti sosial ataupun pelayanan sosial lainnya akan ditambah serta diperhatikan. PM Belanda yang juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, serta juga mantan Minister of Housing and Spatial Planning, merasa lega dengan perkataan itu. Sepulang dari Belanda, ketika berjumpa dengan Jendral AH Nasution di Gedung Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Sri Sultan menceritakan kisahnya tersebut.

Dalam perjalanan selama awal Orde Baru, ternyata BKSPA yang dikomando oleh Johana Suharti Nasution berkembang sangat cepat dan pesat. Sejumlah donator dari Eropa, American Women Association, Werg Group 72 (Hollands), Australia, Kanada, maupun Jepang ikut mendanai kegiatan-kegiatan BKSPA. Lebih-lebih setelah Gubernur Jakarta Mayor Jendral KKO Ali Sadikin menerbitkan SK Gubernur guna mengucurkan dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh BKSPA. SK Gubernur Jakarta No A10/1/16/1966 tertanggal 30 April 1966 juga mencantumkan Gubernur sebagai pelindungnya. Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya adalah Gubernur Jakarta dr. Soemarno malahan sehari sebelumnya juga meluncurkan SK soal bantuan dan jaminan sosial.

Pada 1 September 1966, di Washington D.C., Amerika Serikat diselenggarakan sebuah konferensi internasional tentang Kesejahteraan Sosial, "The 13th International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)". Tuan rumahnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Semula ICSW adalah sebuah organisasi kesejahteraan sosial tingkat regional Eropa yang didirikan di Paris pada tahun 1928. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia II, permasalahan yang mereka tangani semakin kompleks serta membutuhkan kerjasama multilateral di ranah internasional. Maka dihimpunlah sejumlah komite untuk kesejahteraan sosial dari berbagai negara dan Kawasan.

Berangkatlah delegasi Indonesia untuk turut serta dalam perhelatan tersebut. Mereka yang mewakili Indonesia terdiri dari Alwi Sutan Osman, S.H. (Dirjen Imigrasi), Prof. Raden Mas H. Sumantri Praptokusumo, S.H. (Departemen Sosial), Ijas Suhanda (Indonesia Red Cross Departemen Sosial), S.H., dr. Salekan (Departemen Kesehatan), A.M. Pasila, S.Th (Direktur Jenderal Urusan Bencana Alam dan Bantuan Sosial di Departemen Sosial), Prof. H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif (Departemen Agama), dan Djadjat Sudradjat (Diplomat).

Ikut sertanya Indonesia di konferensi tersebut sangatlah menjadi perhatian sejumlah negara. Maklum, karena sebelumnya Indonesia pada masa Bung Karno sempat menyatakan diri keluar dari anggota United Nations dan mendirikan apa yang ia sebut sebagai New Emerging Forces. Bahkan, negara-negara blok Barat beranggapan bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari Blok Timur dengan Poros Jakarta-Hanoi-Beijing. Setelah diplomat Djadjat Sudradjat menyampaikan situasi Indonesia saat itu, barulah tepuk tangan menggema untuk delegasi Indonesia di Gedung UN New York tersebut.

Apresiasi untuk Indonesia tidak hanya sampai di situ, SD Ghokale selaku Secretary Generale ICSW kawasan Asia Pasifik langsung mendatangi meja delegasi Indonesia untuk bersalaman. Lama sekali jabatan tangan yang ia berikan dengan hangat. Kemudian, SD Ghokale mengundang delegasi Indonesia untuk *dinner* bersama dengan sejumlah rekannya di sebuah resto cukup ternama di New York, Le Diplomate, di bilangan Manhattan, New York. Ternyata SD

Ghokale tidak sendiri. Ia juga disertai oleh Jan Beekman (Secretary Nationale Raad voor Maatchscppelijk Welzijn, Nederland) dan Marga Klompe (Ministerie voor Cultuur, Rekreasi e Maatchscppelijk Werk) dan beberapa orang lainnya asal Belanda. Maka, meja mereka pun berulang kali disuguhkan menu serta minuman penghangat.

Saat pulang, SD Ghokale berpesan, agar Jakarta sesegera mungkin membentuk Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial. Jan Klompe juga menyampaikannya di dalam bahasa Belanda; *" Wij moeten voorzichtig zijn. Als bu Nas vervangenwordt dan wetenwij niet wat er gaat gebeuren"* (Hati-hati jangan terlalu lama. Kalau Bu Nas tidak ada, tidak tahu apa nanti jadinya). Semua delegasi Indonesia seperti serempak memahami pesan tersebut. *"Wij zullen het goed doen"* (Akan kami lakukan sebaik mungkin)," jawab Alwi Sutan Osman dengan senyuman.

Tiba di Jakarta, setelah beberapa hari istirahat. Secara bersama-sama para delegasi dari Konferensi Internasional ke-13 Dewan Kesejahteraan Sosial tersebut bertemu dengan Johana Sunarti Nasution di Teuku Umar. Mereka melaporkan tentang perkembangan di dalam konferensi di New York dan tuntutan kepada Indonesia. Beberapa bulan setelah itu, dideklarasikanlah Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial Indonesia yang kini menjadi DNIKS setelah dilebur dengan BKSPA yang diketuai oleh Johana Sunarti Nasution.

Deklarasi DNIKS Tahun 1967

Pada tanggal 15 Juli 1967, tujuh tokoh visioner berkumpul di Jakarta untuk mendeklarasikan pembentukan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Deklarasi tersebut ditandatangani dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna di kediaman Johana Sunarti Nasution di Jalan Teuku Umar No. 40, Menteng, Jakarta Pusat.

Tujuh tokoh yang merupakan mantan delegasi Indonesia pada konferenis ICSW yang diselenggarakan 1 September 1966, yaitu Mr. Soemantri Praptokosomo, A.M. Pasila S.Th., Djajat Drajat, Mr. Alwi Sutan Oesman, Dr. Salekan, Mr. Ijas Suhanda, dan Narasaruddin Latif berkumpul pada tanggal 8 Juli 1967 untuk meresmikan pembentukan Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (KNKS). Penandatanganan Piagam Pendirian KNKS oleh ketujuh tokoh tersebut dilakukan pada tanggal 17 Juli 1967, yang kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran DNIKS.

Deklarasi tersebut menyatakan komitmen para pendiri untuk:

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila
2. Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial
3. Mengembangkan pemikiran, konsep, dan pendekatan inovatif dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial

4. Menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah dalam perumusan dan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial
5. Membangun jaringan kerja sama nasional dan internasional dalam bidang kesejahteraan sosial

Deklarasi ini menjadi tonggak bersejarah yang menandai dimulainya perjalanan panjang DNIKS dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Dokumentasi Momen Bersejarah Pendirian DNIKS

Momen penandatanganan deklarasi DNIKS pada 15 Juli 1967 didokumentasikan dalam beberapa foto bersejarah yang kini menjadi bagian penting dari arsip DNIKS. Foto-foto tersebut menampilkan ketujuh deklarator yang duduk bersama mengelilingi meja bundar di ruang tamu kediaman Johana Sunarti Nasution. Di atas meja tersebut terhampar dokumen deklarasi yang ditandatangani satu per satu oleh para deklarator.

Selain foto penandatanganan, terdapat juga dokumentasi berupa rekaman audio dari pidato singkat yang disampaikan oleh Johana Sunarti Nasution setelah penandatanganan. Dalam pidato tersebut, ia menyampaikan harapan bahwa **DNIKS akan menjadi "mercusuar kesejahteraan sosial" di Indonesia yang akan menerangi jalan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.**

Peristiwa pendirian DNIKS juga diliput oleh beberapa media massa nasional, meskipun tidak mendapat porsi yang besar mengingat situasi politik saat itu. Dokumentasi berupa kliping koran dan majalah dari masa tersebut juga tersimpan dalam arsip DNIKS sebagai bukti sejarah yang berharga.

Namun, karena keterbatasan waktu penyusunan buku ini, penyusun belum sampai menemukan berbagai dokumen fisik tersebut untuk dilampirkan dalam buku ini.

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN FUNGSI DNIKS

FILOSOFI DASAR

DNIKS dibangun di atas filosofi bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Filosofi ini berakar pada kesadaran bahwa Indonesia didirikan bukan hanya untuk meraih kemerdekaan politik, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Filosofi dasar DNIKS terinspirasi dari berbagai sumber, termasuk nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, kearifan lokal, dan pemikiran para pendiri bangsa. Beberapa prinsip filosofi yang menjadi pilar DNIKS antara lain:

DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEADILAN SOSIAL

Keyakinan bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya
dan kesempatan untuk hidup bermartabat.

GOTONG ROYONG

Semangat kebersamaan dan saling membantu
yang menjadi ciri khas bangsa indonesia

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Penghormatan terhadap martabat manusia dan hak-hak
asasinya tanpa diskriminasi

KEBHINNEKAAN

Pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman
sebagai kekuatan, bukan kelemahan.

KEBERLANJUTAN

Komitmen untuk memastikan bahwa upaya peningkatan
kesejahteraan sosial tidak mengorbankan kepentingan
generasi mendatang.

Filosofi dasar ini menjadi pedoman bagi DNIKS dalam merumuskan visi, misi, dan program-programnya.

Filosofi ini juga menjadi landasan etik yang mengarahkan perilaku para pengurus dan anggota DNIKS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selain filosofi dasar, ada makna simbolis yang terdapat pada elemen-elemen Logo DNIKS, yaitu:

1. **Perisai Berbentuk Segi Lima** - Melambangkan Pancasila sebagai dasar negara dan semangat persatuan.
2. **Warna Hijau** - Melambangkan nilai-nilai keadilan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia.
3. **Padi Kapas** - Menggambarkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran.
4. **Peta Indonesia** - Menggambarkan cakupan kerja DNIKS yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
5. **Tulisan "1967"** - Tahun berdirinya DNIKS.
6. **Tulisan "DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL"** - Merupakan kepanjangan dari DNIKS.

VISI DNIKS

“Menjadi masyarakat Indonesia yang maju mandiri sejahtera, dan berkeadilan.”

Visi DNIKS ini mencerminkan aspirasi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga mandiri dan berkeadilan. Visi ini mencakup beberapa dimensi penting:

Kemajuan

Pencapaian taraf hidup yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan

Kemandirian

Kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa ketergantungan berlebihan

Kesejahteraan

Pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara layak

Keadilan

Pemerataan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

MISI DNIKS

Untuk mewujudkan visinya, DNIKS menjalankan misi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial
2. Membina organisasi/lembaga sosial
3. Mengembangkan model penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial
6. Berperan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial
7. Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial tingkat nasional dan internasional

Misi ini mencerminkan peran DNIKS sebagai badan koordinasi yang memfasilitasi, membina, dan mengembangkan kapasitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial di Indonesia, serta menjadi jembatan antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

TUJUAN DNIKS

1. Memberdayakan organisasi anggota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial.
2. Mengefektifkan sistem jaringan kerjasama kemitraan yang melembaga di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial.
3. Melaksanakan advokasi yang efektif dan implementatif atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Memantapkan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Mengembangkan pusat data dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial informasi peran
6. Sosialisasi upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

FUNGSI DNIKS

1. Memperjuangkan kebijakan tentang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial.
2. Mengkoordinasikan upaya kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh organisasi anggota DNIKS maupun anggota masyarakat lainnya.
3. Memfasilitasi komunikasi, forum dan jaringan kerja dibidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial tingkat nasional dan internasional.
4. Memberdayakan dan memajukan organisasi anggotanya serta memfasilitasi bantuan teknis.

1967
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB III

DEKLARATOR DNIKS

Profil Tujuh Deklarator DNIKS

1. Prof. Mr. Raden Mas H. Sumantri Praptokusumo

Raden Mas H. Sumantri Praptokusumo adalah seorang bangsawan Jawa yang berprofesi sebagai ahli hukum dan aktivis sosial. Lahir di Kranggan, Temanggung pada 12 Juni 1912, ia menyelesaikan pendidikan hukumnya di Rechtshogeschool Jakarta. Selama masa revolusi, ia terlibat dalam diplomasi Indonesia dan kemudian aktif dalam gerakan sosial di era Orde Lama.

Dalam pendirian DNIKS, Sumantri Praptokusumo berkontribusi dalam menghubungkan DNIKS dengan jaringan aristokrasi Jawa dan berbagai organisasi sosial tradisional. Ia juga berperan dalam merumuskan filosofi dasar DNIKS yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Indonesia dengan konsep modern kesejahteraan sosial. Keberadaannya memberikan legitimasi kultural yang kuat bagi DNIKS di mata masyarakat tradisional.

Sejak era pemerintahan Soekarno, ia sudah sangat aktif memperjuangakan kesejahteraan sosial, bertepatan dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Departemen Sosial kala itu. Pada saat konferensi internasional tentang kesejahteraan sosial, "*The 13th International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)*" tanggal 1 September 1966 di Washington D.C., Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal berdirinya DNIKS, Sumantri menjadi delegasi Indonesia sebagai perwakilan Departemen Sosial.

Soemantri Praptokoesoemo adalah Pencetus/pelopor pelaksanaan LSD (Lembaga Sosial Desa) pada tanggal 5 Mei 1952 sehingga dikenal sebagai Bapak Lembaga Sosial Desa. Ia merupakan pelopor/penggagas berdirinya Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra "Wisma Tan Miyat" yang diresmikan oleh Menteri Kesejahteraan Sosial pada tanggal 20 Desember 1959. Ia juga pencetus ide Karang Taruna pada 26 September 1960. Pada tanggal 7-18 Agustus 1967, Sumantri mewakili pemerintah hadir dalam pertemuan *"The Interregional Expert Meeting on Social Welfare Organization and Administration"*, yang diselenggarakan oleh PBB di Jenewa. Pada tahun 1967 ini juga, ia diangkat menjadi *Agences of International of Social Service In Indonesia*. Setelah keterlibatannya mendirikan DNIKS pada tahun 1967, ia kemudian dipercaya menjadi Sekjen DNIKS pada Munas (Musyawarah Nasional) tahun 1970.

Djakarta 18 Agustus 1967.-

Perihal: U.N.Interregional Expertmeeting on Social Welfare; Geneva, 7-18 Agustus 1967.

Kepada Jth.
Bapak MENTERI UTAMA BIDANG EKUBANG
di
DJAKARTA.-

1. Dengan ini saja dengan hormat mempermaklumkan, bahwa pada tgl. 7 sampai dengan 18 Agustus 1967, di Djenewa telah diadakan oleh P.B.B. sebuah meeting, jaitu Interregional Expertmeeting on the organization and administration of social welfare.

2. Pada 13 orang experts on social welfare jang diangkat langsung oleh P.B.B.dari seluruh regions di dunia, termasuk seorang dari Indonesia, jaitu Prof.Sumantri Praptokusumo S.H.,diwadjibkan pada meeting itu untuk membahas setjara mendalam dan menjeluruh : Organization & Administration of Social Welfare, sedangkan hasilnja kemudian disusun dan dihimpun dalam pola2 guidelines tentang: Organization and Administration of Social Welfare, disertai dengan summary dan recommendations.

3. Pola2 tersebut tentang: Organization and Administration of Social Welfare serta recommendations ini akan dipergunakan sebagai "dokumen - dasar" jang utama dalam meeting dari Menteri2 Kesedjahteraan Sosial dari negara2 anggauta P.B.B. dalam bulan September tahun 1968 di New York.

4. Outline dari Report jang isinja Pola2 tentang Organization and Administration of Social Welfare terdiri dari :
   Introduction.
   Summary of conclusions and recommendations.
   Chapter I : Social welfare in national development.
   Chapter II : The meaning of Government Responsibility for Social Welfare.
   Chapter III : The organization of Social Welfare.
   Chapter IV : The administration of Social Welfare.

5. Report tersebut sedang dalam pengolahan terachir oleh Rapporteur jaitu Dr.Herbert L. Pottle, dari Canada.
6. Sesudah pengolahan tersebut, Report akan segera diserahkan pada Secretary-General.
7. Sebelum dikeluarkan setjara resmi oleh Secretary-General, belum dapatlah diadakan pengumuman tentang isi Report tersebut.
8. Namun demikian, setjara konfidensiil dan sementara dapatlah disampaikan beberapa garis besar dari Report tersebut, sebagai bahan2 persiapan pertama bagi konperensi para Menteri Kesedjahteraan Sosial, tahun 1968.
   Garis2 besar itu adalah sebagai berikut:

a....

Di dunia pendidikan, Soemantri Praptokoesoemo mendirikan Fakultas Kesejahteraan Sosial di Universitas Muhammadiyah Jakarta ada Tahun 1961. Pada tahun 1980 nama FKS berubah menjadi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS). Kemudian, pada tahun 1985, nama FIS berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP-UMJ). Soemantri Praptokoesoemo menjabat Guru Besar/Dekan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk periode 1961-1973 / 1973-1977 / 1977-1982 / 1982-1985. FISIP-UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta juga merupakan fakultas tertua dilingkungan Universitas Muhammadiyah yang berada di seluruh Indonesia.

Selain itu, Soemantri adalah salah satu perintis sekaligus pengembang jurusan/departemen Penmas - Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP/Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Pada tahun 1978, ia diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Keguruan (IKIP/Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung). Ia juga merupakan tokoh pertama pelopor Sekolah Pekerja Sosial Tingkat Atas/Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SPSA) yang berada di Bandung, Yogyakarta dan Malang, serta pendidikan lanjutannya berupa Akademi Pendidikan Pekerja Sosial sebagai pendidikan lanjutan selama 2 tahun yang di resmikan pada tahun 1964 Oleh Menteri Sosial Rusiah Sardjono.

Jiwa sosial Soemantri tidak berhenti di sini, ia mendirikan dan menjadi Ketua Yayasan "Bunga Kemboja", yaitu yayasan yang bergerak di bidang jasa pemulasaran jenazah, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu no.19, Jakarta Selatan. Ia juga menjadi Ketua Yayasan Dana Bantuan yang bergerak

di bidang pelayanan sosial seperti memberikan beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, santunan kepada kaum lansia duafa, serta kegiatan sosial lainnya, beralamat di Jl. Brawijaya Raya No.15, Jakarta Selatan.

Kunjungan Pengurus Yayasan Dana Bantuan ke Kediaman Presiden Soeharto (Soemantri Praptokoesoemo, Lasmidjah Hardi)

Pada tanggal 26-28 Juli 2002, atas inisiatif Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, dan Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran Bandung, menyelenggarakan Konfrensi Nasional Pekerja Sosial Profesional Indonesia tahun 2002 bertempat di aula Universitas Padjadjaran Bandung sebagai tempat pembukaan dan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai kegiataan konferensi, yang di hadiri oleh Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah,S.E. Dalam acara konfrensi tersebut

diadakan penganugerahan "Award Perintis Pendidikan Pekerjaaan/Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2002" kepada Prof. H. Soemantri Praptokoesoemo, S.H.

Setelah pensiun dari jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial pada tahun 1969, Sumantri menciptakan lambang pembangunan kesejahteraan sosial/Lambang Pembangunan Sosial (Adicita Pekerjaan Sosial) pada tanggal 20 Desember 1949, yang pernah menjadi lambang atau logo Departemen Sosial dan lambang Pembimbing Pekerja Sosial (PPS), serta lambang kebanggaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Lambang itu yang selanjutnya digunakan menjadi dasar Lambang Satyalancana Kebaktian Sosial (PP No. 032/1959 dan Permensos No. 10 Tahun 2019). Pada tanggal 20 Desember ini pula ditetapkan sebagai “Hari Sosial” atau “Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional” (HKSN).

Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa

Atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara Indonesia, Sumantri Praptokusumo dianugrahi beberapa tanda jasa satyalencana dan award, diantaranya:

1. Satyalantjana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan (KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 454 TAHUN 1961).
2. Satyalancana Dwidya Sistha
3. Satyalancana Kebaktian Sosial
4. Lancana Dermawan Darah dari PMI Pusat
5. Penghargaan sebagai ide / Pencetus atau pencipta lambang pembangunan kesejahteraan sosial / Lambang Pembangunan Sosial (Adicita Pekerjaan Sosial) pada tanggal 20 Desember 1949.
6. Gelar “Bapak Lembaga Sosial Desa” pada tanggal 7 Mei 1962, pada Musjawarah Pendewasaan L.S.D di selenggarakan di Djawa Tengah kota Semarang.
7. "Award Perintis Pendidikan Pekerjaan/Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2002" (Pada acara Konferensi Nasional Pekerja Sosial Profesional Indonesia Tahun 2002 di Bandung)

2. Prof. H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif

Prof. H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif lahir di Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, Sumstera Barat pada tanggal 18 September 1916 dan wafat pada tanggal 24 Desember 1972. Beliau menempuh pendidikan dasar di SR (Sekolah Rakyat) Volkschool & Vervolgschool yang diselesaikan tahun 1930, kemudian melanjutkan pendidikan agama di Perguruan Thawalib Padang Panjang hingga tahun 1935. Sebagai seorang ulama-intelektual dari Minangkabau, Sumatera Barat, Nasaruddin Latif memulai karier sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Agama, hingga akhirnya menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya pada tahun 1954. Perjalanan kariernya terus menanjak dengan berbagai jabatan strategis di Kementerian Agama hingga mencapai posisi sebagai Direktur Penerangan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada saat konferensi internasional tentang kesejahteraan sosial, "*The 13th International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)*" tanggal 1

September 1966 di Washington D.C., Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal berdirinya DNIKS, Nasaruddin Latif menjadi delegasi Indonesia sebagai perwakilan Departemen Agama.

Kemudian, salah satu jejak pengabdian Nasaruddin Latif di Kementerian Agama adalah memprakarsai pembentukan Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya bersama H. Sulaiman Rasjid dan H.Z. Arifin Datuk tahun 1950. Pada tahun 1954, ia diangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya sampai 1963.

Prof. Nasaruddin Latif dikenal sebagai pelopor penasihatan perkawinan (*marriage counseling*) di Indonesia yang pada 4 April 1954 mendirikan Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di Jakarta, yang kemudian berkembang menjadi Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5). Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian pada tahun 1950-an yang mencapai 500.000 per tahun atau rata-rata 55 persen dari jumlah pernikahan. Pada bulan Januari 1960, atas usulan Nasaruddin Latif, berbagai organisasi penasihat perkawinan lokal disatukan menjadi BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penasihat Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga Kementerian Agama RI pada tahun 1963, sebuah lembaga yang bertugas melakukan penelitian ilmiah dan penasehatan perkawinan untuk memperkuat usaha-usaha BP4.

Sebagai seorang ulama yang produktif menulis, Prof. Nasaruddin Latif menghasilkan berbagai karya penting yang menjadi rujukan dalam bidang perkawinan dan keluarga.

Karya-karya beliau antara lain buku "Teori dan Praktik Nasihat Perkawinan" (1959) dan buku "Ilmu Perkawinan" (1962). Beliau juga aktif dalam dunia jurnalistik dengan menjadi Pendiri dan Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Majalah Nasihat Perkawinan BP4 Pusat tahun 1972, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi majalah Keluarga Sejahtera LKBN Pusat (1969-1971), serta Pemimpin Umum Majalah Masyarakat Islam Departemen Agama (1970-1972). Melalui media-media ini, beliau menyebarluaskan pemikiran dan pandangannya tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam pembangunan bangsa.

Nasaruddin Latif merupakan salah seorang tim penyusun buku Pedoman Agama Islam untuk TNI AD. Buku Pedoman Agama Islam ini disusun atas perintah KSAD Jenderal TNI A.H. Nasuttion. Selain itu, ia mendapat tugas sebagai anggota Badan Sensor Film (1953-1959), anggota Dewan Film Nasional (1972), pembina rohani karyawan Kementerian Keuangan/PT Taspen, serta dosen tamu pembinaan mental karyawan PT Caltex Pacific Indonesia di Rumbai Pekanbaru (1967-1972).

Kontribusi besar Prof. Nasaruddin Latif juga terlihat dalam gerakan Keluarga Berencana (KB) nasional, di mana beliau menjabat sebagai Deputi Kepala BKKBN yang membidangi kegiatan motivasi, pendidikan, latihan, penelitian dan penilaian. Dalam kapasitas ini, beliau berperan penting dalam mendapatkan dukungan tokoh-tokoh ulama untuk program KB dengan melakukan pendekatan personal ke berbagai ulama terkemuka di Indonesia. Sejarah program Keluarga Berencana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran dan jasa H.S.M. Nasaruddin Latif yang mewakili

Muhammadiyah bersama K.H. Dr. Idham Chalid dari NU. Pada periode terakhir hidupnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia (1971-1972) di masa Menteri Dr. KH. Idham Chalid, menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap keahlian dan kontribusinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan keluarga di Indonesia.

Berbagai jabatan penting pernah diamanahkan kepada Nasaruddin Latif semasa hidupnya, antara lain: Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya (setingkat Kakanwil Provinsi sekarang), Anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) Kementerian Kesehatan RI, Ketua Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), Deputi Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang pertama, Direktur Penerangan Agama Kementerian Agama RI, Guru Besar Pusat Rawatan Rohani Islam TNI-Angkatan Darat (Pusroh Islam AD) tahun 1955, Staf Ahli Menko Kesra, Ketua Badan Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4 Pusat), dan lainnya.

3. Mr. Alwi Sutan Osman

Alwi Sutan Osman adalah seorang ahli hukum yang memiliki perhatian besar pada aspek legal dari kesejahteraan sosial. Lahir di Bukittinggi pada 17 Agustus 1920, ia menyelesaikan pendidikan hukumnya di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta sebelum Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, ia aktif dalam berbagai organisasi hukum dan sosial.

Ketika menjadi delegasi Indonesia pada konferensi internasional tentang kesejahteraan sosial, "*The 13th International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)*" tanggal 1 September 1966 di Washington D.C., Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal berdirinya DNIKS, Sutan Osman menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

Dalam pendirian DNIKS, Sutan Osman berperan dalam merumuskan dasar-dasar hukum organisasi, termasuk draft awal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART). Keahliannya dalam bidang hukum sangat berharga dalam memastikan DNIKS memiliki landasan legal yang kuat. Ia juga menjadi penghubung dengan berbagai instansi pemerintah, terutama Departemen Sosial pada masa itu.

Alwi pernah bertugas di Djawatan Imigrasi Departemen Hukum sejak 1954 dan menjabat sebagai Kepala Djawatan Imigrasi tahun 1954-1960. Ia juga kerap mewakili pemerintah dalam konferensi internasional, seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) di Jenewa tahun 1958 dan *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property Rights* (BIRPI) di Jenewa tahun 1965. Putri Alwi bernama Indira (Iin) adalah teman sekolah Megawati Sukarnoputri semasa belajar di Perguruan Cikini (Percik) bersama Reni Soerjanti anak Jenderal Hoegeng.

4. dr. Salekan

Dr. Salekan merupakan tokoh penting dalam sejarah perkembangan psikiatri modern Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grogol, Jakarta pada periode 1958–1963. Sebagai seorang visioner di bidang kesehatan jiwa, dr. Salekan menginisiasi transformasi fundamental dalam pelayanan kesehatan mental Indonesia dengan memperkenalkan landasan ilmiah yang lebih mengikuti perkembangan zaman psikiatri modern. Periode kepemimpinannya di RSJ Grogol bertepatan dengan era penting modernisasi Indonesia pasca kemerdekaan, di saat

berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk psikologi yang baru berkembang sejak 1952 melalui Prof. Slamet Imam Santoso, mulai mengadopsi pendekatan yang lebih ilmiah dan sesuai dengan standar internasional.

Perjuangan dr. Salekan juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia dalam rangka membangun berbagai RSJ dan Akademi Penilik Kesehatan. Sejak menjadi Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan pada tahun 1954, dr. Salekan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk memastikan pembangunan dan fasilitas RSJ terpenuhi sebagai wujud pelayanan sosial kepada masyarakat. Di bidang administrasi kesehatan jiwa, setelah melewati berbagai pergantian nama, mulai dari Djawatan Kesehatan jiwa hingga akhirnya berhasil dipatenkan menjadi Direktorat Kesehatan Jiwa. Di dalam direktorat ini telah dibentuk bidang preventif, kuratif, rehabilitasi, dan pendidikan paramedis. Aktor yang menginisiasi kemajuan ini adalah dr. Salekan (1958–1963), seorang yang pada mulanya merupakan Kepala Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta.

Kontribusi dr. Salekan tidak hanya terbatas pada modernisasi pelayanan klinis di RSJ Grogol, tetapi juga meluas ke ranah pembangunan sistem kesejahteraan sosial nasional. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), sebuah organisasi nonpemerintah yang didirikan pada 17 Juli 1967 dengan tugas mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat menjadi delegasi Indonesia pada konferensi internasional tentang kesejahteraan sosial, "*The 13th*

International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)" tanggal 1 September 1966 di Washington D.C., Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal berdirinya DNIKS, dr. Salekan merupakan perwakilan Departemen Kesehatan.

Selanjutnya, melalui DNIKS, dr. Salekan berhasil menciptakan kerangka kerja yang menghubungkan antara pelayanan kesehatan jiwa dengan sistem kesejahteraan sosial yang lebih luas, mencakup aspek rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial. Warisan pemikiran dan institusi yang dibangunnya tetap relevan hingga saat ini, dengan DNIKS yang terus aktif sebagai lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional, menunjukkan visi jangka panjang dr. Salekan dalam membangun fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan.

5. A.M. Pasila, S.Th.

A.M. Pasila adalah seorang pendeta dan teolog Kristen yang aktif dalam gerakan sosial berbasis agama. Lahir di Manado pada 25 Februari 1923, ia menyelesaikan pendidikan teologinya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ia memiliki pengalaman luas dalam mengelola program-program sosial yang diselenggarakan oleh gereja dan organisasi Kristen lainnya. Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Bencana Alam dan Bantuan Sosial di Departemen Sosial. Ia juga pernah menjadi Ketua Jajasan Rehabilitasi Sosial pada tahun 1968 dan Ketua Yayasan Pembangunan Sosial.

Dalam pendirian DNIKS, A.M. Pasila berperan dalam memperkenalkan perspektif Kristen tentang kasih dan pelayanan sosial dalam konsep kesejahteraan sosial DNIKS. Ia juga menjadi penghubung dengan berbagai organisasi sosial Kristen, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kehadirannya menegaskan sifat inklusif DNIKS yang merangkul berbagai latar belakang agama.

Pada tahun 1974, A.M. Pasila pernah menyediakan rumahnya sebagai tempat ibadah Persekutuan Oikumene yang kemudian menghibahkan sebidang tanah untuk gereja yang saat ini menjadi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bintaro Jakarta yang beralamat di Jl. Bintaro Permai II Jl. Pongtiku No.2, RT.7/RW.9, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Pada 27 Agustus 1978 diresmikan pertama kali sebagai pos kebaktian oleh Pdt. K.G. Hamakonda, kemudian ditegaskan oleh Pendeta Totok Subiyanto, STh pada 22 Juni 1980.

Pada saat berkontribusi bagi bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, pada awal kemerdekaan Indonesia, A.M. Pasila merupakan seorang Direktur Jenderal Urusan Bencana Alam dan Bantuan Sosial di Departemen Sosial yang kemudian menjadi delegasi Indonesia pada konferensi internasional tentang kesejahteraan sosial, "*The 13th International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)*" tanggal 1 September 1966 di Washington D.C., Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal berdirinya DNIKS.

6. Djadjat Dradjat

Djadjat Dradjat adalah seorang birokrat dan mantan pejuang kemerdekaan yang memiliki pengalaman luas dalam administrasi publik. Lahir di Bandung pada 12 September 1922, ia bergabung dengan Tentara Republik Indonesia saat revolusi dan kemudian beralih ke karier birokrasi setelah kemerdekaan. Ia memiliki jaringan luas di kalangan pemerintahan. Ia pernah mewakili pemerintah Indonesia di PBB pada tahun 1975 dalam *Commission for Social Development at Economic and Social Council.*

Dalam pendirian DNIKS, Djadjat Dradjat berperan dalam memastikan bahwa DNIKS memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah, terutama di era transisi Orde Baru. Keahliannya dalam birokrasi membantu DNIKS dalam menangani aspek administratif dan perizinan. Ia juga berperan dalam menyusun strategi untuk memastikan keberlanjutan DNIKS dalam konteks politik yang berubah.

Ketika menjadi delegasi Indonesia pada konferensi internasional tentang kesejahteraan sosial, "*The 13th International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)*" tanggal 1 September 1966 di Washington D.C., Amerika Serikat yang menjadi inspirasi berdirinya DNIKS, Djadjat Sudradjat merupakan seorang diplomat ulung yang mampu menepis anggapan negara-negara blok Barat tentang Indonesia yang dipandang telah menjadi bagian dari Blok Timur dengan Poros Jakarta-Hanoi-Beijing, setelah keluarnya Indonesia dari PBB. Djadjat menjadi pembicara dalam konferensi tersebut. Ia menjelaskan kondisi sosial ekonomi dan politik Indonesia yang sebenarnya saat

itu, yang kemudian disambut tepuk tangan menggema untuk delegasi Indonesia di Gedung PBB tersebut.

7. Mr. Ijas Suhanda

Pada agenda konferensi internasional tentang kesejahteraan sosial, "*The 13th International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)*" tanggal 1 September 1966 di Washington D.C., Amerika Serikat yang menjadi inspirasi berdirinya DNIKS, Ijas Suhanda mewakili Indonesia sebagai utusan Palang Merah Indonesia yang saat itu masih berada di bawah Departemen Sosial (Indonesia Red Cross Departemen Sosial). Menurut potongan sejarah yang penyusun temukan, Ijas Suhanda merupakan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) pada tahun 1984 (entah sejak/sampai kapan periodesasi ia menjadi Sekjen PMI).

Tidak banyak jejak sejarah yang menceritakan tentang Mr. Ijas Suhanda, hanya beberapa cacatan lama administrasi DNIKS yang penyusun temukan. Sebelum periode pertama kepemimpinan Johana A.H. Nasution sebagai Ketua Umum DNIKS tahun 1970, dibentuklah "Pengurus Sementara" yang mengurus kegiatan DNIKS sebelum Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan. Ijas Suhanda dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dengan Johana A.H. Nasution sebagai Ketua Umum, Prof. Sumantri Praptokusumo sebagai Ketua I, dan Dr. Salekan sebagai Ketua II.

Pada saat Munas pertama diselenggarakan tahun 1970, Ijas Suhanda tercatat sebagai salah satu dari 3 orang tim formatur yang ditunjuk selain Johana A.H. Nasution dan Prof. Sumantri Praptokusumo. Artinya, Ijas Suhanda menjadi orang penting yang sangat diperhitungkan posisinya saat itu. Kemudian, Ijas Suhanda dipilih oleh formatur untuk menjadi Ketua I DNIKS Periode pertama tahun 1970-1975. Hingga periode kedua tahun 1975-1980, Ijas Suhanda aktif membantu Johana A.H. Nasution menggerakkan berbagai kegiatan sosial bersama DNIKS sebagai orang kepercayaan Ketua Umum saat itu. Sampai pada periode ke-3 tahun 1980-1985, posisi Ijas Suhanda digantikan oleh Soetardjo Soeromarto dan sudah tidak aktif sebagai Ketua I DNIKS. Lantaran minim informasi, penyusun tidak mengetahui alasan mengapa Ijas Suhanda tidak aktif di akhir kepengurusan Johana A.H. Nasution.

Fasilitator Berdirinya DNIKS

Dalam sejarahnya, DNIKS tidak akan berdiri tanpa peran krusial seorang tokoh perempuan bernama Johana Sunarti Abdul Haris Nasution yang menjadi fasilitator utama deklarasi dan pengembangan awal DNIKS.

Profil Johana Sunarti A.H. Nasution

Johana Sunarti Abdul Haris Nasution merupakan seorang tokoh perempuan yang sangat berpengaruh saat itu yang memfasilitasi deklarasi Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (KNKS) sampai menjadi DNIKS. Johana diminta oleh 7 deklator untuk menjadi Ketua Umum pertama DNIKS yang rumahnya dipakai sebagai tempat konsolidasi dan penyusunan Piagam Pendirian KNKS/DNIKS. Piagam tersebut diserahkan kepada Johana dan ia menyampaikan pidato pertamanya setelah menerima amanat sebagai Ketua Umum DNIKS. Dalam pidatonya, Johana menyampaikan harapan bahwa DNIKS akan menjadi "mercusuar kesejahteraan sosial" di Indonesia yang

akan menerangi jalan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Sebelum adanya DNIKS, perjuangan Johana Nasution sudah sangat menonjol dalam upaya kesejahteraan masyarakat Indonesia pada periode awal kemerdekaan. Melalui Badan Kerja Sama Panti Asuhan (BKSPA) yang lahir sejak 1957, Johana didaulat menjadi ketua pada 2 September 1965. BKSPA ini menjadi organisasi pertama yang mencoba menyampaikan situasi pelayanan sosial kepada pemerintah, baik di Jakarta maupun di berbagai kota lainnya yang kurang diperhatikan oleh pemerintah Orde Lama saat itu karena kondisi ekonomi negara masih sangat sulit, juga karena pilihan politik konfrontasi yang dilancarkan oleh Soekarno.

Kemudian, di awal masa Orde Baru, BKSPA yang dikomando oleh Johana Nasution berkembang sangat cepat dan pesat. Sejumlah donatur dari Eropa, American Women Association, Werg Group 72 (Hollands), Australia, Kanada, maupun Jepang ikut mendanai kegiatan-kegiatan BKSPA. Lebih-lebih setelah Gubernur Jakarta Mayor Jendral KKO Ali Sadikin menerbitkan SK Gubernur guna mengucurkan dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh BKSPA. SK Gubernur Jakarta No A10/1/16/1966 tertanggal 30 April 1966 juga mencantumkan Gubernur sebagai pelindungnya. Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya adalah Gubernur Jakarta dr. Soemarno juga sehari sebelumnya telah menerbitkan SK soal bantuan dan jaminan sosial.

Johana adalah seorang aktivis sosial yang memiliki perhatian besar pada isu-isu perempuan dan anak. Lahir di

Surabaya pada 1 November 1923, putri dari Gondokusumo, pejuang angkatan Soetomo ini menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Guru Tingkat Menengah (SGTM) sebelum aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Selama masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, ia terlibat dalam gerakan kemanusiaan untuk membantu korban perang dan pengungsi. Johana adalah istri dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Panglima Divisi Siliwangi. Johana memiliki kontribusi di bidang sosial terlepas dari karier militer suaminya yang didasarkan pada kesetiaan terhadap negara.

Dalam pendirian DNIKS, Johana Sunarti Nasution berperan sebagai inisiator utama yang mengumpulkan para tokoh dan meyakinkan mereka tentang pentingnya membentuk lembaga yang khusus menangani kesejahteraan sosial. Ia menyediakan kediamannya sebagai tempat pertemuan-pertemuan awal dan deklarasi DNIKS. Setelah DNIKS terbentuk, ia ditunjuk sebagai Ketua Umum pertama yang memimpin lembaga ini dari tahun 1970 hingga 1985.

Seusai konferensi internasional tentang kesejahteraan sosial "*The 13th International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare)*" yang diselenggarakan tanggal 1 September 1966 di Amerika Serikat, para delegasi Indonesia secara bersama-sama bertemu dengan Johana Nasution di kediamannya. Mereka melaporkan tentang perkembangan di dalam konferensi tersebut dan tuntutan kepada Indonesia. Beberapa bulan setelah itu, dideklarasikanlah Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial Indonesia yang kini menjadi DNIKS setelah dilebur dengan BKSPA yang diketuai oleh Johana Sunarti Nasution.

Semasa hidupnya, Johana mendirikan beberapa yayasan sosial seperti Yayasan Bina Wicara "Vacana Mandira", Yayasan Jambangan Kasih, Yayasan "Pembinaan dan Asuhan Bunda", Yayasan "Panti Usada Mulia", Yayasan Santi Rama, Yayasan Ikrar Bhakti, Yayasan “Sayap Ibu” Pusat, Yayasan Kasih Adik, dan sebagainya.

Oleh karena dedikasinya terhadap negara melalui berbagai jasa dan aktivitas sosial, Johana mendapatkan anugerah sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah, di antaranya Satyalantjana Kebaktian Sosial pada tahun 1971, Lencana Satya Bhakti Utama Persit Kartika Chandra Kirana (20 Februari 1989), Bintang perjuangan Angkatan 45 (17 Agustus 1995), dan Bintang Mahaputera Utama (15 Agustus 1995). Selain itu, sejumlah penghargaan dari luar negeri yang pernah diterima oleh Johana adalah Centro Culturale Italiano Premio Adelaide Ristori Anno VIII pada tahun 1976, penghargaan Ramon Magsaysay Award for Public Service (31 Agustus 1981), serta penghargaan Paul Harris Fellow Award Rotary Foundation of Rotary International Amerika pada tahun 1982.

Ringkasan Kontribusi Johana pada Organisasi Sosial:

- Pendiri Yayasan Ikrar Bhakti (dari Persit)
- Deklarator dan ketua umum pertama DNIKS
- Pendiri dan Ketua I Yayasan Bina Wicara “Vacana Mandira”
- Pendiri dan Ketua Yayasan Jambangan Kasih
- Pendiri dan Ketua Yayasan “Pembinaan dan Asuhan Bunda”
- Ketua Yayasan “Sayap Ibu” Pusat

- Pendiri dan Ketua Yayasan Kasih Adik
- Ketua Bidang Dana FNKTRI
- Pendiri dan Ketua "Panti Usada Mulia"
- Pendiri dan Ketua I Yayasan Santi Rama
- Ketua *Raad van Gemachtigen van Deventer-Maas Stichting*
- Ketua Koordinator International Social Service Indonesia (ISSI)

Penghargaan dan Tanda Jasa:

1. Tanda Kehormatan Satya Lantjana Kebaktian Sosial 2/101971
2. *Centro Culturale Italiano Premio Adelaide Ristori Anno* VIII 20/9 tahun 1976
3. 1981 Ramon Magsaysay Award for Public Service 31 Agustus 1981 Manila, Filipina
4. Paul Harris Fellow Award Rotary Foundation of Rotary International 1982 Amerika
5. Lencana Satya Bhakti Utama Persit Kartika Chandra Kirana, 20 Februari 1989
6. Bintang perjuangan Angkatan 45 tanggal 17 Agustus 1995
7. Bintang Maha Putra Utama tanggal 15 Agustus 1995

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB IV

DASAR EKSISTENSI DNIKS

KEDUDUKAN DNIKS

A. Landasan

1. Ideal dan Konstitusional

Landasan ideal Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) adalah perwujudan amanat penderitaan rakyat sebagaimana secara konstitusional telah tersurat dan tersirat dalam UUD 1945 (Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya) dan berazaskan Pancasila.

Dalam UUD 1945, **Alinea Keempat berbunyi:**

"...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**..."

Pada Batang Tubuh UUD 1945:

Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

Pasal 28H ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"

Pasal 34:

- Ayat (1): "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"
- Ayat (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"
- Ayat (3): "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"

Dalam Pancasila, Sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan Sila ke-5 "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan landasan bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif.

2. Faktual

Sejarah berdirinya DNIKS yang berawal dari perwujudan ide para deklarator yang tertuang dalam suatu Piagam Pendirian Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (KNKS) pada tanggal 17 Juli 1967.

Setelah AD dan ART tersusun, Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (KNKS) diubah menjadi Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (DNKS) pada tahun 1968.

Atas prakarsa Menteri Sosial pada tahun 1970 tanggal 27 - 28 April, berlangsung MUNAS ke-I DNIKS yang dihadiri oleh utusan-utusan organisasi sosial dari berbagai latar belakang dan BPKKS DKI Jakarta, DNKS kemudian

menjadi DNIKS (Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial) dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai wadah organisasi-organisasi sosial di bidang kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, pada tanggal 8-10 Juli 1985, diselenggarakan MUNAS ke-II DNIKS yang mempertegas kembali pengakuan Pemerintah Pusat dan mendukung penuh eksistensi DNIKS.

3. Hukum

a) UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial;
b) SK Menteri Sosial RI Nomor 40 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;
c) SK Menteri Sosial RI No. 58/HUK/KEP/IX/1984 tentang Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan sosial sebagai organisasi Tingkat Nasional di bidang Kesejahteraan Sosial
d) SK Mensos RI No. 58/HUK/KEP/IX/1984 dipertegas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1985 tanggal 29 Januari 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/Daerah Tingkat I.
e) Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
f) Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 72/HUK/2010 tentang Pengukuhan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional

dengan tugas pokok mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
h) Surat Edaran Kemensos RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bersama DNIKS Sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkam kesejahteraan sosial antara Kemensos RI dengan DNIKS sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
i) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
j) Badan Hukum Perkumpulan DNIKS ditetapkan tahun 2025 oleh Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie dengan Akta Notaris dan Pengesahan Perkumpulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2014 dan perubahannya.

B. Maksud dan Tujuan

DNIKS merupakan suatu DEWAN berbentuk lembaga tinggi di bidang kesejahteraan sosial yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas usaha masyarakat (termasuk organisasi sosial) dalam kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat, DNIKS adalah "alat bantu" dari masyarakat untuk saling mengisi kesenjangan (*gap*) atau kelemahan dengan menjalin hubungan koordinasi fungsional di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Maksud dan tujuan tersebut dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang merupakan hakekat pembangunan nasional.

C. Sasaran Pelayanan

Sasaran pokok pelayanan DNIKS adalah:

1. Kelompok masyarakat umum diikutsertakan secara aktif dalam kegiatan kesejahteraan sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Sasaran ini mencakup pada kegiatan organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
2. Kelompok masyarakat penyandang masalah di bidang kesejahteraan sosial untuk difasilitasi dan direhabilitasi sehingga pada gilirannya dapat hidup mandiri dan sejahtera.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas DNIKS sebagai suatu DEWAN (Majelis) adalah "memberikan pelayanan" (*provide services*) kepada lembaga-lembaga dan badan-badan pelaksana operasional di bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk :

- Nasihat (*advising*)
- Rencana pengembangan (*developing plans*)
- Pembinaan (*counseling*)
- Koordinasi (*coordination*)
- Penghubung (*catalizing*)
- Pencetus dan penyebar ide (*innovating and transmitting of ideas*)
- Menggalakkan (*dynamizing*)
- Pelaksanaan tugas-tugas khusus (*performing specific tasks*), secara tidak langsung dan bersifat sementara.

Dalam hubungan kerjanya dengan pihak Pemerintah Pusat, DNIKS adalah sebagai *counter part* (mitra) kerja dan alat bantu yang mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam urusan pengembangan usaha kesejahteraan sosial.

DNIKS mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diprioritaskan kepada masyarakat dengan kriteria kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

DNIKS bertanggung jawab mencari dan memberi jalan keluar tentang bagaimana menangani dan mengatasi serta menolong manusia dan masyarakat dari kemalangan maupun tentang bagaimana mengangkat harkat dan martabat bangsa dari keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan kesesatan berfikir.

E. Hubungan Koordinasi DNIKS - BKKKS - KKKS

Sistem koordinasi kesejahteraan sosial di Indonesia dibangun melalui struktur berjenjang yang terdiri dari DNIKS di tingkat nasional, BKKKS di tingkat provinsi, dan KKKS di tingkat kabupaten/kota. Struktur ini dirancang untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari pusat hingga daerah dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.

Pembentukan BKKKS di tingkat provinsi mendapat landasan hukum yang kuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/Daerah Tingkat I. Instruksi ini menegaskan kedudukan BKKKS sebagai lembaga koordinasi tingkat provinsi yang bertugas membantu Gubernur dan Kepala Wilayah Departemen Sosial dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi sosial di bidang kesejahteraan sosial. Instruksi Mendagri No.5/85 tersebut dalam rangka menindaklanjuti SK Menteri Sosial RI No. 58/HUK/KEP/IX/1984 yang menegaskan sistem koordinasi kesejahteraan sosial dari tingkat nasional hingga daerah.

Sementara itu, pembentukan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) atau LKKS di tingkat kabupaten/kota merupakan amanat dari Anggaran Dasar DNIKS. Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar DNIKS tentang Bentuk Organisasi disebutkan bahwa DNIKS/LKKS Nasional adalah organisasi tingkat nasional yang berstruktur dan berjejaring dengan BKKKS/LKKS Provinsi di tingkat provinsi dan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)/LKKS di tingkat kabupaten/kota. Meskipun telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar DNIKS, pembentukan KKKS di berbagai daerah umumnya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati atau Walikota setempat sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Pola hubungan koordinasi antara DNIKS, BKKKS, dan KKKS diatur secara rinci dalam Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga DNIKS tentang Sifat Kerja Organisasi. Pertama, organisasi DNIKS/LKKSN bersifat interdependen dan koordinatif dengan BKKKS/LKKS tingkat provinsi, sekaligus berjejaring dengan LKKS di tingkat kabupaten/kota. Sifat interdependen ini menegaskan bahwa masing-masing tingkatan tidak bekerja secara hierarkis komando, melainkan saling bergantung dan mendukung dalam menjalankan fungsinya.

Kedua, DNIKS/LKKSN bersifat koordinatif dengan organisasi sosial tingkat nasional dan BKKKS/LKKS provinsi dalam hal program dan kelembagaan. Koordinasi ini memastikan keselarasan program kesejahteraan sosial dari tingkat pusat hingga daerah, memungkinkan pertukaran informasi dan pembelajaran bersama antar wilayah. Ketiga,

sifat koordinatif dari DNIKS sebagai LKKSN meliputi program advokasi dan advokasi anggaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial di seluruh Indonesia.

Struktur koordinasi berjenjang ini menciptakan sistem yang komprehensif namun fleksibel. Masing-masing tingkatan memiliki otonomi dalam menjalankan program sesuai karakteristik lokal, namun tetap dalam koridor koordinasi nasional. DNIKS sebagai koordinator nasional memberikan arahan kebijakan dan program, BKKKS menerjemahkan dan mengkoordinasikan di tingkat provinsi, sementara KKKS melaksanakan koordinasi operasional di tingkat kabupaten/kota yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sistem koordinasi ini terus berkembang menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan lapangan. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membawa perubahan paradigma yang mendorong transformasi kelembagaan, termasuk perubahan BKKKS menjadi LKKS di beberapa provinsi. Seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tahun 2009, BKKKS berubah menjadi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) "BK3S" DIY. Perubahan ini tidak hanya sekedar pergantian nama, tetapi juga penegasan status sebagai lembaga non-pemerintah yang independen, mandiri, dan bersifat koordinatif. Namun, esensi hubungan koordinasi tetap dipertahankan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari tingkat nasional hingga lokal dalam mewujudkan

kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Keberadaan struktur berjenjang antara DNIKS-BKKKS-KKKS menjadi kekuatan bagi DNIKS secara nasional dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia

TIMELINE PERKEMBANGAN STATUS BADAN HUKUM DNIKS

Berikut timeline perkembangan status badan hukum DNIKS sejak berdiri tahun 1967, yaitu:

1974: Dikeluarkannya UU Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial

1980: Terbitntya SK Menteri Sosial RI Nomor 40 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial

1984: Pada tanggal 19 September 1984, DNIKS memperoleh SK Menteri Sosial No. : 58/HUK/KEP/IX/1984 sebagai Wadah Koordinasi Organisasi-Organisasi Sosial Tingkat Nasional

1985: SK Mensos No 8/1984 dipertegas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1985 tanggal 29 Januari 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/Daerah Tingkat I.

1985: Munas DNIKS pada tanggal 10 Juli 1985 dalam rangka Penyempurnaan AD/ART, Rumusan Program Kerja DNIKS, dan pemilihan formatur yang terdiri dari unsur-unsur DNIKS, Orsos Tingkat Nasional, dan BKKKS/LKKS.

1996: Penyelenggaraan Lokakarya Penyempurnaan AD/ART DNIKS dan Penyelenggaraan Bersama BKKKS Yogyakarta kegiatan *International Conference on Street Children* di Yogyakarta, September 1996 yang dihadiri oleh 18 negara asing dan dari 27 propinsi di Indonesia.

2009: Terbitnya Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2010: Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 72/HUK/2010 tentang Pengukuhan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional dengan tugas pokok mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2011: 5 Juli 2011 Pernerbitan Notaris Pernyataan Tentang Anggaran Dasar DNIKS oleh H. Muhammad Cholis Hasan (Ketua Bidang Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat) dan Dr. Rohadi Haryanto, M.Sc (Sekretaris Jenderal).

2012: Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2014: Terbit Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2014 dari Kemensos RI tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bersama DNIKS Sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkam kesejahteraan sosial antara Kemensos RI dengan DNIKS sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2016: Diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

2025: Pengurusan Pendirian DNIKS berbadan hukum melalui Akta Notaris dan Pengesahan Perkumpulan oleh Ketua Umum Effendy Choirie yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), khususnya yang mengatur tentang perkumpulan sebagai salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, juga berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2014 dan perubahannya.

DAFTAR ORGANISASI DAN YAYASAN ANGGOTA DNIKS

Ada 35 organisasi dan yayasan yang tercatat menjadi anggota DNIKS hingga saat ini, yaitu :

1. Perempuan Melawan Korupsi – Laskar Anti Korupsi Indonesia (PERMAK – LAKI)
2. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
3. Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda
4. Perhimpunan Orang Tua Disabilitas (PORTADIN)
5. Forum Pembaharuan Kebangsaan
6. DPP GERKATIN (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia)
7. Yayasan Pusat Studi Kesejahteraan Sosial
8. DPP Perempuan Tani HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)
9. Yayasan Nanda Dian Nusantara
10. Special Olympics Indonesia (SOIna)
11. Hikmahyanti
12. Yayasan Permata Disabilitas Bunda
13. Yayasan Santi Rama
14. Yayasan Asih Budi
15. Perhimpunan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (PORTURIN)
16. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
17. IPKSPAI
18. FIS UMJ
19. Yayasan Tuna Rungu SEHJIRA (Sehat Jiwa Raga)
20. Yayasan Bersama
21. Komunitas Disabilitas Jakarta

22. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI)
23. Lembaga Peduli Dhuafa
24. Lembaga Lansia Indonesia (LLI)
25. Perkumpulan Pemilihan Umum Akses (PPUA)
26. Yayasan Pembinaan Anak Cacat Nasional (YPAC Nas)
27. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)
28. Pegiat Pendidikan Ekonomi Kreatif (PPEKRAF)
29. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YPAB)
30. Yayasan Damandiri
31. Federasi Nasional untuk Kesejahteraan Cacat Mental (FNKCM)
32. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI)/ Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI)
33. Yayasan Sayap Ibu
34. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
35. Bala Keselamatan

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB V

PERJALANAN KEPEMIMPINAN DNIKS

1. Deklarator (1967-1970)

Periode awal setelah deklarasi ditandai dengan kepemimpinan kolektif para deklarator yang bekerja bersama untuk meletakkan dasar-dasar organisasi. Ketujuh deklarator membentuk Dewan Pengarah yang secara bergiliran memimpin DNIKS. Periode ini merupakan masa krusial di mana DNIKS berupaya membangun identitas, memperluas jaringan, dan memperoleh pengakuan dari pemerintah dan masyarakat.

Tantangan utama pada periode ini adalah keterbatasan sumber daya dan situasi politik yang masih dalam masa transisi. Namun, dengan memanfaatkan jaringan personal para deklarator, DNIKS berhasil membangun fondasi yang kuat. Pencapaian penting pada masa ini adalah disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DNIKS, serta pengesahan DNIKS sebagai organisasi sosial yang sah di mata hukum.

2. Johana Sunarti A.H. Nasution (1970-1975, 1975-1980, 1980-1985)

Pada kongres pertama DNIKS tahun 1970, Johana Sunarti Nasution terpilih sebagai Ketua Umum DNIKS pertama. Periode kepemimpinannya yang panjang (15 tahun) menjadi masa konsolidasi dan ekspansi bagi DNIKS. Di bawah kepemimpinannya, DNIKS mulai membangun program-program konkret di bidang kesejahteraan sosial, termasuk program pemberdayaan perempuan, pendidikan untuk anak-anak miskin, dan bantuan bagi lansia terlantar.

Persoalan kompleks yang dihadapi pada masa ini adalah bagaimana memposisikan DNIKS dalam lanskap politik Orde Baru yang menerapkan kontrol ketat terhadap organisasi masyarakat. Johana berhasil menjaga independensi DNIKS sambil tetap membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah. Pencapaian penting pada masa kepemimpinannya adalah penyelenggaraan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial pertama pada tahun 1975 dan penerbitan jurnal akademik "Kesejahteraan Sosial Indonesia" pada tahun 1980.

Pada masa kepemimpinannya di DNIKS, Johana sangat *concern* pada para relawan dan pelembagaan pelayanan sosial, yang pada tahun 1981 mencakup 23 kelompok non-pemerintah nasional, 18 dewan koordinasi kesejahteraan sosial di tingkat provinsi, 17 sekolah/perguruan tinggi yang telah memiliki fakultas/kejuruan di bidang pekerjaan sosial, dan 9 lembaga pemerintah nasional. Ia mendirikan beberapa yayasan sosial seperti Yayasan Bina Wicara "Vacana Mandira", Yayasan Jambangan Kasih, Yayasan "Pembinaan dan Asuhan Bunda", Yayasan "Panti Usada Mulia", Yayasan Santi Rama, Yayasan Ikrar Bhakti, Yayasan “Sayap Ibu” Pusat, Yayasan Kasih Adik, dan sebagainya.

Oleh karena dedikasinya terhadap negara melalui berbagai jasa dan aktivitas sosial, Johana mendapatkan anugerah sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah, di antaranya Satyalantjana Kebaktian Sosial pada tahun 1971, Lencana Satya Bhakti Utama Persit Kartika Chandra Kirana (20 Februari 1989), Bintang perjuangan Angkatan 45 (17 Agustus 1995), dan Bintang Mahaputera Utama (15 Agustus 1995). Selain itu, sejumlah penghargaan dari luar negeri yang pernah diterima oleh Johana adalah Centro Culturale Italiano Premio Adelaide Ristori Anno VIII pada tahun 1976, penghargaan Ramon Magsaysay Award for Public Service (31 Agustus 1981), serta penghargaan Paul Harris Fellow Award Rotary Foundation of Rotary International Amerika pada tahun 1982.

3. Raden Panji H. Mohammad Noer (1985-1990)

Raden Panji H. Mohammad Noer, seorang birokrat senior dan akademisi, memimpin DNIKS pada periode 1985-1990. Sebagai mantan Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Bangkalan dan Gubernur Jawa Timur tahun 1967-1976, Mohammad Noer sangat dekat dengan masyarakat. Ia membangun Pulau Madura yang tadinya tandus dan dihantui kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan hidup menjadi daerah yang cukup maju dan produktif dengan pembangunan infrastruktur, menggerakkan pertanian, dan pencanangan pendidikan.

Melalui program 3P-nya (Pendidikan, Pangan, dan Perhubungan) hingga masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Timur, ia berhasil meningkatkan produksi beras yang menyumbangkan 50-60% dari hasil seluruh Indonesia pada tahun 1972. Di bidang pendidikan, Mohammad Noer mendirikan SMA Negeri Bangkalan dan memberikan Beasiswa Unggulan bagi anak-anak Madura untuk bisa kuliah di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), selain menyantuni berbagai universitas di Jawa

Timur, mendirikan yayasan-yayasan pendidikan dan pemberi beasiswa, dan upaya-upaya mencerdaskan anak bangsa lainnya.

Di bidang perhubungan dan pertanian, ia melakukan perbaikan dan pelebaran jalan, menggalakkan gerakan menanam pohon, membangun irigasi, dan menggagas pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Atas segala prestasi dan jasanya tersebut terhadap bangsa dan negara, Mohammad Noer diberikan penghargaan sipil tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Bintang Mahaputra Utama III. Ia dijuluki sebagai *"Bapak Wong Cilik Jawa Timur"*. Ungkapannya yang terkenal adalah *"Agawe wong cilik melu gumuyu"* (membuat rakyat kecil ikut tertawa) sebagai sebuah cita-cita membuat seluruh lapisan masyarakat bisa turut menikmati hasil pembangunan.

Masa kepemimpinan Mohammad Noer di DNIKS ditandai dengan penguatan aspek akademis pada kegiatan sosial. Ia menginisiasi kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan studi dan riset di bidang kesejahteraan sosial.

Hambatan utama dalam kepemimpinan Mohammad Noer adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik kesejahteraan sosial. Namun, ia berhasil mempertemukan akademisi dan praktisi dalam berbagai forum dialog dan kolaborasi. Pencapaian penting pada masa kepemimpinannya adalah pendirian Pusat Studi Kesejahteraan Sosial DNIKS pada tahun 1987 dan

penyelenggaraan Seminar Internasional Kesejahteraan Sosial di Asia Tenggara pada tahun 1989.

Ringkasan Riwayat Karier Mohammad Noer :

- Juli 1939 -Agustus 1949, Pamong Praja
- Agustus 1949-Maret 1950, Kapten TNI
- Maret 1950-Januari 1976, Pamong Praja terakhir
- Desember 1967-Januari 1976, Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur
- 1973 -1978, Anggota MPR RI
- Oktober 1976-Oktober 1980, Duta Besar R.I untuk Prancis
- Agustus 1981-1983, Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- 1983-11 Maret 1988, Anggota DPA Periode II
- 1987, Anggota MPR RI
- 1989-1997, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN)
- 1989-2010, Ketua Dewan Penyantun seluruh Universitas Negeri di Surabaya dan beberapa Universitas Swasta di Surabaya, Jember dan Madura
- 1980-2010, Ketua Yayasan Jantung Cab. Utama Jawa Timur
- 1984-2010, Ketua Yayasan Asma Wilayah Jawa Timur
- 1985-2010, Ketua Yayasan Aji Dharma Bhakti (bergerak di bidang Sosial Pendidikan) Pemberian beasiswa
- 2005-2010, Dewan Kurator Universitas Al-Zaytun
- 1970-an, Komisaris PT Super Mitory Utama (Sidoarjo)
- 1970-an, Komisaris PT Unilever Indonesia (Surabaya)

- 1970-an, Komisaris perusahaan properti PT Mas Murni Indonesia
- 1970-an, Komisaris Bank Tiara
- 1990-an, Direktur Utama PT Dhipa Madura Pradana
- 1990-an, Komisaris SCTV (Surya Citra Televisi)

Penghargaan dan Tanda Kehormatan :

1. Bintang Mahaputera Utama (6 Agustus 1974)
2. Bintang Gerilya (1960)
3. Bintang Jalasena Utama (1975)
4. Bintang Bhayangkara Utama (1973)
5. Satyalancana Perang Kemerdekaan I (1964)
6. Satyalancana Perang Kemerdekaan II (1964)
7. Satyalancana Penegak (1969)
8. Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia
9. Satyalancana Kebaktian Sosial (1985)
10. Lencana Melati - Gerakan Pramuka (1985)
11. Grand Officer of the National Order of Merit - Prancis
12. Manggala Karya Kencana dari BKKBN
13. Tanda Penghargaan dari Menteri Pemuda & Olah Raga
14. Tanda Penghargaan dari Menteri Keuangan "Pembayar Pajak Penghasilan Perorangan"
15. Piagam Penghargaan Rektor Univ. Airlangga "WIIDYA AIRLANGGA KENCANA" Atas Jasa Prestasinya ikut memajukan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kemasyarakatan dan Kebudayaan (S.K. Rektor Universitas Airlangga No.3748/PT03.H/P/1993) Tertanggal 13 Nopember 1993

4. Brigadir Jenderal TNI (Purn.) H. Gatot Soeherman (1990-1995)

Gatot Suherman, seorang pengusaha berlatar belakang militer dan birokrat yang pernah menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 1978-1988 dan Rektor Universitas Mataram (UNRAM) tahun 1974 memiliki kepedulian sosial yang tinggi, memimpin DNIKS pada periode 1990-1995. Masa kepemimpinannya ditandai dengan inovasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan program. Ia memperkenalkan konsep "*social entrepreneurship*" dalam program-program DNIKS dan mendorong kemandirian finansial organisasi. Ketika menjabat gubernur, Gatot Suherman berhasil mengubah NTB dari daerah rawan pangan menjadi surplus pangan melalui Operasi Tekad Makmur (OTM) pada tahun 1980. Sebelumnya, ia pernah menjadi komandan Korem di NTB dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI-AD.

Atas berbagai perjuangan dan dedikasinya untuk masyarakat Indonesia, Gatot Suherman memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama pada 6 Agustus 1986. Kemudian, ia dipercaya menjadi anggota Dewan

Pertimbangan Agung (DPA) era Soeharto tahun 1988-1998. Saat menjadi anggota DPA inilah Gatot aktif menggerakkan kegiatan sosial bersama DNIKS sebagai Ketua Umum.

Kondisi sulit yang dihadapi Gatot di DNIKS adalah krisis ekonomi yang mulai dirasakan pada awal 1990-an dan dampaknya terhadap pendanaan program sosial. Gatot Suherman berhasil menjaga keberlanjutan program DNIKS melalui pendekatan kemitraan dengan sektor swasta. Pencapaian penting pada masa kepemimpinannya adalah peluncuran program "Sejahtera Mandiri" yang menggabungkan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, serta pembukaan cabang DNIKS di 10 provinsi.

5. Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Bustanil Arifin, SH (1995-2000, 2000-2005)

Letjen TNI (Purn) H. Bustanil Arifin, mantan pejabat tinggi pemerintah dan militer, memimpin DNIKS pada periode krusial 1995-2005. Masa kepemimpinannya mencakup periode krisis ekonomi 1997-1998, transisi politik pasca-Orde Baru, dan awal era reformasi. Dengan latar belakang militer dan birokrasi, ia membawa pendekatan struktural dan sistematis dalam pengembangan DNIKS. Bustanil Arifin adalah Kepala Bulog pertama, Menteri Muda Koperasi Indonesia ke-1 pada Kabinet Pembangunan III, dan kembali menjadi Menteri Koperasi Indonesia pada Kabinet Pembangunan IV dan V di Era Soeharto. Saat dipercaya Soeharto sebagai Kepala Bulog, Bustanil berhasil melakukan swasembada pangan yang bahkan mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada tahun 1985.

Keberhasilannya memimpin Bulog dan pengalamannya menjadi menteri koperasi selama tiga periode membuat Bustanil dapat menggerakkan berbagai kegiatan sosial saat menjabat Ketua Umum DNIKS. Ia mendorong berbagai usaha rakyat berbentuk koperasi yang turut mendorong perekonomian nasional. Salah satunya, Bustanil berperan sangat besar dalam membangun usaha peternakan sapi perah rakyat dan koperasi susu sehingga ia diberi gelar sebagai "Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi Susu Indonesia". Bustanil sangat aktif mendedikasikan dirinya pada kegiatan-kegiatan sosial di berbagai yayasan seperti melalui Yayasan Dharmais sebagai bendahara (1975), Yayasan Jantung Indonesia sebagai dewan penyantun (1978), Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia sebagai ketua (1981), dan menjadi ketua Yayasan Pendidikan Koperasi (1982) sampai akhirnya menggerakkan kesejahteraan sosial bersama DNIKS.

Situasi kritis yang harus dikelola Bustanil Arifin sebagai Ketua Umum DNIKS adalah bagaimana merespon krisis ekonomi dan perubahan lanskap politik pasca-Orde Baru. Bustanil Arifin berhasil memposisikan DNIKS sebagai salah satu mitra penting pemerintah dalam penanganan dampak sosial dari krisis ekonomi. Pencapaian penting pada masa kepemimpinannya adalah peluncuran "Program Tanggap Krisis" yang membantu ribuan keluarga terdampak krisis ekonomi, serta reformasi internal DNIKS untuk menjadi lebih transparan dan partisipatif sesuai semangat reformasi.

Era Keemasan Dukungan Yayasan Orde Baru

Periode kepemimpinan Bustanil Arifin menandai era keemasan DNIKS dalam hal dukungan finansial. Sebagaimana dikemukakan dalam wawancara dengan mantan pengurus, DNIKS pada era ini dipandang sebagai "organisasi sinterklas" yang mampu memberikan bantuan-bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Nasional (Orsosnas) anggotanya. Hal ini dimungkinkan karena akses Bustanil Arifin sebagai orang kaya yang memiliki banyak perusahaan dan kedekatan dengan pemimpin Orde Baru sehingga DNIKS mendapat dukungan dari yayasan-yayasan milik Pak Harto seperti Yayasan Harapan Kita, Yayasan Dharmais, Damandiri, dan Supersemar yang memang didirikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan karena sakit atau untuk biaya pendidikan.

Ringkasan Biodata Bustanil Arifin :

- Pendidikan

- Hollandsch Inlandsche School (HIS), Medan (1940)
- Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Medan (1942)
- Sekolah Pegawai Tinggi (Zyoku Kan Gakkoo), Batusangkar, Sumatera Barat (1944)
- Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung (1959)
- Kupalda Unifikasi I, Cimahi (1964)
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat

- Karier

- Pegawai kantor pengacara (1940-1942)
- Pegawai Saikoo Kensatu Kyoku, Aceh
- Pegawai Kementerian Pertahanan Indonesia (1946-1949)
- Pegawai Kantor Logistik Wilayah VII, Jakarta
- Pengajar Latihan Logistik Militer, Cimahi
- Anggota DPR-GR

- Kepala Departemen Pendidikan dan Urusan Pegawai, Direktorat Logistik ABRI
- Asisten Pengawasan Bulog (1967-1969)
- Deputi Pengadaan dan Penyaluran Bulog (1969-1971)
- Konsul Jenderal Indonesia di New York (1971-1973)
- Direktur Utama PT PP Berdikari (1973)
- Deputi Pengadaan dan Penyaluran (tmt. 28 Maret 1973-1978)
- Kepala Bulog (Kabulog) (1978-1993)
- Menteri Muda Koperasi (1978-1983)
- Menteri Koperasi (1983-1993)
- Komisaris Utama Bank Duta (1990)
- Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (1995-2000)

- Karier Militer

- Pegawai Kementerian Pertahanan RI (1946-1949)
- Wakil Kepala Biro Pendidikan Latihan Logistik Militer, Cimahi (1954)
- Kepala Biro Pendidikan Latihan Logistik Militer, Cimahi (1955-1961)
- Kepala Departemen Pendidikan & Urusan Pegawai, Direktorat Logistik ABRI, Jakarta (1961-1965)

- Karier Organisasi

- Deputi Ketua Taman Mini Indonesia Indah (TMII) (1974)
- Bendahara Yayasan Dharmais (1975)
- Anggota Dewan Penyantun Yayasan Jantung Indonesia (1978)
- Anggota Dewan Penyantun Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung (1978)
- Ketua Yayasan Pengembagan Manajemen Indonesia (1981)
- Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi (1982)
- Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) (1995-2000)

Penghargaan

Selama masa hidupnya, Bustanil Arifin mendapat tanda kehormatan dari negara seperti Bintang Mahaputera Adipradana (17 Agustus 1982), Bintang Gerilya, Bintang

Kartika Eka Paksi Pratama, Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, Satyalancana Kesteiaan 24 tahun, Satyalancana Perang Kemerdekaan I, Satyalancana Perang Kemederkaan II, Satyalancana GOM I, Satyalancana GOM II, Satyalancana GOM III, Satyalancana GOM V, Satyalancana Penegek, Satyalancana Dwidya Sistha, dan Satyalancana Wira Dharma.

6. Prof. H. Haryono Suyono, MA, Ph.D (2005-2011, 2011-2013, 2013-2017)

Prof. H. Haryono Suyono adalah seorang tokoh yang pernah menjadi Kepala BKKBN pada tahun 1983, Menteri Negara Kependudukan merangkap Kepala BKKBN pada Kabinet Pembangunan V tahun 1993, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin) merangkap Kepala BKKBN pada Kabinet Pembangunan VII era Soeharto, dan masih dipercaya oleh Presiden BJ Habibi sebagai Menko Kesra dan Taskin pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Haryono yang merupakan konseptor posyandu ini mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah Indonesia atas jasa-jasanya memajukan bangsa dan negara, yaitu Bintang Mahaputera Utama (tahun 1982), Bintang Mahaputera Adipradana (tahun 1996), dan Bintang Republik Indonesia Utama (tahun 1998).

Selain aktif di pemerintahan, Haryono juga mendedikasikan diri pada kegiatan sosial dengan mendirikan Yayasan

Damandiri bersama Pak Harto, Liem Sioe Liong (Sudono Salim), dan Dwi Darmono pada tahun 1990-an. Aktivitas di pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang digelutinya mengantarkan Haryono menjadi Ketua Umum DNIKS dalam periode panjang tahun 2005-2011, 2011-2013, 2013-2017. Masa kepemimpinannya ditandai dengan penguatan aspek ilmiah dan berbasis bukti dalam program-program DNIKS.

Dengan latar belakang akademis yang kuat, Haryono mempromosikan pendekatan "*evidence-based social welfare*" dalam kerja DNIKS. Ia berupaya mengintegrasikan DNIKS dengan agenda pembangunan nasional dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Haryono berhasil membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan mendorong adaptasi program DNIKS sesuai kebutuhan lokal. Pencapaian penting pada masa kepemimpinannya adalah pendirian "Institut Kesejahteraan Sosial DNIKS" pada tahun 2010 dan penerbitan "Indeks Kesejahteraan Sosial Indonesia" yang menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan.

Sebagai Ketua Umum DNIKS, dalam menjalankan program kesejahteraan sosial, Haryono menerapkan pola koordinatif berbasis masyarakat (*community-based approach*) yang memanfaatkan pengalamannya di BKKBN untuk memposisikan DNIKS sebagai koordinator swasta kesejahteraan sosial yang berjalan paralel dengan jalur pemerintah. Metode pelaksanaannya meliputi konsolidasi kelembagaan melalui perbaikan infrastruktur dan kunjungan ke daerah, model pendanaan mandiri dari Yayasan Damandiri yang menolak ketergantungan pada bantuan pemerintah yang tidak efektif, strategi komunikasi

media yang intensif, serta pendekatan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal setiap daerah (seperti dukungan gubernur di Sumbar, swadaya gedung di Jatim, dan keterlibatan keluarga gubernur di Kalsel). Keunggulan pendekatan ini terletak pada efektivitas koordinasi multi-level, sustainabilitas finansial melalui hasil deposito (Yayasan Damandiri), dan legitimasi yang kuat dari jaringan personal strategis yang dimiliki oleh Ketua Umum DNIKS saat itu.

Jika pada periode kepengurusan tahun 2005 – 2009, DNIKS mulai mengenalkan pendekatan *workfare* sebagai pengganti *welfare* dan kemudian dikembangkan program pemberdayaan sosial yang lebih bersifat massif, menjangkau pedesaan, bersifat preventif dan promotif daripada kuratif dan rehabilitatif, maka, pada 2009 – 2014 era Haryono Suyono, DNIKS mengembangkan budaya baru pemberdayaan tersebut sebagai paradigma baru. Dengan paradigma baru ini, DNIKS terus berusaha dan bekerja keras

memantapkan diri sebagai organisasi non-pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dengan pengembangan komitmen, proses pemberdayaan berkelanjutan yang mandiri dan inisiasi kegiatan yang mudah dikerjakan dan diikuti oleh sebanyak banyaknya keluarga dengan baik dan ikhlas.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kebijakan dan komitmen pada pemberdayaan dengan pendekatan hak-hak asasi dan tanggung jawab gotong royong, pengembangan jaringan operasional melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), Program Kegiatan untuk mencapai target sasaran Millenium Development Goals (MDGs), dan pengenalan cara dan teknologi modern dengan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap partisipasi masyarakat yang mandiri.

Intinya, pada masa kepemimpinan Haryono Suyono, ada pergeseran paradigma dari pendekatan yang masih bersifat "*top-down*" (*workfare*) menuju pendekatan yang benar-benar "*bottom-up*" dan "*community-driven*" dengan menekankan pada kemandirian, berkelanjutan, dan partisipasi sukarela masyarakat yang didukung oleh teknologi modern namun tetap berbasis nilai-nilai gotong royong.

Proses Terpilihnya Haryono Suyono

Berdasarkan wawancara dengan Haryono Suyono sendiri, terpilihnya ia sebagai Ketua Umum DNIKS dimulai dari Musyawarah Nasional (Munas) di Bukit Tinggi. Haryono ditawarkan oleh Bustanil Arifin untuk menggantikan posisinya karena dianggap paling cocok lantaran menguasai bidang-bidang koordinasi, masih menjadi kepala BKKBN sebagai ahlinya koordinasi, dan masih memimpin Yayasan Damandiri. Pada saat Munas, Haryono sudah berada di Bukit Tinggi, tapi tidak dianjurkan oleh Bustanil untuk hadir di arena Munas supaya tidak mengganggu konstelasi, jika terpilih atau tidak terpilih tetap enjoy saja di Bukit Tinggi. Kemudian, ia dicalonkan di Munas dan secara aklamasi semua peserta setuju Haryono Suyono menggantikan Bustanil Arifin.

Haryono mengaku, dirinya sebagai Ketua Yayasan Damandiri waktu itu sudah sangat terkenal. Yayasan Damandiri sudah mendirikan pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Haryono sudah terbiasa berhubungan dengan media massa, maka pendirian pos-pos tersebut banyak mendapatkan pemberitaan sehingga berita cepat menyebar

luas. Kegiatan Damandiri di daerah-daerah sudah jauh melampaui kegiatan DNIKS. Damandiri sudah banyak berhubungan dengan organisasi-organisasi sosial sehingga waktu Hsryono dicalonkan di Bukit Tinggi, semua orang merasa senang sehingga ia tidak perlu lagi kampanye untuk menjadi Ketua Umum DNIKS.

Ketika balik ke Jakarta setelah terpilih, Haryono melihat kantor DNIKS sangat kumuh. Program pertama yang dilakukannya adalah memperbaiki kantor. Ia mengambil dana dari Yayasan Damandiri atas izin Pak Harto untuk memperbaiki kantor hingga seperti sekarang ini dengan banyak ruangan meeting yang dilengkapi dengan furniture kursi dan meja yang baru. Haryono menjelaskan bahwa isi kantor DNIKS itu hadiah dari Damandiri, bukan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah selesai direnovasi, kantor DNIKS terlihat mentereng dengan 3 lantai yang bahkan setengahnya seperti menyaingi Kemensos saat itu.

Hubungan dengan Kementerian Sosial dan Kemandirian Finansial

Kemensos waktu itu menyatakan setuju untuk membiayai operasional bulanan DNIKS. Namun, setelah beberapa bulan, Haryono mengecek ternyata hanya 5 juta per bulan dan yang sampai ke DNIKS tidak sampai 5 juta, hanya sekitar 2,5 juta karena banyak potongan-potongan. Kemudian, ia meminta bagian keuangan untuk mengembalikan saja bantuan Kemensos karena hanya menerima separuhnya saja tiap bulan, tidak utuh 5 juta. Oleh karena itu, hubungan dengan Kemensos saat itu tidak mulus. Lantaran Yayasan Damandiri banyak uangnya, maka ia mengeluarkan uang Damandiri untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan dan operasional DNIKSl, tidak ada bantuan melalui Kemensos.

Menurut Haryono, ternyata ada beberapa Dirjen di Kemensos itu yang simpatik dengan DNIKS, tapi ada juga sebagian yang menganggap DNIKS sebagai saingan karena kegiatan DNIKS itu marak oleh LK3S (BK3S dan LKKS) di daerah-daerah. Gerakan LK3S di daerah itu yang sangat

aktif sehingga DNIKS seakan-akan sudah melebihi Kemensos. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh Ketua Umum yang baru.

Jika sekarang ini DNIKS sangat dekat dengan Kemensos, harus dijaga dengan baik, lantaran Haryono merasa dirinya salah tafsir saat menjadi Ketua Umum DNIKS. Ternyata, kegiatan-kegiatan DNIKS yang terlalu menggebu-gebu tidak disukai oleh dinas-dinas sosial di daerah. Hal ini yang perlu dikembangkan yaitu bagaimana DNIKS itu tidak merupakan saingan dari kegiatan dinas sosial di daerah karena kegiatan dinas sosial di daerah itu seakan-akan dilaksanakan oleh dinas, sementara kegiatan DNIKS dilaksanakan langsung dengan masyarakat. Ini yang jadi kontroversi waktu itu. Haryono tidak mau kegiatan itu dilakukan oleh dinas sosial karena dinas merupakan koordinator pemerintah sedangkan DNIKS harus menjadi koordinator swasta untuk kesejahteraan sosial sehingga ada 2 jalur yang keduanya harus jalan secara simultan.

Jika kegiatan kesejahteraan sosial dikoordinatori oleh Kemensos berarti kegiatan dijalankan oleh dinas sosial. Dinas sosial melakukan kegiatan sosial hanya terbatas pada anggaran yang dimiliki oleh Kemensos yang akhir-akhir ini fokus untuk bantuan sosial, tidak lagi untuk kegiatan-kegiatan sosial yang diinisiasi oleh masyarakat. Program Kemensos yang berjalan saat ini merupakan inisiatif pemerintah, pola *top down*, bukan berdasarkan keinginan rakyat (*botttom up*), lantaran banyak kegiatan masyarakat yang faktanya dan secara nomenklatur tidak bisa dibantu oleh kementerian/dinas sosial.

Seharusnya, menurut Haryono, jika Ketua Umum DNIKS saat ini bisa meyakinkan Menteri Sosial, barangkali kegiatan DNIKS bisa lebih marak bersama masyarakat yang akhirnya menghasilkan kegiatan-kegiatan sosial yang disenangi oleh masyarakat. Seperti saat ia menjadi Ketua BKKBN, kegiatan BKKBN yang ditargetkan sampai tahun 2000 bisa diselesaikannya pada tahun 1990. Artinya, lebih cepat 10 tahun sehingga Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB. Pertama kali Presiden Soeharto ke Amerika lantaran untuk menerima penghargaan BKKBN atas prestasi Haryono sebagai kepala BKKBN saat itu. Atas alasan tersebut, Haryono menjadi kepada BKKBN selama tujuh periode tidak diganti-diganti oleh Pak Harto.

Berdasarkan keterangan Haryono yang sudah tiga periode memimpin DNIKS, jalur resmi kegiatan sosial oleh Kemensos yaitu melalui dinas sosial dan kemudian panti sosial, jadi bukan kegiatan langsung di masyarakat. Ini yang

menjadi ciri Kementerian Sosial. Namun, hal ini harus diyakinkan ke Menteri Sosial sekarang bahwa kegiatan sosial itu harus lebih banyak diselenggarakan oleh masyarakat umum. Begitu juga dengan BKKBN, waktu Haryono menjadi ketua, kegiatannya lebih banyak oleh masyarakat sehingga targetnya dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Target yang dikembangkan oleh masyarakat itu merupakan target umum, bukan target kantor. Kalau target kantor biasanya kegiatan dari jam 8 pagi sampai jam 2, setelah jam 2 pulang ke rumah masing-masing, dan tidak ada tindak lanjut. Hal ini yang Haryono tidak suka sehingga ia mengelola DNIKS seperti mengelola BKKBN di periode ke-1 dan 2 memimpin DNIKS.

Dalam perjalanan kepemimpinannya di DNIKS, Haryono berkonsolidasi dengan mengunjungi BK3S dan LKKS ke daerah-daerah. Menurut Haryono, yang paling maju saat itu yaitu BK3S Sumatera Barat yang dipimpin oleh istri gubernur, juga Yogyakarta dan Jawa Timur. BK3S Jawa Timur yang dipimpin oleh Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi MS (Pak Tjuk), dosen UNAIR, pada saat mendapatkan bantuan dari DNIKS untuk kegiatan dan operasional, dipakai untuk beli gedung sehingga BK3S Jawa Timur mempunyai gedung sendiri. Gedungnya dipakai untuk pernikahan dan untuk pertemuan-pertemuan umum sehingga operasional terjamin karena ada anggarannya dari sewa tersebut.

Kemudian, Haryono mulai konsolidasi dengan daerah-daerah lain. Bagi Haryono, koordinasi itu merupakan aktivitas yang biasa ia kerjakan karena BKKBN juga koordinasi. Menurut Haryono, DNIKS tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial, melainkan

koordinasi. Ia mencari program untuk daerah-daerah supaya bisa dilaksanakan. Ia mengaku bahwa program yang ia canangkan pada tahun-tahun pertama belum merata, begitu juga tahun kedua dan ketiga, tergantung aktivitas dari masing-masing daerah. Tahun keempat dan seterusnya, khususnya periode 3 kepemimpinannya, kegiatan DNIKS sudah menjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Daerah-Daerah Unggulan dalam Implementasi Program

Ada beberapa daerah unggulan di Indonesia yang sangat rajin menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial, seperti Provinsi Kalimantan Selatan yang gubernurnya saat itu, Pak Said, sangat mendukung putra-putrinya untuk aktif di DNIKS. Sampai sekarang kegiatan-kegiatan masih dilakukan oleh putra-putri Pak Said, kegiatan juga lancar sehingga ketika Haryono berkunjung ke Banjarmasin, sangat maju. Lalu, Pak Hasan, teman Haryono di Yogya juga sangat mendukung kegiatan kesejahteraan sosial di sana melalui BK3S Yogyakarta. Sri Sultan sebagai Gubernur Yogyakarta juga selalu memfasilitasi kegiatan DNIKS dan hingga sekarang masih ingat dengan Haryono.

Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Yogyakarta maju. Sumatera Barat paling maju karena istri gubernur yang jadi ketua umum BK3S, di daerah-daerah kabupaten/kota-nya juga aktif, banyak kegiatan. Haryono biasanya menstimulasi dengan kegiatan-kegiatan BKKBN yang memang kegiatan-kegiatannya berbasis

kemasyarakatan untuk di daerah-daerah yang BK3S dan LKKS-nya aktif.

Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, seperti di Jawa Timur bisa lancar kegiatannya karena mendapatkan hasil dari sewa gedung. Di Sumatera Barat kegiatan bisa lancar karena disokong oleh gubernur lantaran ketua umumnya istri gubernur. Setiap kali kegiatan diselenggarakan di rumah dinas gubernur atau di kantor gubernur sehingga kredibilitasnya tinggi. Di Kalimantan Selatan, bisa jalan kegiatannya karena pengurusnya banyak anak atau menantu gubernur, selain komitmen gubernurnya sangat tinggi terhadap kegiatan-kegiatan sosial.

Bagi Haryono, untuk menjalankan program kesejahteraan sosial dengan baik, mekanisme kolaborasi DNIKS dengan kepala daerah harus terjalin dengan baik seperti menjadikan gubernur/walikota/bupati sebagai pelindung atau penasehat LK3S di daerah. Dengan begitu, maka setiap ada kegiatan, kepala daerah memberikan arahan-arahan sehingga setiap bulan ada dana yang berasal dari Pemda. Jika DNIKS di pusat dananya berasal dari Kemensos, LK3S di daerah harus berasal dari Pemda masing-masing. Maka, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan porsi dan anggaran yang berbeda antara Kementerian Sosial bersama dinasnya dengan DNIKS bersama LK3S di daerah dengan sasaran-sasaran yang berbeda yang kemudian sasarannya ini menjadi luas dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Sumber Daya dan Dukungan Finansial

Terkait Yayasan Damandiri, saat itu kegiatan Damandiri diarahkan untuk membantu beberapa lembaga yang menjadi mitra, khususnya DNIKS. Sumber dana dari Yayasan Damandiri ini berasal dari deposito bank yang hasilnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Pendekatan Damandiri bersama DNIKS saat itu yaitu dengan universitas-universitas melalui program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Melalui KKN ini, Damandiri dan DNIKS datang melakukan sosialisasi-sosialisasi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya, universitas-universitas mengeluarkan dana sendiri untuk kegiatan KKN mahasiswa, Yayasan Damandiri dan DNIKS hanya menjadi mitra kolaboratif universitas.

Suksesnya agenda DNIKS bersama kampus-kampus seharusnya bisa bertahan hingga sekarang karena merupakan kolaborasi yang sangat baik, berkelanjutan, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun, di perjalanan, Haryono dituduh menggunakan dana Damandiri untuk membiayai kegiatan KKN kampus yang dianggap

tidak adahubungannya dengan program Damandiri sehingga dirinya diberhentikan sebagai Ketua Umum Damandiri dan digantikan oleh Subiakto Tjakrawerdaja. Ternyata pada periode 5 tahun berikutnya yang dipegang oleh Subiakto, hubungan dengan universitas terhenti sehingga kegiatan Damandiri hanya pada beberapa daerah saja, tidak lagi massif seperti saat bekerja sama dengan perguruan tinggi. Oleh karena itu, gaung Damandiri tidak terdengar lagi hingga saat ini.

Menurut pengakuan Haryono, periode ke-3 kepemimpinannya mulai banyak LK3S (BK3S/LKKS yang tidak dikunjungi mulai protes dan kasak kusuk supaya ia diganti. Mereka meminta Haryono diganti oleh Tantyo. Kemudian, Haryono memuluskan terpilihnya Tantyo sebagai Ketua Umum DNIKS mengganttikan dirinya. Namun, setelah kepemimpinan Haryono selesai di DNIKS, Damandiri sudah tidak mau membiayai kegiatan DNIKS karena ketuanya sudah bukan Haryono lagi.

Satu tantangan yang dihadapi Haryono pada masa kepemimpinnanya yaitu soal anggaran yang harus disetor dari pusat (DNIKS) ke daerah (BK3S/LKKS). Daerah-daerah tidak mampu mandiri kecuali Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Dari berbagai kegiatan DNIKS yang begitu aktif pada eranya, Haryono menyebut masih sukar untuk mengukur dampaknya pada degradasi kemiskinan jika hanya dilihat dari ukuran kegiatan DNIKS saja, tetapi jika dilihat secara nasional, dari program-program BKKBN, memang ada penurunan kemiskinan lebih dari 10% saat itu.

Pencapaian penting pada masa kepemimpinannya adalah pendirian "Institut Kesejahteraan Sosial DNIKS" pada tahun 2010 dan penerbitan "Indeks Kesejahteraan Sosial Indonesia" yang menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan.

7. H. Tantyo A.P. Sudharmono, MSc, MBA (2017-2021, 2021-2023)

H. Tantyo A.P. Sudharmono, seorang profesional muda dengan latar belakang bisnis dan manajemen, memimpin DNIKS pada periode 2017-2021 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2026 (meskipun tidak menyelesaikan periode kedua karena beliau meninggal dunia pada Rabu, 22 November 2023). Masa kepemimpinannya ditandai dengan modernisasi dan digitalisasi DNIKS, serta pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Problematika era digital yang dihadapi pada masa ini adalah bagaimana mengadaptasi DNIKS terhadap era digital dan perubahan sosial yang cepat, termasuk pandemi COVID-19. Tantyo berhasil memperkenalkan inovasi digital dalam program-program DNIKS dan membangun platform kolaborasi online. Pencapaian penting pada masa kepemimpinannya adalah peluncuran aplikasi "DNIKS Digital" yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan DNIKS, serta "Program Tanggap COVID" yang

memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi.

Berdasarkan keterangan Edwil (Sekretaris Jenderal) dan Hendratmoko (Ketua Bidang Organisasi) era Tantyo Sudharmono, DNIKS sejatinya adalah organisasi yang diisi oleh mantan-mantan pejabat negara. DNIKS dipandang sebagai organisasi sinterklas sehingga Orsosnas minta anggaran untuk kegiatan kepada DNIKS. Anggaran DNIKS diperoleh dari jaringan pengurus yang ada di dalamnya seperti Bustanil Arifin (1995-2005) yang merupakan orang kaya yang memiliki banyak perusahaan dan akses kepada pemimpin Orde Baru. Begitu juga dengan Haryono Suyono yang memimpin yayasan Orde Baru, Damandiri. Pada akhir kepengurusan Haryono Suyono, ia meninggalkan sisa saldo untuk kepengurusan DNIKS selanjutnya sebesar RP 3,5 Miliar. Isi kantor DNIKS berisi furnitur mahal dan bagus seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Selain membiayai operasional kantor dan gaji pegawai, Haryono Suyono juga membiayai kegiatan-kegiatan DNIKS yang sangat banyak.

Sementara itu, Tantyo Sudharmono bukan orang kaya raya meskipun ayahnya seorang jenderal mantan wakil presiden Indonesia. Menurut Hendratmoko (Hendi) yang merupakan orang terdekat Tantyo, harta milik Tantyo tidak banyak yang sifatnya *liquid* seperti para ketua umum pendahulunya. Oleh karena itu, arah kepengurusan Tantyo di DNIKS ingin membuat usaha untuk membiayai kegiatan. Tantyo memiliki kedekatan personal dengan Menteri Sosial saat itu (Agus Gumiwang Kartasasmita) sehingga tetap dibantu dari

Kemensos, bahkan dibantu mobil Kijang Innova Reborn untuk operasional DNIKS. Namun, di akhir masa kepengurusannya mulai sulit bantuan dari Kemensos sehingga banyak menggunakan uang pribadi untuk operasional.

Hendi menjelaskan bahwa tidak banyak kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana pribadi Tantyo dan para pengurus. Namun, tetap saja, BK3S dan LKKS dari daerah yang berkunjung ke Jakarta difasilitasi menggunakan dana pribadi Tantyo sebagai Ketua Umum, berkelliling pakai dana pribadi, dan sebagainya. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti pelatihan disabilitas, seminar-seminar, dan kerja sama dengan OK OCE saat Wakil Gubernur Sandiaga Uno tetap jalan. Sayangnya, belum ada agenda besar yang terlaksana hingga Tantyo meninggal dunia pada November 2023.

Transisi dari Era Haryono Suyono

Berdasarkan wawancara dengan Haryono Suyono dan beberapa mantan pengurus era Tantyo, periode Tantyo sebagai Ketua Umum DNIKS menghadapi tantangan fundamental yang berbeda dari pendahulunya. Setelah Yayasan Damandiri sudah tidak dipimpin oleh Haryono dan seiring dengan berakhirnya periode kepemimpinan Haryono di DNIKS, pada masa Tantyo, Yayasan Damandiri sudah tidak mau membantu DNIKS.

Menurut Haryono, Tantyo adalah orang yang tidak mau tekor membiayai DNIKS karena dia juga tidak punya lembaga untuk mensponsori DNIKS. Tantyo dipandang hanya mau menggunakan sisa dana yang ia sediakan melalui Yayasan Damandiri. Waktu itu, Haryono meninggalkan dana yang cukup lumayan (Rp 3,5 miliar), yang mau dihabiskan dulu baru kemudian Tantyo mengubah cara untuk membiayai kegiatan DNIKS. Pendekatannya, bukan

pendekatan sosial lagi, tapi pendekatan ekonomi. Jadi, kegiatan-kegiatannya dijual ke daerah-daerah, misalnya dengan mencoba menjual sepeda atau barang/produk lainnya dalam beberapa kali kegiatan waktu itu, tapi ternyata daerah-daerah secara ekonomi tidak mampu membeli kegiatan-kegiatan yang ditawarkan itu sehingga Tantyo merasa frustasi. Kegiatannya tidak bisa jalan karena rupanya respon dari daerah tidak setinggi yang diharapkan.

Di era Haryono, kegiatan sangat banyak karena dibiayai oleh Yayasan Damandiri yang disangka sebagai respon dari masyarakat/daerah yang mau membiayai kegiatan sosial DNIKS. Ini yang menjadi ciri mengapa pada saat Haryono menjadi Ketua Umum DNIKS kegiatan-kegiatan lancar karena sumber dananya ada. Setiap kali ada pertemuan ada dana yang disediakan Yayasan Damandiri sehingga selalu ada uang transport untuk peserta rapat.

"Ciri ini yang membuat saya dianggap berhasil, sementara Pak Tantyo dianggap tidak berhasil. Pak Tantyo dianggap pelit, padahal memang tidak ada dananya. Sampai saat ini pun tidak ada dananya," tutur Haryono.

Dinamika Internal dan Konflik Kepengurusan

Periode kepemimpinan Tantyo mengalami beberapa gejolak internal. Berdasarkan wawancara dengan Dewi Motik yang awalnya menjadi Wakil Ketua Umum periode 2017-2021, terjadi ketidakcocokkan visi dalam mengorganisir DNIKS. Dewi Motik yang sangat aktif berorganisasi dan memiliki jejaring yang sangat luas merasa tidak cocok dengan Tantyo yang dianggap kurang memiliki kemampuan mengorganisir DNIKS dan kurang networking. Saat Dewi Motik menjadi Ketua Bidang pada era Haryono, ia banyak membuat kegiatan yang semuanya lancar dan sukses. Sebaliknya, pada masa Tantyo, Kettua Umumnya merasa tidak senang melihatnya maju. Ketika ide dan gagasannya tidak dihargai dan gerakan-gerakan sosial yang dilakukannya tidak

disenangi oleh Ketua Umum, akhirnya Dewi Motik meninggalkan DNIKS yang pada akhirnya organisasi tidak jalan di bawah kepemimpinan Tantyo. Tantyo dianggap tidak bisa berbuat apa-apa keculi trading forex. Dewi Motik sangat tidak setuju dengan trading forex yang dijalankan oleh istri Tantyo yang kemudian dibawa masuk ke DNIKS.

Seminar Trading Saham

Dewi Motik menyebut dirinya sangat aktif berorganisasi, melaksanakan banyak kegiatan di DNIKS, bahkan mendirikan 10 organisasi perempuan yang hingga saat ini masih aktif seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sekaligus menjadi Ketua Umum, Ikatan Ahli Boga Indonesia, Wanita Sehat Tanpa Tobacco, Koperasi Wanita Indonesia, Koperasi Indonesia, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan sebagainya sehingga Pak Haryono Suyono meminta dirinya menjadi pengurus DNIKS sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. Pada periode berikutnya, Dewi Motik dipilih satu paket dengan Ketua Umum (H. Tantyo A.P. Sudharmono) sebagai Wakil Ketua Umum DNIKS Periode 2017-2021. Namun, kemudian Dewi Motik diberhentikan oleh Tantyo. Dewi Motik menyebut bahwa pada masa kepemimpinan Tantyo, DNIKS dibawa-bawa untuk bisnis

trading forex yang dianggapnya tidak bagus untuk organisasi.

Menurut informasi dari Hendratmoko (Hendi), ketika baru satu bulan menjadi pengurus BPA, Hendi diminta oleh Tantyo untuk menjadi Ketua Bidang Organisasi DNIKS. Aktif sebagai Ketua Bidang, ia mengenal Pak Edwil yang merupakan salah satu Ketua Bidang, sebelum menjadi Sekretaris Jenderal DNIKS menggantikan Bu Sahawiah (pensiunan eselon 1 Kemensos) yang menjadi Sekjen di awal kepemimpinan Tantyo. Terkait dinamika organisasi yang terjadi saat itu, Hendi menyebut bahwa Tantyo sebagai Ketua Umum mengaku tidak nyaman dengan adanya orang pergerakan (aktivis politik) di kepengurusan DNIKS. Sahawiah kemudian mundur/diganti dari kepengurusan sehingga hubungan DNIKS dengan Kemensos mulai renggang. Tidak lama kemudian, hubungan Ketua Umum dengan Dewi Motik (Wakil Ketua Umum) mulai tidak bagus. Ada gejolak di kantor DNIKS saat itu. Hendi mengaku tidak nyaman berada di kantor DNIKS, padahal isinya tokoh-tokoh semua.

Tidak lama menjadi Ketua Bidang Organisasi, Hendi kemudian menjadi Ketua Bidang Olahraga, Seni, dan Budaya. Lantaran hubungan sudah renggang dengan Kemensos, ketika membuat Kejuaraan Karate Piala DNIKS pada tahun 2018, Kemensos tidak mau bantu, padahal sudah membentuk kepanitiaan dan sebagainya.

Pada Munas DNIKS yang ke-9 tahun 2021, Tantyo Sudharmono kembali terpilih sebagai Ketua Umum untuk periode 2021-2026. Di Munas ini, tidak ada paket pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan AD/ART DNIKS pun diubah di mana Ketua Umum sendiri yang menentukan struktur kepengurusan. Pada periode ke-2 Tantyo ini, Hendi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum. Saat itu, Edwil sebagai Sekretaris Jenderal. Menurut pengakuan Hendi, posisinya sebagai Wakil Ketua Umum tidak terlalu kuat karena bukan dipilih melalui Munas. Namun, bukan persoalan Waketum yang menjadi polemik, tetapi ternyata posisi Sekjen. Konflik di tubuh DNIKS kembali bergejolak, Edwil mengundurkan diri sebagai Sekjen DNIKS dan surat pengunduran dirinya dikirim ke Kementerian Sosial. Padahal, menurut Hendi,

tidak ada urusannya Sekjen DNIKS mundur dengan Kementerian Sosial. Kemudian, posisi Sekjen diisi oleh Sofredi. Sebenarnya, Tantyo menginginkan Hendi menjadi Sekjen DNIKS dan merangkap sebagai Waketum. Namun, Hendi menolak, dan mendorong Sofredi sebagai Sekjen.

Tantangan Finansial dan Operasional

Edwil S. Djamaoeddin yang menjadi Sekretaris Jenderal DNIKS Periode 2018 – 2022 menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi DNIKS terkait dengan pendanaan untuk membiayai berbagai kegiatan yang ingin diselenggarakan. DNIKS sebenarnya mendapatkan bantuan rutin dari Kemensos RI sebesar Rp 25 juta rupiah setiap bulan. Namun, kebutuhan operasional yang besar, apalagi untuk membiayai kegiatan, bantuan dari Kemensos tersebut tidak cukup.

Maka, pengurus DNIKS mulai patungan untuk menjalankan roda organisasi pada tahun 2018.

Pada masa kepengurusan Tantyo (2017-2021, 2021-2026), dana untuk kegiatan organisasi berasal Ketua Umum itu sendiri dan disumbang oleh beberapa pengurus seperti Dewi Motik dan Prof Laila. Sementara, untuk gaji pegawai yang berjumlah 4 orang dan operasional kantor berasal dari bantuan Kemensos RI.

Menurut Dewi Motik, mengurus DNIKS harus dibiasakan bukan orang yang mengandalkan bisa dapat anggaran dari pemerintah. Mengandalkan uang bantuan dari pemerintah untuk menjalankan program DNIKS merupakan sebuah kesalahan dan tidak boleh dilakukan. Seharusnya dengan sistem kerja sama karena DNIKS tidak bisa berjalan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dewi Motik saat menjalankan program dengan disabilitas dan kegiatan pendidikan tidak minta anggaran dari pemerintah, uangnya juga bukan dari DNIKS, melainkan dari orang-orang yang tertarik dengan pekerjaan sosial yang ia lakukan. Ketika mau membuat kegiatan bagus seperti itu dengan anggaran dari luar yang ia cari sendiri, Dewi Motik mengaku dimarahi dan dimusuhi.

Menurut Edwil S. Djamaoeddin Sekjen DNIKS era Tantyo yang pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Kepri 2 Periode (tahun 1997-1999 dan 2004-2009), DNIKS merupakan organisasi sukarelawan yang tugasnya menyantuni fakir miskin dan disabilitas sehingga para pengurusnya harus memiliki jiwa sosial. Untuk menjalankan program-program yang bersifat *charity*, DNIKS tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pada periode kepengurusannya bersama Tantyo, pengurus pernah mengajukan inisiasi untuk menyalurkan bantuan dari CSR perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, tetapi tidak diterima. Menurut

pengakuan mantan Stafsus Menkokesra 2010-2015 ini, perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah punya yayasan seandiri untuk menyalurkan program tanggung jawab sosialnya sehingga Yayasan Bantu Dong milik DNIKS tidak jalan. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental, pengurus DNIKS yang mayoritas pejabat atau mantan pejabat biasanya mengumpulkan dana dari kantong pribadi.

Keadaan ini bertolak belakang dengan kondisi DNIKS yang dianggap sebagai sinterklas sejak era Bustanul Arifin sebagai Ketua Umum (1995-2005). Pada zaman Orde Baru, DNIKS menjadi organisasi yang banyak sekali memberikan

bantuan-bantuan sosial dengan dukungan dana dari Pak Harto. Yayasan-yayasan Pak Harto seperti Yayasan Harapan Kita, Yayasan Darmais, Damandiri, dan Supersemar seringkali mendukung kegiatan DNIKS karena memang yayasan-yayasan tersebut didirikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan karena sakit atau untuk biaya pendidikan. Bahkan, Ketua Umum DNIKS pasca reformasi periode 2005-2017, Prof. H. Haryono Suyono masih mendapatkan dukungan dana dari yayasan orde baru. Kebetulan saat itu, Haryono merupakan ketua yayasan Damandiri milik Keluarga Cendana. Di bawah kepemimpinan Haryono para pengurus DNIKS digaji. Ketua, Sekjen, Wasekjen digaji, selain gaji rutin untuk pegawai/pekerja tetap di kantor DNIKS.

Kunjungan LKKS Kota Pariaman, Sumatera Barat

Kemudian, keadaan berubah ketika yayasan Damandiri dan yayasan-yayasan milik Pak Harto mulai diperiksa pada tahun 2017, bantuan DNIKS pun terhenti sejak saat itu. Bantuan-bantuan untuk kegiatan DNIKS selanjutnya hanya mengandalkan dari Kementerian Sosial. Realitanya, DNIKS mengurus banyak Orsosnas sehingga membutuhkan dukungan dana yang besar dikala DNIKS dianggap rumah besar berbagai organisasi sosial. Ketika kondisi keuangan DNIKS kurang baik dan hanya mengandalkan Kemensos, di sisi lainnya mulai banyak bermunculan Orsosnas yang didirikan oleh mantan pejabat Kemensos. Maka, lama-kelamaan DNIKS menjadi hampir sama dengan Orsosnas-

Orsosnas yang ada, sama-sama mengandalkan dukungan dari Kemensos. Pengurus DNIKS pun makin sedikit sehingga sumber daya yang menggerakkan DNIKS semakin terbatas. Begitu juga dengan BK3S dan LKKS di daerah yang sebagian masih mengandalkan dukungan dari DNIKS makin terhimpit. Hal ini terjadi lantaran tidak semua BK3S dan LKKS dibantu oleh kepala daerahnya masing-masing. Kecuali BK3S Provinsi DKI Jakarta, misalnya, yang memang didukung oleh gubernur sampai kantornya pun dihibahkan dari Pemprov. Mungkin karena Prof Budiharjo sebagai Ketua BK3S DKI Jakarta merupakan mantan kepala dinas sosial.

Program dan Kegiatan

Pada saat kepengurusan Edwil sebagai Sekjen bersama Tantyo, DNIKS sering mengunjungi dan melakukan konsolidasi dengan BK3S dan LKKS di daerah dan

mengundangnya untuk mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh DNIKS. Kegiatan rutin tahunan yang bersifat membantu tetap dijalankan oleh DNIKS seperti membantu atau membagikan sapi kurban (saat Idul Adha) kepada Orsosnas anggota DNIKS dan memberikan bantuan paket lebaran pada momentum Idul Fitri.

Foto Bersama
KEJUARAAN NASIONAL CATUR TUNA RUNGU INDONESIA 2022

Ada 3 program unggulan DNIKS saat itu, yaitu pertama program digitalitasi dalam bentuk media online milik DNIKS yang diberi nama Koran DNIKS. Akan tetapi, koran online ini tidak sempat jalan karena ternyata tidak boleh mendirikan kantor berita di wilayah ring satu istana sehingga izin pendirian Koran DNIKS tidak bisa didapatkan. Kedua, DNIKS menyelenggarakan bazaar rakyat untuk bisa membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok dan sebagainya dengan harga murah. Ketiga, DNIKS membentuk yayasan Bantu Dong yang saat pendiriannya

disahkan oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan dilaunching oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian, DNIKS juga sering menyelenggarakan agenda nasional bersama Kementerian Sosial seperti acara Hari Kesetiakawanan Nasional yang selalu melibatkan DNIKS sebagai panitia dan juri.

Masa Akhir dan Transisi Kepemimpinan

Hendi menjelaskan bahwa tidak banyak kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana pribadi Tantyo dan para pengurus. Namun, tetap saja, BK3S dan LKKS dari daerah yang berkunjung ke Jakarta difasilitasi menggunakan dana pribadi Tantyo sebagai Ketua Umum, berkeliling pakai dana pribadi, dan sebagainya. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti pelatihan disabilitas, seminar-seminar, dan kerja sama dengan OK OCE saat Wakil Gubernur Sandiaga Uno tetap jalan. Sayangnya, belum ada agenda besar yang terlaksana hingga Tantyo meninggal dunia pada 22 November 2023. Mari kita berdoa untuk almarhum Tantyo Sudharmono Ketua Umum DNIKS 2017-2023 semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Alfatihah.

Sebelum Tantyo meninggal, ada surat dari Kementerian Sosial yang meminta DNIKS meninggalkan kantor pada akhir tahun 2023. Ketika Ketua Umum meninggal, Hendi sebagai Waketum mengambil alih kepemimpinan DNIKS. Ia jeda satu minggu sebagai waktu berkabung untuk DNIKS. DNIKS sampai harus berhutang karena bantuan dari Kemensos sudah tidak pernah turun lagi semenjak wabah covid pada awal 2023.

Pencapaian penting pada masa kepemimpinannya adalah peluncuran inisiatif "DNIKS Digital" termasuk aplikasi mobile dan platform kolaborasi online (2020), dan pengembangan "Program Tanggap COVID" yang memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi.

8. Dr. Hendratmoko, M.Si (Pelaksana Tugas Ketua Umum 2023 - 2024)

Pada periode ke-2 Tantyo A.P. Sudharmono sebagai Ketua Umum DNIKS (2021 - 2026), Hendratmoko atau yang akrab disapa Hendi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum). Saat itu, Hendi merasa posisinya sebagai Wakil Ketua Umum tidak terlalu kuat karena bukan dipilih melalui Munas.

Pada saat Tantyo sakit beberapa waktu sebelum meninggal tanggal 22 November 2023, memang tidak ada kegiatan DNIKS dan Tantyo tidak ke kantor. Ketika Ketua Umum meninggal, Hendi sebagai Waketum mengambil alih kepemimpinan DNIKS sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum. Ia jeda satu minggu sebagai waktu berkabung untuk DNIKS. Kemudian, Hendi bertemu dengan ketua BPA Siswadi dan Ketua Badan Pertimbangan Prof. Haryono Suyono untuk meminta nasehat terkait keberlanjutan kepemimpinan dan kegiatan DNIKS. Hendi, bersama para pengurus aktif saat itu seperti Sekjen Sofrediansyah, Siswadi, Joeslin, Professor Laila Refiana Said, Fajar Wiryono, Tetri, Gufroni Sakaril, Endang (staf DNIKS), dan sebagainya sepakat membuat kegiatan sebanyak-banyak

supaya tetap eksis di tengah desakan Kemensos untuk meninggalkan gedung DNIKS.

Akhirnya, para pengurus tetap menjalankan kegiatan meski tanpa anggaran yang tersisa, hanya ada hutang yang belum terbayar kepada SOIna (Special Olympics Indonesia), organisasi sosial anggota DNIKS, sebesar sekitar Rp 30 juta. Uang yang dipinjam ke SOIna dipakai untuk bayar listrik, gaji pegawai, dan operasional kantor lainnya. DNIKS sampai harus berhutang karena bantuan dari Kemensos sudah tidak pernah turun lagi semenjak wabah covid pada awal 2023. Pengurus saat itu patungan untuk bayar gaji pegawai, sementara hutang dari SOIna untuk bayar listrik dan air.

Pada Desember 2023, Hendi sebagai pelaksana ketua umum menyelenggarakan Mukernas hybrid (online dan onsite) bersama para pengurus aktif. Di Mukernas itu, disepakati untuk membuat kegiatan berskala nasional pada Hari Disabilitas dan Hari Kesetiakawanan Nasional. Kemudian, dengan segala keterbatasan yang ada dan kondisi pasca covid-19, eksistensi DNIKS tetap terjaga dengan penyelenggaraan webinar (seminar online) 2 kali dalam setiap bulan. Peserta webinar melibatkan Orsosnas, Dinas Sosial, BK3S, dan LKKS seluruh Indonesia yang mencapai ratusan orang yang hadir secara online. Motor penggerak webinar masa Hendi sebagai plt ketua umum adalah Tetri dan Fajar (putra mantan Ketua Umum DNIKS Haryono Suyono).

Lantaran ada kekosongan posisi ketua umum DNIKS, Hendi mengaku ada pengurus yang meneleponnya untuk mendorong dirinya menjadi ketua umum supaya memiliki power. Akan tetapi, permintaan itu ia tolak karena Hendi menginginkan ketua umum tetap harus melalui Munas atau Munaslub. Akhirnya, panitia Munaslub dibentuk dengan Sentot sebagai Ketua OC dan Gufroni sebagai SC. Seharusnya Joeslin yang jadi ketua panitia pada awalnya, tetapi malah Joeslin mau mengajukan diri menjadi ketua umum sehingga kepanitiaan tidak jalan. Untuk membiayai Munaslub ini, para pengurus patungan, dan diselenggarakan secara hybrid di kediaman Haryono Suyono sebagai Ketua Badan Pertimbangan.

Penyelenggaraan Munaslub untuk memilih Ketua Umum sepeninggalan Tantyo Sudharmono ditetapkan pada Sabtu, 1 Desember 2024. Calon ketua umum yang muncul namanya yakni Siswadi, Sofredi, dan Hendi sendiri. Hendi secara

pribadi mengaku tidak bersedia menjadi ketua umum. Hendi dan Sofredi malah sepakat Siswadi yang akan menjadi ketua umum. Namun, Siswadi menegaskan bahwa dirinya hanya akan menjadi ketua umum jika tidak ada calon lainnya.

Selanjutnya, takdir berkata lain, sehari sebelum Munaslub, Menteri Sosial mengundang para pengurus DNIKS ke kantor Kemensos yang diterima oleh dua stafsus menteri, yaitu Malik dan Taufik. Stafsus menekankan kepada pengurus bahwa belakangan ini sudah tidak ada kegiatan DNIKS bersama Kemensos dan menanyakan perihal Munaslub yang akan diselenggarakan esok hari. Selang waktu beberapa jam kemudian, setelah para para pengurus DNIKS pulang dari Kemensos, Hendi mendapatkan telepon dari pegawai Kemensos dan menyampaikan Stafsus mau bicara. Melalui telepon itulah nama Gus Choi (Effendy Choirie) muncul.

Kemunculan nama Gus Choi tidak disangka-sangka oleh Hendi dan para pengurus beserta panitia Munaslub. Hendi mengaku searching nama Effendy Choirie dan menemukan keterkaitannya dengan partai atau sebagai pengurus partai. Padahal, menurutnya, saat itu DNIKS sedang alergi dengan orang partai. Akan tetapi, calon ketua umum lainnya, Siswadi mengatakan, “Kalau Gus Choi saya tidak keberatan, beliau bagus.”

Saat itu, menurut Hendi, Siswadi sudah siap menjadi ketua umum dengan komitmen menyediakan kantor baru karena mereka harus meninggalkan kantor DNIKS milik Kemensos pada tanggal 15 Januari 2025, membiayai kegiatan DNIKS, bayar hutang ke SOIna, dan sebagainya. Sebenarnya, banyak

pengurus yang tidak setuju Gus Choi yang menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Namun, Siswadi tegaskan tetap Gus Choi yang harus jadi ketua umum karena *endorse* Kemensos. Akhirnya, dukungan dari Orsosnas dan BK3S diarahkan kepada Gus Choi. Gus Choi diundang resmi oleh panitia Munaslub dan hadir bersama Stafsus Mensos Malik Haramain ke rumah Haryono Suyono. Effendy Choirie kemudian terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum DNIKS periode 2024 – 2029.

Bagi Hendi, perhelatan Munaslub tahun 2024 ini merupakan dinamika organisasi yang sangat kencang. “Hanya tempo satu hari, sangat luar biasa gejolaknya,” ujar Hendi. Pada kepengurusan DNIKS periode 2024-2029, Hendi tetap dipercaya oleh Gus Choi sebagai Wakil Ketua Umum DNIKS bersama tujuh orang Waketum lainnya (8 Wakil Ketua Umum mengikuti visi Astacita Presiden Prabowo). Hendi kemudian menyadari bahwa ternyata Gus Choi sudah tidak aktif sebagai pengurus partai sebelum menerima posisi sebagai Ketua Umum DNIKS. Sebagai pengurus inti DNIKS yang sudah cukup lama berkhidmat dan mengalami berbagai dinamika organisasi, Hendi berpesan supaya pengurus DNIKS selalu menjaga kekompakan, perkuat kegiatan sosial, dan lebih menjaga DNIKS dari urusan politik (kegiatan politik praktis).

9. Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H. (2024-2029)

Dr. H.A. Effendy Choirie (Gus Choi), seorang akademisi, aktivis sosial, dan mantan politisi, mulai memimpin DNIKS pada tahun 2024 untuk periode lima tahun. Meskipun masa kepemimpinannya baru berjalan beberapa bulan, ia telah menunjukkan visi transformatif untuk membawa DNIKS ke level berikutnya. Fokus utama kepemimpinannya adalah membangun kesejahteraan sosial yang holistik melalui Program Asta Bhakti DNIKS 2024-2029, yang mencakup delapan program prioritas berbasis gotong royong dan kemandirian. Visi Effendy Choirie menekankan pendekatan kesejahteraan yang tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan memberdayakan dengan mengintegrasikan aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kerakyatan (Ipoleksosbudhankamrata) sebagai fondasi kokoh bagi keadilan sosial yang berkelanjutan.

Agenda strategis yang dihadapi pada masa kepemimpinan Gus Choi adalah memperkuat peran strategis DNIKS dalam ekosistem kebijakan kesejahteraan sosial nasional dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Gus Choi telah memulai inisiatif untuk mengembangkan model-model pemberdayaan inovatif yang berpusat pada kearifan lokal

dan partisipasi masyarakat. Pencapaian awal pada masa kepemimpinannya adalah penyelenggaraan Konferensi DNIKS pada 13 Maret 2025 dan 21 Maret 2025 yang menghasilkan "Deklarasi Jakarta tentang Kesejahteraan Sosial Indonesia" dan perumusan visi "Zero Kemiskinan 2035". Melalui pendekatan Ipoleksosbudhankamrata, mantan Anggota DPR RI tiga periode ini mendorong perwujudan kesejahteraan sosial yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga menjamin ketahanan sosial, kedaulatan ekonomi, dan perlindungan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Visi dan Program Awal

Meskipun masa kepemimpinannya baru berjalan beberapa bulan, Effendy Choirie telah menunjukkan visi transformatif untuk membawa DNIKS ke level berikutnya. Fokus utama kepemimpinannya adalah membangun kesejahteraan sosial yang holistik melalui Program Asta Bhakti DNIKS 2024-2029, yang mencakup delapan program prioritas berbasis

gotong royong dan kemandirian. Visi Gus Choi menekankan pendekatan kesejahteraan yang tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan memberdayakan dengan mengintegrasikan aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kerakyatan (Ipoleksosbudhankamrata) sebagai fondasi kokoh bagi keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pencapaian awal pada masa kepemimpinannya adalah penyelenggaraan Konferensi DNIKS pada 13 Maret 2025 dan 21 Maret 2025 yang menghasilkan "Deklarasi Jakarta tentang Kesejahteraan Sosial Indonesia" dan perumusan visi "Zero Kemiskinan 2035".

Rencana Strategis (RENSTRA) DNIKS 2025-2029

Pada 10 Mei 2025, DNIKS menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di kantor DNIKS dalam rangka menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) DNIKS 2025-2029 berupa Asta Bhakti yang tertuang dalam 8 rencana kerja. RENSTRA ini disusun untuk memperkuat peran DNIKS sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Melalui 8 pilar ASTA BHAKTI, DNIKS berkomitmen untuk meningkatkan kualitas organisasi, kaderisasi, serta efektivitas program sosial, dengan fokus pada keberlanjutan dan pengaruh positif bagi masyarakat luas.

Rekomendasi Mukernas I DNIKS:

1. Mendorong Pemerintah untuk mengubah paradigma penyelenggaraan kesejahteraan sosial residual karitas menjadi paradigma penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui transformasi struktural yang merupakan hak setiap warga negara untuk hidup layak sesuai dengan martabat manusia Indonesia.
2. Mendorong pemerintah bersama DPR RI untuk mengintegrasikan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sistem jaminan sosial nasional, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, dan badan penyelenggara jaminan sosial.
3. Mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melakukan pemuktahiran data setiap tahun.

4. Mendorong para pelaku usaha BUMN dan swasta agar berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan pemberantasan kemiskinan.
5. Mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan tokoh-tokoh yang berjasa di bidang kesejahteraan sosial menjadi pahlawan nasional.
6. Mendukung kebijakan Presiden RI agar segera mewujudkan sekolah untuk rakyat miskin.
7. Mewujudkan tata kelola organisasi dan penyeragaman nama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di tingkat pusat hingga daerah, termasuk di luar negeri.
8. Rekomendasi menuju zero kemiskinan 2035 dan perlu penguatan kelembagaan DNIKS menjadi Dewan Kesejahteraan Sosial Nasional (DKSN).

Selain Mukernas, pada awal periode DNIKS tahun 2025 ini, Gus Choi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali Konferensi Nasional DNIKS dengan tema besar "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA Menuju Zero Kemiskinan 2035".

Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial I diselenggarakan pada 13 Maret 2025 dengan sub-tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Zakat" yang diisi oleh Ketua BAZNAS Pusat Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA.

Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial II dilaksanakan pada 21 Maret 2025 dengan sub-tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Struktur dan Kebijakan Negara" yang diisi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Prof. Agus Zainal Arifin.

Kemudian, **Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial III** terselenggara dengan sukses pada Selasa, 17 Juni 2025 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Gus Choi. Pada Konferensi Nasional yang ke-3 ini, hadir Franciscus Welirang (Chairman Indofood) dan Dr. Syahganda Nainggolan, M.Si (Direktur Great Institute) yang memaparkan sub tema "Kesejahteraan Sosial: Tujuan Nasional, Kenyataan, Tantangan, dan Harapan". Kebetulan, Franky Welirang

merupakan Ketua Dewan Pengarah DNIKS dan Syahganda Nainggolan salah satu dewan pakar DNIKS.

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB VI

PENGURUS DNIKS
DARI PERIODE KE PERIODE

DNIKS telah mengalami sembilan periode kepengurusan sejak pendiriannya pada tahun 1967. Setiap periode kepengurusan memiliki karakteristik, fokus, dan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun tetap berpegang pada visi dan misi dasar DNIKS.

Periode Deklarator (1967-1970)

DNIKS adalah kelanjutan dari "KOMITE NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL" yang didirikan berdasarkan "Piagam Pendirian", 17 Juli 1967.

Piagam Pendirian ini ditanda tangani oleh:
1. Mr. Alwi Sutan Osman.
2. Dr. Salekan
3. Mr. Ijas Suhanda
4. Djadjat Dradjat
5. A.M. Pasila S.Th.
6. Nasarudin Latif
7. Mr. Sumantri Praptokusumo.

Untuk memperkuat Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (KNKS), kelompok pendiri ini kemudian menghubungi Ibu Johana A.H. Nasution agar bersedia menjadi ketua.

KNKS kemudian berkembang menjadi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), dan menjadi anggota ICSW (*International Council of Social Welfare*) pada

tahun 1967, terutama atas desakan-desakan dari S.D. Gokhale, Asisten Sekretaris untuk Asia & Western Pacific, serta tokoh-tokoh Nederland, yaitu Ny. Klompe (Menteri CRM) dan Jan Beekman (*Sekretaris Nederlandse Raad voor Maatschappelijk Welzijn*).

Sebagai salah satu persiapan untuk terselenggaranya Musyawarah Nasional (Munas), DNIKS telah menghubungi berbagai organisasi besar dan lembaga pendidikan saat itu, sekaligus membentuk "Pengurus Sementara" yang bekerja sampai terselenggaranya Munas yang akan menyusun pengurus definitif baru.

Susunan Pengurus Sementara DNIKS tersebut adalah:

Ketua Umum : Ny. Johana Abdul Haris Nasution
Ketua I : Prof. Sumantri Praptokusumo
Ketua II : Dr. Salekan
Ketua III : Ny. Memet Tanumijaya
Sekjen : Ijas Suhanda, SH
Sekretaris : Djadjat Dradjat
Bendahara : dra. Vera I. Wullur
Anggota : Ir. J. Sudiman (mewakili MAWI), Nazarudin Latif, L. Rudolph (FIS-UI), Ny. Tambunan Hutagalung (DGI), A.M. Pasila S.Th. (Dep. Sosial), Bapak Mantra (Parisada Hindu Dharma), Drs. Waskito (Dep. P&K), Ny. Oyong RS (PAB), Ny. Rita Thung, SH (Yayasan Santikara), Nn. Enny Supit (ASK Widuri).

Periode Johana Sunarti A.H. Nasution (1970-1975, 1975-1980, 1980-1985)

Berdasarkan Instruksi Menteri Sosial, Bapak Dr. A.M. Tambunan, S.H., DNIKS menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pertama bertempat di ruang Rekreasi Departemen Sosial RI, pada tanggal 27 - 28 April 1970. Pada Munas tahun 1970, secara khusus tercapai pemilihan pengurus dan ditunjuk 3 formatur yang kemudian menyusun kepengurusan DNIKS.

Formatur yang ditunjuk adalah:

1. Ny. Johana A.H. Nasution
2. Prof. Sumantri Praptokusumo
3. Mr. Ijas Suhanda.

Oleh para formatur kemudian disusun pengurus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ny. Johana A.H Nasution	Ketua Umum
2.	Ijas Suhanda. SH	Ketua I
3.	C.L. Rudolph	Ketua II
4.	Prof. Sumantri Praptokusumo	Sekjen
5.	Mr. Hamid Algadri	Bendahara
6.	Ny. Memet Tanumijaya	Anggota
7.	Dra. Vera I Wullur	Anggota
8.	Ny. Tambunan Hutagalung	Anggota
9.	Drs. Robby Tulus	Anggota
10.	Drs. Agung Junowo	Anggota

11.	Dr. Gambiro Prawirosudirdjo	Anggota
12.	Drs. Djoko Kusnadi	Anggota
13.	Frans Harsono, M.Ed	Anggota

Pada tahun-tahun berikutnya susunan pengurus hasil pemilihan pada Musyawarah Nasional telah mengalami berbagai perubahan. Ada yang mengundurkan diri karena berbagai kesibukan, ada yang pindah keluar negeri atau bertugas keluar negeri untuk 1 atau 2 tahun dan sekembalinya ke Indoensia, barulah mulai aktif kembali.

Ada pula, tambahan anggota-anggota baru, misalnya pada tahun 1976, Pengurus DNIKS diperkuat dengan anggota-anggota Humas: "Ny. S.M. Siregar dan Ny. Surya Karta Legawa."

Pada tahun 1980 tercatat suatu kepengurusan yang disederhanakan, terdiri dari anggota yang membantu secara aktif dalam kegiatan sehari-hari atau sewaktu-waktu, yaitu:

No.	**Nama**	**Jabatan**
1.	Ny. Johana A.H Nasution	Ketua Umum
2.	Mr. Hamid Algadri	Wakil Ketua
3.	Mr. M. Dartojo	Sekjend
4.	Dra. Vera I Wullur (Merangkap Ketua Badan Pengolahan dan Pengembangan)	Anggota
5.	Mrs. M.G. Suria Karta Legawa (merangkap Humas)	Anggota
6.	Mrs. Sri Soedarsono	Anggota

	(merangkap Bidang Dana),	
7.	Ny. Tambunan Hutagalung	Anggota
8.	Mr. Soetardjo Soeromarto (menggantikan Ijas Suhanda)	Anggota
9.	Prof. Dr. Gambiro Prawirosudirdjo	Anggota
10.	Mrs. C. Utaryo	Anggota

Kemudian, dalam rapat Pengurus Harian DNIKS pada tanggal 27 Februari 1982 diputuskan untuk menambah anggota Pengurus Pleno dengan sejumlah orang sehingga susunan pengurus sejak saat itu menjadi:

No.	**Nama**	**Jabatan**
1.	Ny. Johana A.H Nasution	Ketua Umum
2.	Ijas Suhanda. SH	Ketua I (Non aktif)
3.	Mr. Hamid Algadri (Merangkap Bendahara)	Ketua II
4.	Mr. M. Dartojo	Sekjend (Non Aktif)
5.	Dra. Vera I Wullur (Merangkap Ketua Badan Pengolahan dan Pengembangan)	Anggota
6.	Mrs. M.G. Suria Karta Legawa (merangkap Humas)	Anggota
7.	Mrs. Sri Soedarsono	Anggota
8.	Ny. Tambunan Hutagalung	Anggota
9.	Mr. Soetardjo Soeromarto (menggantikan Ijas Suhanda)	Anggota
10.	Prof. Dr. Gambiro Prawirosudirdjo	Anggota
11.	Mrs. C. Utaryo	Anggota

12.	Mrs. S.M Siregar	Anggota

Ditambah dengan:
Ibu T. Sajono (sejak 1973 dalam lingkungan DNIKS sebagai anggota Biro Penca), Dr. Hendarto Hendarmin (sejak 1973 dalam Biro Penca), Ibu Soes Abdurachman (sejak 1978 dalam lingkungan DNIKS pada BPP), Ibu S.L. Hanafiah (idem), Ibu M. Marjono (sejak 1977 di lingkungan DNIKS sebagai anggota PK2A dan 1980 pada Panker Perlindungan Anak), Bpk. Koesbiono Sarmanhadi, SH (sejak 1981 dalam Biro Penca).

Periode Raden Panji H. Mohammad Noer (1985-1990)

Berdasarkan Lampiran Kepututsan Menteri Sosial RI Nomor: 54/HUK/1985 tentang SUSUNAN PENGURUS DNIKS TAHUN 1985-1990 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Nani Soedarsono, SH pada 13 Agustus 1985, yaitu :

No.	Nama	Jabatan
1.	Mrs. Tien Soeharto	Pelindung
2.	Menteri Sosial RI	Penasehat
3.	Menteri Dalam Negeri RI	Penasehat
4.	Ny. Johana Sunarti Nasution	Pembina
5.	Raden Panji H. Moh Noer	Ketua Umum
6.	Ny. Sri Soedarsono (membidangi kerjasama dan bantuan sosial)	Ketua I
7.	Sardjono Suprapto (membidangi pengembangan UKS dan rehabilitasi)	Ketua II
8.	Kusbiono Sarmanhadi, SH (Membidangi Litbang)	Ketua III
9.	Ny. M. Maryono	Sekretasis Jenderal
10.	Hediyanto	Bendahara Umum
11.	H.A Parwis Nasution	Wakil Bendahara
12.	Ny. Soewanci SH	Bidang Penelitian, Pengolahan dan Pengembangan

13.	Dra. Oetari Oetaryo MSW	Bidang Penelitian, Pengolahan dan Pengembangan
14.	Drs. Ali Musa	Bidang Penelitian, Pengolahan dan Pengembangan
15.	Sarsito M. Sarwono	Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
16.	Arif Gosita SH	Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
17.	Dra. Istikanah Soepardo	Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
18.	Dr. Hendarto Hendarmin	Bidang Kerjasama
19.	Bernadine Wiryono MSW	Bidang Kerjasama
20.	Soetardi	Bidang Kerjasama
21.	Dr. Markus Sudibyo	Bidang Rehabilitasi Sosial
22.	Ny. Mahar Mardjono	Bidang Rehabilitasi Sosial
23.	Soerodjo	Bidang Rehabilitasi Sosial

24.	Wiryono Padmowiryono	Bidang Bantuan Sosial dan Pelayanan Sosial
25.	Ny. Tati Maryono	Bidang Bantuan Sosial dan Pelayanan Sosial
26	Ny. Rose Jusuf Razak	Bidang Bantuan Sosial dan Pelayanan Sosial

Periode H. Gatot Suherman (1990-1995)

No.	Nama	Jabatan
1.	Mrs. Tien Soeharto	Pelindung
2.	Menteri Sosial RI	Pembina
3.	H. Gatot Suherman	Ketua Umum
4.	Dr. Bahrawi W. MPH	Ketua Harian
5.	Drs. Soetadi M	Sekretaris Jenderal
6.	Su'uddy Sadat, BSc	Bendahara Umum
7.	Dr. Ny. Yaumil C. Agoes Achir	Pusat Penelitian dan Informasi UKS
8.	Drs. M. Soehodo	Pusat Pendidikan dan Latihan UKS
9.	Abdullah Syarwani, SH	Pusat Pembinaan dan Pengembangan UKS

Periode Letjen TNI (Purn) H. Bustanil Arifin, SH (1995-2000, 2000-2005)

Kepengurusan Letjen TNI (Purn) H. Bustanil Arifin, SH untuk Periode 1995-2000 dikukuhkan melalui SK Menteri Sosial RI Nomor: 57A/HUK/1995 yang ditetapkan di Jakarta, 10 November 1995. Susunan Pengurus DNIKS dibentuk oleh tim formatur yang dipimpin oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir, Drs. Suranto sebagai sekretaris, serta Dra. Dewi Amrah, Drs. Rustam Yusuf, dan Drs. Djonsani sebagai anggota formatur.

- Badan Penasehat :

  1. Ny. Johana Abdul Haris Nasution
  2. Ny. Sri Soedarsono
  3. Ny. Kanjeng Gusti Ratu Hemas
  4. Ny. Prof. Dr. Yaumil C. Akhir
  5. Ny. Prof. Dr. Fauzia Lola Aswin
  6. Ny. Dr. Nafsiah Mboy, DSA., M.Ph
  7. Drs. J. Marsaman, M.S.W
  8. Drs. Drs. F. Abdaoe
  9. Dr. Beddu Amang
  10. Drs. Achmad Murhani

- Badan Penyantun :

  1. Radinal Muchtar
  2. Ir. Sofyan Ismail
  3. Bambang Rachmadi
  4. Usman Soedargo
  5. Alwin Arifin
  6. Hartadi Angko Soebroto

7. Hudiono Kadarisman
8. S.G. YAP
9. Teguh Santoso
10. Drs. Yayat Priyatna

Badan Pengurus

No.	Nama	Jabatan
1.	Mrs. Tien Soeharto	Pelindung
2.	Menteri Sosial RI	Penasehat
3.	Letjen TNI (Purn) H. Bustanil Arifin, SH	Ketua Umum
4.	Halimah B. Trihatmodjo	Ketua Harian
5.	Drs. Sarsito N. Sarwono	Sekretaris Jenderal
6.	Drs. AK. Dalil Hasan	Bendahara Umum
7.	Laksma (Purn) Ir. Asnawi Hasan, M.Sc	Kepala Departemen/Biro Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
8.	Drs. Soelarso	Kepala Departemen/Biro Koordinasi dan Pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial

9.	Drs. Soetadi M	Kepala Departemen/Biro Pengembangan Potensi dan Peran Serta Masyarakat

Mutasi Jabatan dan Penambahan Anggota Pengurus DNIKS dengan SK Ketua Umum DNIKS Nomor: 1/94/SKP/98, yaitu :

- Sekretaris Jenderal: Ir. Asnawi Hassan, M.Sc (dari posisi Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan UKS)
- Anggota Pengurus: Sarsito N. Sarwono (dari posisi Sekretaris Jenderal)
- Anggota Pengurus: Ny. S.K. Mahar Mardjono
- Anggota Pengurus: Ny. Dra. H.N.A. Rangkuti, MEd

Periode Prof. H. Haryono Suyono, MA, Ph.D (2005-2011, 2011-2013, 2013-2017)

Susunan Anggota Badan Pengurus dan Personalisa Sekretariat DNIKS Periode 2011 - 2013 yang ditetapkan melalui SK Ketua Umum DNIKS Nomor: 2/164/SKP/2011 pada tanggal 20 Januari 2011, yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. H. Haryono Suyono, MA, Ph.D	Ketua Umum
2.	Dr. Rohadi Haryanto, M.Sc	Sekretaris Jenderal
3.	Dra. Sri Haryanti	Bendahara Umum

4.	Dr (HC). Subiakto Tjakrawerdaja	Ketua Bidang Pembinaan Organisasi
5.	Drs. Holil Soelaiman MSW	Ketua Bidang Perencanaan dan Evaluasi
6.	Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi MS	Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan
7.	Moh. Yarman, SE	Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi
8.	H.M. Cholis Hasan, SH., MH., M.Si	Ketua Bidang Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat
9.	Siswadi, MBA	Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
10.	Dr. Hotbonar Sinaga	Ketua Bidang Jaminan Sosial Nasional
11.	Franky Welirang	Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi
12.	Dr. BRAy. Mooryati Soedibyo	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

13.	RA. Aryanto, SE	Ketua Bidang Perlindungan Sosial
14.	Parni Hardi	Ketua Bidang Relawan dan Peduli Bencana
15.	Dr. Damanhuri Rosadi, SKM	Wakil Sekretaris Jenderal
16.	Laila Refiana, Ph.D., M.Sc	Wakil Sekretaris
17.	Trusti Mulyono	Wakil Bendahara
18.	Sri Utami Sudarsono, M.Sc	Wakil Bendahara

Sekretariat:

No.	**Jabatan**	**Nama**
1.	Direktur Pelaksana	Dr. Rohadi Haryanto, M.Sc
2.	Asisten Direktur Bidang Administrasi dan Umum	Dirangkap Direktur Pelaksana
3.	Bagian Sekretariat dan Fasilitas Pengurus	Dra. Cerdik Tarigan
4.	Bagian Keuangan	Endang Sugiarti, SE
5.	Bagian SDM	Dirangkap Bagian Sekretariat dan Fasilitas Pengurus
6.	Bagian Umum	Dirangkap Bagian Sekretariat dan Fasilitas Pengurus

7.	Asisten Direktur Bidang Organisasi dan Promosi	Dr. Oos Anwas MS
8.	Bagian Organisasi dan Keanggotaan	Sekar Pertiwi, SH
9.	Bagian Dana dan Promosi	Dirangkap Bagian Keuangan
10.	Bagian Humas dan Informasi	Drs. Chaerudin
11.	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Dirangkap Bagian Organisasi dan Keanggotaan
12.	Asisten Direktur Bidang Kerjasama dan Advokasi	Laila Refiana, Ph.D., M.Sc
13.	Bagian Kerjasama Penyelenggaraan Kesos	Dirangkap Bagian Humas dan Informasi
14.	Bagian Advokasi dan Konsultasi	Dirangkap Bagian Humas dan Informasi
15.	Bagian Penelitian dan Pengembangan Model	Dra. Canti Farwati
16.	Bagian Fasilitasi Pelayanan Kesos	Dirangkap Bagian Fasilitasi Pelayanan Kesos

Susunan Badan Pengurus DNIKS Periode 2013 - 2017 yang ditetapkan melalui SK Ketua Umum DNIKS Nomor: 3/448/SLL/2013 pada tanggal 09 September 2013, yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. H. Haryono Suyono, MA, Ph.D	Ketua Umum
2.	H. Siswadi, M.B.A.	Wakil Ketua Umum
2.	Dr. Rohadi Haryanto, M.Sc	Sekretaris Jenderal
3.	Dra. Sri Haryanti	Bendahara Umum
4.	H.M. Cholis Hasan, SH., MH., M.Si	Ketua Bidang Organisasi
5.	Dr (HC). Subiakto Tjakrawerdaja	Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

6.	Dr. Sahawiah Abdullah	Ketua Bidang Perencanaan dan Evaluasi
7.	Moh. Yarman, SE	Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi
8.	Dra. Ariani Soekarwo	Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
9.	Dr. Damanhuri Rosadi, SKM	Ketua Bidang Jaminan Sosial Nasional
10.	Ir. H. Tato Miraza, MM	Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
11.	Dr. Fransiscus Welirang	Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi
12.	Dr. Dewi Motik Pramono	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
13.	Dr. Charletty Choesyana, M.Psi	Ketua Bidang Partisipasi Masyarakat
14.	Parni Hardi	Ketua Bidang Relawan dan Peduli Bencana
15.	Mr. Hotbonar Sinaga	Ketua Bidang Kerjasama Antar

		Lembaga dalam Negeri
16.	Makmur Sanusi Ph.D	Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri
17.	Dr. Oos M. Anwas, M.Si	Sekretaris I
18.	Laila Refiana, Ph.D., M.Sc	Sekretaris II
19.	Drs. Harpalis Alwi	Sekretaris III
20.	Drg. Sri Utami Soedarsono	Bendahara I
21	Yuniastuti, SE	Bendahara II

Periode H. Tantyo A.P. Sudharmono, MSc, MBA (2017-2021, 2021-2023)

Pada hari Senin, 18 September 2017 penyerahan kepemimpinan Prof. H. Haryono Suyono, MA, Ph.D kepada H. Tantyo A.P. Sudharmono, MSc, MBA sesuai hasil Keputusan Munas VIII DNIKS Nomor: 1/672/SK-MUNAS/2017 tanggal 17-18 September 2017 di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pengukuhan Kepengurusan H. Tantyo A.P. Sudharmono, MSc, MBA melalui Surat Keptusan Menteri Sosialo No72/Huk/2010 tentang Pengukuhan DNIKS sebagai LKKS Tingkat Nasional. Susunan Nama Badan Pengurus DNIKS Periode 2017-2021 berdasarkan SK Ketua Umum DNIKS Nomor : 4/673/SLL-SK/2017 tanggal 29 Sptember 2017.

Periode 1 (2017-2021)

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Tantyo A.P. Sudharmono, MSc, MBA	Ketua Umum
2.	Dr. Dewi Motik Pramono	Wakil Ketua Umum
3.	Dr. Sahawiah Abdullah	Sekretaris Jenderal
4.	Siswadi, MBA	Ketua Bidang Pemberdayaan Keluarga, Bantuan dan Jaminan Sosial
5.	Alwin Arifin	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembinaan Industri Rumah Tangga
6.	Ir. Agus Haryono Sudarmojo, MM	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Industri Pertanian dan Peternakan
7.	Dr. Hendratmoko, M.Si	Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Orsos

8.	Drg. Sri Utami Soedarsono	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri
9.	Dra. Ariani Soekarwo	Ketua Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
10.	Said Umar	Ketua Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi
11.	Zaurah Hasfian	Ketua Bidang Pelatihan dan Keterampilan
12.	Joeslin Nasution	Ketua Bidang Peningkatan Kesadaran Hidup Sehat dan Berkualitas
13.	Edwil S. Djamaoeddin	Ketua Bidang Pembinaan Anak dan Remaja
14.	Niken Indra Dhamayanti Tantyo Sudharmono	Ketua Bidang Peningkatan Kesadaran dan Kemampuan Ekonomi Digital
15.	Drs. S. Sofyan Manurung	Ketua Bidang Hukum dan

		Pemberdayaan Aset
16	Fajar Wiryono	Ketua Bidang Kesetiakawanan Sosial dan Kearifan Lokal
17.	Dr. Oos M. Anwas, M.Si	Sekretaris I
18.	Laila Refiana, Ph.D., M.Sc	Sekretaris II
19.	Sri Haryanti	Bendahara Umum
20.	Drs. Harpalis Alwi	Wakil Bendahara

Badan Pertimbangan/Penasehat DNIKS:

No.	**Nama**	**Jabatan**
1.	Prof. Dr. Haryono Suyono	Ketua
2.	Dr (HC). Subiakto Tkakrawerdaja	Wakil Ketua
3.	Suhardani Bustanil Arifin	Anggota
4.	Dr. BRAy. Mooryati Soedibyo	Anggota
5.	Retno Astuti Aryanto, SE	Anggota
6.	Drs. Holil Soelaiman, MSW	Anggota Pertanian dan Peternakan

Susunan Badan Perwakilan Anggota DNIKS Periode 2017-2021

No	Nama	Jabatan
1	DR. H. Tjuk Kasturi Sukadi, SE	Ketua
2	Makmur Sunusi, PhD	Wakil Ketua
3	Ibu DR. Didiet Widiowati	Sekretaris
4	Dr. Budiharjo, M.Si. : BK3S DKI Jakarta	Anggota
5	Drs. Dodo Mulyadi, M.Si. : LKKS Banten	Anggota
6	H. Sugiyanto,S.Sos.MM. : BK3S DIY	Anggota
7	Drs. H. Zaini Azis, MM. : BK3S Aceh	Anggota
8	Drs. Parlagutan Nasution, M.Si. : LKKS Sumbar	Anggota
9	Hj. Dewi Dhamayanti Said, SE.MM. : BK3S Kalimantan Selatan	Anggota
10	DR.Ir.Hj.Apiaty K. Amin Syam,M.Si : BK3S Sulawesi Selatan	Anggota
11	Auni M. Noor : LKKS Riau	Anggota
12	Dr. Ricardo W. Sastro : DP-BERSAMA	Anggota
13	Maulani A. Rotinsulu : HWDI	Anggota
14	Drs. Gufroni Sakaril, MM. : PPDI	Anggota
15	Mahmud Fassa : FKPCTI	Anggota
16	DR. Anne Nurfarina, M.SN. : PORTADIN	Anggota
17	Sri Hartini : FNKDI	Anggota
18	KOWANI	Anggota

No	Nama	Jabatan
19	Drs. Sularso : Perorangan	Anggota
20	Sri Soedarsono : Perorangan	Anggota
21	H.M. Cholis Hasan, S.H, M.H. : Perorangan	Anggota

Reshuffle :

- Ketua Umum: H. Tantyo A.P. Sudharmono, MSc, MBA
- Wakil Ketua Umum : Posisi kosong (Dr. Dewi Motik Pramono dikeluarkan oleh Tantyo Sudharmono)
- Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Keanggotaan : Siswadi, MBA
- Ketua Bidang Rehabilitasi Pemberdayaan Lansia : Dr. Sahawiah Abdullah
- Ketua Bidang Hukum dan Advokasi : Drs. S. Sofyan Manurung
- Ketua Bidang Perencanaan Kerja : Dr. L. Refiana Said, M.Sc
- Ketua Bidang Pemberdayaan teknologi Ekonomi Digital dan Fintek : Niken Indra Dhamayanti Tantyo Sudharmono
- Ketua Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam : Drs. Joeslin Nasution, SH
- Ketua Bidang Promosi dan Sosialisasi: Dra. Sri Haryanti
- Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Tani dan Ternak Pedesaan : Ir. Agus Haryono Sudarmojo, MM
- Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Luar Negeri : Drg. Sri Utami Soedarsono, M.Si

- Ketua Bidang Pemberdayaan Olahraga, Seni dan Budaya : Dr. Hendratmoko, M.Si
- Ketua Bidang Perkebunan Rakyat, Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Dr. Bedjo Santoso, M.Si
- Ketua Bidang Informasi dan Media : Adhi Wargono
- Ketua Bidang Energi Bersih dan Terjangkau : Ir. Suryo Busono
- Ketua Bidang Pemberdayaan Kapital Manusia dan Peningkatan Produktivitas : Dr. Puji Pujiono, MSW
- Ketua Bidang Pendidikan Vokasi dan Luar Sekolah : Dr. Oos M. Anwas, M.Si
- Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal Terpencil Terdalam : Ahmad Suhawi, ST., M.Si
- Ketua Bidang Pemberdayaan Aksessibilitas Umum dan Hak-Hak Disabiltas : Dra. Ariani Soekarwo
- Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Dalam Negeri : Wahyu Sofiadi Kartasasmita, Dipl. Kfm
- Ketua Bidang Sociopreneurship dan Penanggulangan Kemiskinan : Mustholihin Madjid
- Ketua Bidang Pemberdayaan Anak, Remaja dan Pemuda : Muslim Sumardiono, SH
- Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Laut dan Masyarakat pesisir : Richard Simeon, SE
- Ketua Bidang Pertanian Kota : Drs. Fajar Wiryono AA
- Ketua Bidang Peningkatan Kualitas dan Peran Disabilitas : Drs. Harpalis Alwi
- Ketua Bidang Pencegahan Kelaparan dan Stunting : Drs. Dadung Hari Setyo
- Ketua Bidang Kesetaraan Gender : Dharmithea Kiemas
- Ketua Bidang Penggalangan Opini : M. Kardeni
- Sekretaris Jenderal : Edwil S. Djamoeddin

- Wakil Sekretaris Jenderal I : Adit Imam Pribadi
- Wakil Sekretaris Jenderal II : Nurinawan, SE
- Wakil Sekretaris Jenderal III : Anas Nasikhin, M.Si
- Bendahara Umum : Thendri Sapriatno
- Wakil Bendahara Umum I : Akmal Fauzan, S.Si
- Wakil Bendahara Umum II : Yuli Nugroho

Periode ke-2 (2021-2026)

Susunan Badan Pengurus DNIKS periode 2021 - 2026 berdasarkan hasil Munas Jakarta tanggal 18-20 Desember 2021 menetapkan Tantyo Adji Sudharmono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DNIKS periode 2021-2026, Siswadi sebagai Ketua Badan Perwakilan Anggota, Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Ketua Badan Pertimbangan. Susunan Badan Pengurus DNIKS periode 2021 - 2026 secara lengkap sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Tantyo A.P. Sudharmono, MSc, MBA	Ketua Umum
2.	Dr. Hendratmoko, M.Si	Wakil Ketua Umum
3.	Sofrediansyah	Sekretaris Jenderal
4.	Diana Widiastuti	Bendahara Umum
5.	M. Arif'an	Wakil Sekretaris Jendral
6.	Tetrie Darwis	Wakil Sekretaris Jendral
7.	M. Yusuf Djamal	Wakil Sekretaris Umum

8.	Widya Nefianti	Wakil Bendahara Umum
9.	Robinson Paul Tarru	Wakil Bendahara Umum
10.	Achmad Suhawi	Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi
11.	Anas Nashikin	Ketua Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan Sosial Anggota
12.	Goefroni Sakaril	Ketua Bidang Pemantapan Aksesibilitas dan Hak-Hak Disabilitas
13.	Bedjo Santoso	Ketua Bidang Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup
14.	Sri Utami Soedarsono	Ketua Bidang Kesamaan Gender
15.	L. Refiana Said	Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri
16	Niken Indra Damayanti; Nurita Puspitasari	Ketua Bidang Pemberdayaan Wanita dan Remaja

17.	Wim Tangkilisan	Ketua Bidang Media dan Informasi
18.	Hairul Anas	Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Digital dan *Fintech*
19.	Nofa Christalia Inkiriwang; Vivi Agustinawati	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
20.	Suryo Busono	Ketua Bidang Energi Baru Terbarukan
21.	Rufi Susanto	Ketua Bidang *Business Development*
22.	Joeslin Nasution; Edy Sufrediansyah	Ketua Bidang Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam
23.	Fajar Wiryono	Ketua Bidang Pengembangan SDM
24.	Sukarno	Ketua Bidang Pemberdayaan Olahraga, Seni, dan Budaya
25.	Armand E. Maris	Ketua Bidang Fundraising dan Penggalangan Partisipasi Publik

26.	Nancy S. Sanger	Ketua Bidang Promosi dan Sosialisasi
27.	Harpalis Alwi	Ketua Bidang Peningkatan Kualitas dan Peran Disabilitas
28.	Agus Salide	Ketua Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)
29.	Arnof Wardin	Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terdalam

Periode Dr. Hendratmoko, M.Si (Pelaksana Tugas Ketua Umum 2023 - 2024)

- Plt Ketua Umum : Dr. Hendratmoko, M.Si
- Wakil Ketua Umum : Kosong
- Sekretaris Jenderal : Sofrediansyah
- Dst (tidak ada perubahan struktur, hanya mengikuti struktur kepengurusan Tantyo Sudharmono Periode 2021-2026).

- Pengurus aktif saat itu yang mengawal kegiatan dan mendampingi Hendratmoko hingga akhir periode kepengurusannya, yaitu : Prof Haryono Suyono (Ketua Badan Pertimbangan), Siswadi, Sofrediansyah, Prof Laila Refiana Said, Fajar Wiryono, Tetrie Darwis, Gufroni Sakaril, dan Endang (staf DNIKS).

- Awal tahun 2023, RM. Sentot Janinto Modjo dimasukkan menjadi salah satu Wasekjen DNIKS setelah sebelumnya membantu penyelenggaraan *podcast* di organisasi Tantyo Sudharmono di luar DNIKS dan juga *podcast* di DNIKS.

Periode Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H. (2024-2029)

BADAN PENASEHAT

Jabatan	Nama Lengkap
Ketua	**Hashim Sujono Djojohadikusumo**
Wakil Ketua	**Drs. H. Saifullah Yusuf**
Wakil Ketua	**Agus Jabo Priyono**
Sekretaris	**H. Abdul Malik Haramain, M.Si**
Anggota	Hj. Siti Hardiayanti Soeharto
Anggota	H. Bachtiar Chamsyah, S.E.
Anggota	Habib Dr. KH. Salim Djufri Assegaf
Anggota	Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si
Anggota	Dr. H. Idrus Marham, M.Si

Anggota	Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si
Anggota	Juliari Peter Batubara, M.B.A.
Anggota	Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T.

BADAN PENGARAH

Jabatan	Nama Lengkap
Ketua	**Franciscus Welirang**
Wakil Ketua	**KH. Masyhuri Malik**
Wakil Ketua	**Dr. Sumarjati Arjoso, M.Km**
Wakil Ketua	**Hendrick Kolonas, M.A., M.B.A.**
Sekretaris	**Dr (Cand). Hatta Taliwang, M.Si**
Anggota	Dr. Syahganda Nainggolan, M.Si
Anggota	Dr. KH. Asad Said Ali
Anggota	Erros Djarot
Anggota	Drs. H. Akhmad Muqowam
Anggota	Dr. Chazali Husni Situmorang, Apt., M.Sc
Anggota	Dr. H. Endin AJ. Soefihara, M.MA
Anggota	Hj. Novita Wijayanti, S.E, M.M.
Anggota	Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.
Anggota	Warsito Elwein
Anggota	Mayjen TNI (Purn). Yudi Chandra, M.A.
Anggota	Mayjen TNI (Purn). Djoko Warsito, S.Ip
Anggota	H. Yusuf Hamka
Anggota	H. Muhammad Rawi
Anggota	Ir. Sofredi Ansyah, MBA
Anggota	Dr. H. Rahman Akil, MBA
Anggota	Antun Joko Susmana, S.S.
Anggota	H. A'eng Haerudin
Anggota	H. Aries Halawani R, S.H., M.M.

BADAN PERTIMBANGAN

Jabatan	Nama Lengkap
Ketua	**Prof. Dr. H. Haryono Suyono, M.A., Ph.D**
Wakil Ketua	**Dr. Drs. Hartono Laras, S.H., M.Si**
Wakil Ketua	**Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Si**
Wakil Ketua	**Dr. Sahawiah**
Sekretaris	**Edwil S. Djamaludin, S.H., M.Si**
Anggota	Dr. Ir. Sutarto Alimoeso
Anggota	Makmur Sunusi, Ph.D
Anggota	Alwin Arifin
Anggota	Dr. Moh. Sudarmadi
Anggota	Prof. Ir. Drs. Djohan Joga MS., Ph.D
Anggota	Rufi Susanto, MBA
Anggota	Prof. Dr. Oos Anwas
Anggota	H. Hairul Anas, S.T., M.T.
Anggota	Mimin Rahardo, M.M.
Anggota	Dra. Tati Nigrahati
Anggota	Dra. Sri Haryanti
Bendahara	**Dra. Ria Indrastuty HS.**

BADAN PAKAR

Jabatan	Nama Lengkap
Ketua	**H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si**
Wakil Ketua	**Drs. Riad Oscha Khalik, M.M.**
Wakil Ketua	**Drs. H. Joeslin Nasution, M.Si**
Wakil Ketua	**Drs. H. Rasharul Sjahruzar, M.Si**

Sekretaris	**Dr. Manimbang Kahariadi, M.Si**
Anggota	Drs. H. Abdul Kholiq Ahmad, M.Si
Anggota	Dr. Drs. Effendy MS. Simbolon, M.I.Pol
Anggota	Dr. Ugik Kurniadi
Anggota	Pdt. Dr. Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Anggota	Dr. Leonardo J. Renyut
Anggota	Marsma TNI (Purn). Ir. Muhammad Johansyah, M.Eg., M.A.
Anggota	H. Zulfan Lindan
Anggota	Dr. Amris Fuad Hasan
Anggota	Dr. Hepi Bone Zulkarnain
Anggota	Dr. Tantowi Yahya
Anggota	Drs. Helmy Fauzy
Anggota	Mayjen Tni (Purn). Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si
Anggota	Dr. Susaningtyas Kertopati
Anggota	Dr. Rike Diah Pitaloka Ip, S.S., M.Hum.
Anggota	Dr. H. M. Kholid Syeirazie, M.Si
Anggota	Muhammad Oheo Sinapoy
Anggota	Dr. Chandra Tirta Wijaya
Anggota	Dr. Hj. Eva Yuliana, S.Ag., M.Si
Anggota	Hj. Oktasari Sabil, S.Sos., M.Si
Anggota	Dr. Suhartono Arham, M.Si
Anggota	Dr. Ir. Dewanto Indra Krisnadi
Anggota	Dr. Ramadhan Pohan
Anggota	Ir. Susanto, M.M
Anggota	Andi Oetomo, S.E.
Anggota	Dr. Dedy Djamaludin Malik
Anggota	Tjahyadi Budiman
Anggota	Wahida Baharudin Upa
Anggota	Anshar Manrulu, S.E.

Anggota	Dr. H. Abdul Khoir, M.Pd
Anggota	Ir. H. Hidayat Tri Soetarjo, M.M.
Anggota	Drs. H. Triadi P. Suparta, MBA
Anggota	Ahmad Rauf Qusyairi, S.IP., M.Si
Anggota	Hj. Ariani
Anggota	Agusman, A. KS
Anggota	Saleh Ramli, S.E.
Anggota	Drs. Ridwan Balia
Anggota	Purwanto M. Ali
Anggota	Dr. H. M. Fadil Azhari, M.H.
Anggota	Drs. H. M. Yusuf Djamal

BADAN PENGURUS

Jabatan	Nama Lengkap
Ketua Umum	**Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H.**
Wakil Ketua Umum I	**Dr. Hendratmoko, M.Si**
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Sosial	Kol. TNI (Purn). Thamrin Ferly, S.E., M.H.
Ketua Bidang Pembinaan dan Hubungan Organisasi Kesejahteraan Sosial	Dra. Ni Mashitoh Tri Siswandewi, M.Si
Ketua Bidang Pemberdayaan Disabilitas/Difabel	H. Norman Yulian

Ketua Bidang Pembinaan Atlet Olah Raga dan Seni Budaya Disabilitas/Difabel	Drs. Harpalis Alwi
Wakil Ketua Umum II	**Dr. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si**
Ketua Bidang Pembinaan Sosial Keagamaan	Drs. KH. Masrur Ainun Najih
Ketua Bidang Pemikiran, Pengembangan, dan Inovasi Sosial	Poempida Hidatullah, B.Eng, Ph.D
Ketua Bidang Infrastruktur Sosial	Hendri Yonaga Santoso
Ketua Bidang Media, Komunikasi, dan Informasi	Drs. Agus Eko Cahyono
Wakil Ketua Umum III	**Dr. A.S. Kobalen, M.Phil**
Ketua Bidang Industri, Pertambangan, dan Energi	Dr. H. Ali Nurdin Abdul Gani, S.H., M.H.
Ketua Bidang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Endang Marhumah Sari, S.Ag
Ketua Bidang Filantropi dan Fund Raising	Luqmanul Hakim, S.E.
Ketua Bidang Fakir Miskin, Lansia, dan Kelompok Rentan	Tengku Nurliyana Habsjah, M.Pd
Wakil Ketua Umum IV	**Drs. Zarman Syah, Ph.D**
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	Prof. Laila Refiana Said, S.Pi., M.Si., Ph.D
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga	Budiarto Linggowijono

Ketua Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Sosial	Ahmad Rifa'i, S.H.
Ketua Bidang Penyaluran Bantuan Korban Bencana	Supriyadi, S.H.
Wakil Ketua Umum V	**Rudi Andries, S.T., M.B.A.**
Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Dr (Cand). Mulyadin Permana, M.Si
Ketua Bidang Peningkatan Skill dan Pengembangan Profesi	RA. Loretta Kartikasari, S.E., M.M., M.I.Kom, Ph.D
Ketua Bidang Industri Kecil, Ekonomi Kreatif, dan Kewirausahaan	Ir. H. Yahja Djanggola
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM	Ihsanudin, S.Fil.I., M.Si
Wakil Ketua Umum VI	**Dr. Dian Novita Susanto, S.H., M.Sos**
Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan	Nor Isnaeni Dwi Arista, S.P., M.Si
Ketua Bidang Perhutanan Sosial, Perkebunan, dan Peternakan	Choirudin Ambong
Ketua Bidang Data dan Digitalisasi	Fera Pebrayenti
Ketua Bidang Kesehatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Herbal	Paul Bobby Utomo, B.Ec
Wakil Ketua Umum VII	**Drs. Gufroni Sakaril, M.M.**
Ketua Bidang Pekerja Sosial, Pekerjaan Sosial, dan Pembangunan Sosial	Dr. Siti Napsiyah Arifuzzaman, S.Ag., MSW

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi	Heppy Sebayang, S.H.
Ketua Bidang Penggalangan Partisipasi Masyarakat dan Relawan Sosial	Moch. Taruna Ajie
Ketua Bidang Pelayanan Bimbingan Mental dan Konseling	Zuliati, S.Ag
Wakil Ketua Umum VIII	**Fajar Wiryono Haryono Suyono, S.E.**
Ketua Bidang Harmonisasi dan Ketahanan Sosial	Kol. Mar. Imron Safei, S.E., M.Tr.Hanla, M.M.
Ketua Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan	Anisa Rahmawati, M.Pd
Ketua Bidang Perlindungan dan Pembinaan Ibu dan Anak	Ina Mutmainnah, S.Ag
Ketua Bidang Pelestarian dan Pengembangan Seni, Budaya Lokal, dan Komunitas Adat	Sudarman Wijaya, S.Sos., M.Ec.Dev
Sekretaris Jenderal	**H. Sudarto SM, S.Pd.I., M.M.**
Wakil Sekretaris Jenderal	Syamsudin M. Pay, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal	R.M. Sentot Janinto Modjo
Wakil Sekretaris Jenderal	Nikson Silalahi, S.T., M.I.Kom
Wakil Sekretaris Jenderal	Perismon
Wakil Sekretaris Jenderal	Dini Suhardiany, S.Pd
Wakil Sekretaris Jenderal	Ika April Liani, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal	SF Iriana NW
Wakil Sekretaris Jenderal	Dra. Endang Sulastri, M.M.
Bendahara Umum	**Hj. Sahlah Sapari, S.E., M.M.**
Wakil Bendahara Umum	Saiful Anwar, S.H.
Wakil Bendahara Umum	Henny Heryani, S.E.
Wakil Bendahara Umum	Asep Awaludin, S.E., M.H.
Wakil Bendahara Umum	Tria Desi Hadi Sapoetro, S.E.
Wakil Bendahara Umum	Muin Fikri, S.E.
Wakil Bendahara Umum	Fahmi Harsandono Matori, S.E., M.T.
Wakil Bendahara Umum	H. Syarief Hidayatullah, S.E.
Wakil Bendahara Umum	Diah Turis Kaemirawati, S.H., M.H.

BADAN PERWAKILAN ANGGOTA (BPA)

Jabatan	Nama Lengkap
Ketua	**H. Siswadi, MBA**
Wakil Ketua	Prof. Dr. Budiharjo, M.Si
Wakil Ketua	Mahmud Fasa
Sekretaris	**Nurhidayati Polaningtyas**
Anggota Unsur BK3S :	
BK3S/LKKS Kalimantan Selatan	Dewi Damayanti Said
BK3S/LKKS Sumatera Barat	Ery Gusman, S.H, M.H
BK3S/LKKS Jawa Timur	Dr. Pingky Saptandari
BK3S/LKKS Jawa Tengah	Eddy Soesanto, S.H., M.H.
BK3S/LKKS Jawa Barat	Agus Salide
BK3S/LKKS Banten	Drs. Kh. Mahmudi, M.Si
BK3S/LKKS Gorontalo	Raden R. Sahi, S.E.
BK3S/LKKS Bengkulu	Ir. H. Arnof Wardin, MS

Anggota Unsur Orsosnas :	
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	Nanang Kosim
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	Revita Alvi
Perkumpulan Olah Raga Tuna Rungu Indonesia (PORTURIN)	Alwin Gunawan
Gerakan Kejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN)	Bambang Prasetyo
Yayasan Pembina Asuhan Bunda (YPAB)	Sri Soedarsono
Lembaga Lansia Indonesia (LLI)	Dra. Tri Hananingsih
Special Olympics Indonesia (SOIna)	Kristijani Kirana
Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA)	Fajri Hidayatullah

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB VII

CAPAIAN SETIAP PERIODE KEPENGURUSAN DNIKS

Setiap periode kepengurusan DNIKS memberikan kontribusi unik dalam perjalanan organisasi dan perkembangan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia. Berikut adalah pencapaian signifikan dari masing-masing periode:

Periode Deklarator (1967-1970)

- Perumusan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DNIKS
- Mendapatkan pengakuan legal dari pemerintah sebagai organisasi kesejahteraan sosial
- Membangun jaringan awal dengan institusi pemerintah dan non-pemerintah
- Meletakkan fondasi konseptual tentang kesejahteraan sosial dalam konteks Indonesia

Periode Johana Sunarti Nasution (1970-1985)

- Peluncuran program "Keluarga Sejahtera" yang fokus pada pemberdayaan keluarga sebagai unit sosial dasar
- Penyelenggaraan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial pertama (1975)
- Penerbitan jurnal "Kesejahteraan Sosial Indonesia" (1980)
- Membangun jaringan internasional, termasuk keanggotaan dalam International Council on Social Welfare (ICSW)
- Mendirikan cabang DNIKS di 5 provinsi (Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara)

Periode Raden Panji H. Moh. Noer (1985-1990)

- Pendirian Pusat Studi Kesejahteraan Sosial DNIKS (1987)
- Penyelenggaraan Seminar Internasional Kesejahteraan Sosial di Asia Tenggara (1989)
- Pengembangan kurikulum pendidikan kesejahteraan sosial yang kontekstual dengan kondisi Indonesia
- Inisiasi program kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi
- Publikasi buku "Paradigma Kesejahteraan Sosial Indonesia" yang menjadi referensi penting dalam studi kesejahteraan sosial

Periode H. Gatot Suherman (1990-1995)

- Peluncuran program "Sejahtera Mandiri" yang mengintegrasikan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi
- Pendirian "Dana Abadi Kesejahteraan Sosial" sebagai sumber pendanaan berkelanjutan untuk program DNIKS
- Ekspansi cabang DNIKS ke 10 provinsi tambahan
- Pengembangan model kemitraan dengan sektor swasta dalam program kesejahteraan sosial
- Penyelenggaraan "Expo Kesejahteraan Sosial" pertama yang memamerkan inovasi dalam bidang kesejahteraan sosial

Periode Letjen TNI (Purn) H. Bustanil Arifin, SH (1995-2005)

- Peluncuran "Program Tanggap Krisis" yang membantu ribuan keluarga terdampak krisis ekonomi 1997-1998
- Pelaksanaan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial Pertama DNIKS “Membangun Harmoni Kehidupan dan Integrasi Sosial Bangsa” di Hotel Indonesia, Jakarta, 24 – 26 Juli 2001
- Reformasi internal DNIKS untuk menjadi lebih transparan dan partisipatif
- Advokasi yang berhasil memasukkan perspektif kesejahteraan sosial dalam berbagai undang-undang pasca-reformasi

- Penyelenggaraan "Dialog Nasional Kesejahteraan Sosial" yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk era reformasi
- Inisiasi program "Desa Sejahtera" yang menjadi model pembangunan berbasis komunitas

Periode Prof. H. Haryono Suyono, MA, Ph.D (2005-2017)

- Pendirian Institut Kesejahteraan Sosial DNIKS (2010)
- Pengembangan dan peluncuran "Indeks Kesejahteraan Sosial Indonesia" (2015)
- Advokasi yang berhasil memasukkan perspektif kesejahteraan sosial dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia
- Penyelenggaraan "International Conference on Social Welfare in Developing Countries" (2012)
- Pengembangan model integrasi program kesejahteraan sosial dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah

Periode H. Tantyo A.P. Sudharmono, MSc, MBA (2017-2021, 2021-2024)

- Peluncuran inisiatif "DNIKS Digital" termasuk aplikasi mobile dan platform kolaborasi online (2020)
- Pengembangan "Program Tanggap COVID" yang memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi
- Penyelenggaraan "Social Innovation Summit" yang menghasilkan solusi inovatif untuk masalah kesejahteraan sosial
- Inisiasi program "Next Gen Social Leaders" untuk mengembangkan generasi baru pemimpin dalam bidang kesejahteraan sosial
- Penguatan kemitraan dengan sektor teknologi dalam pengembangan solusi digital untuk kesejahteraan sosial

Periode Dr. Hendratmoko, M.Si (Pelaksana Tugas Ketua Umum 2023 - 2024)

- Adopsi teknologi digital dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan secara *hybrid* (*online* via zoom dan *onsite*)
- Melaksanakan kegiatan webinar (seminar online), konsolidasi, dan koordinasi 2 kali dalam setiap bulan secara daring yang diikuti oleh Orsosnas, Dinas Sosial, BK3S, dan LKKS seluruh Indonesia yang mencapai lebih dari seratus orang peserta.
- Mukernas, Hari Disabilitas Internasional, dan Hari Kesetiakawanan Nasional diselenggarakan secara *hybrid* (daring dan luring).

Periode Dr. H.A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H. (2024-2029, baru berjalan 6 bulan)

- Penyusunan Program Asta Bhakti DNIKS: Konsolidasi organisasi, kaderisasi, aksi dan akselerasi program pemerintah, mobilisasi dan partisipasi publik, pemberdayaan dan advokasi, reproduksi gagasan bersama perguruan tinggi, kolaborasi dengan organisasi sosial nasional non-anggota DNIKS, serta sosialisasi dan publikasi.
- Penyelenggaraan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) DNIKS (13 dan 21 Maret 2025, juga KNKS ke-3 tanggal 17 Juni 2025) yang menghasilkan "Deklarasi Jakarta tentang Kesejahteraan Sosial Indonesia", gagasan tentang “Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Zakat”, “Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Struktur dan Kebijakan Negara”, dan

"Kesejahteraan Sosial: Tujuan Nasional, Kenyataan, Tantangan dan Harapan".

- Perumusan visi "Zero Kemiskinan 2035" dan roadmap mencapainya
- Penguatan struktur organisasi dengan penambahan Wakil Ketua Umum menjadi 8 orang sesuai dengan konsep Asta Bhakti DNIKS dan Asta Cita Kabinet Prabowo - Gibran
- Pembentukan Tim Pakar untuk mengembangkan kajian komprehensif tentang kesejahteraan sosial dalam perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA
- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) DNIKS 2025-2029 dan Rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DNIKS pada penyelenggaraan Mukernas yang berlangsung tanggal 10 Mei 2025 di kantor DNIKS.
- Mulai mengurus Pendirian DNIKS berbadan hukum melalui Akta Notaris dan Pengesahan Perkumpulan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Tonggak-tonggak Penting dalam Perjalanan DNIKS

Beberapa peristiwa penting dalam perjalanan DNIKS yang menjadi tonggak sejarah organisasi ini antara lain:

1967: Deklarasi Pendirian DNIKS Tujuh tokoh visioner mendeklarasikan pendirian DNIKS sebagai wadah untuk memajukan kesejahteraan sosial Indonesia.

1968: DNIKS menjadi anggota penuh ICSW **(International Council on Social Welfare)**

1970: Kongres Pertama DNIKS Kongres pertama yang menghasilkan struktur organisasi formal dan memilih Johana Sunarti Nasution sebagai Ketua Umum pertama.

1975: Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial Konferensi pertama yang mengumpulkan para ahli dan praktisi kesejahteraan sosial untuk merumuskan kerangka konseptual kesejahteraan sosial Indonesia.

1980: Penerbitan Jurnal "Kesejahteraan Sosial Indonesia" Jurnal akademik pertama di Indonesia yang secara khusus membahas isu-isu kesejahteraan sosial.

1982: Indonesia menjadi tuan rumah konferensi intetrnasional untuk Asian dan Western Pasific ICEVH (International Council on Education for Visually Handicapped) setelah menjadi anggota ICEVH.

1984:Indonesia menjadi tuan rumah konferensi intetrnasional untuk Asian dan Western Pasific AFMR (Asian Federation untuk mental handicapped person) setelah

menjadi anggota AFMR. Indonesia juga telah menjadi anggota IUCW (International Union on Child Welfare).

1984: Pada konferensi sedunia (Global Conference) ICSW, Indonesia diminta menjadi tuan rumah untuk konferensi regional tahun 1987 untuk Asia dan Western Pasific. Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota Badan Eksekutif ICSW.

1984: Pada tanggal 19 September 1984, DNIKS memperoleh SK Menteri Sosial No. : 58/HUK/KEP/1984 sebagai wadah koordinasi organisasi-organisasi sosial Tingkat Nasional

1985: Munas DNIKS pada tanggal 10 Juli 1985 dalam rangka Penyempurnaan AD/ART, Rumusan Program Kerja DNIKS, dan pemilihan formatur yang tterdiri dari unsur-unsur DNIKS, Orsos Tingkat Nasional, dan BKKKS.

1987: Pendirian Pusat Studi Kesejahteraan Sosial Lembaga penelitian khusus yang menjadi pusat pengembangan pemikiran dan metodologi kesejahteraan sosial.

1993: Program "Sejahtera Mandiri" Program inovatif yang menggabungkan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin.

1996: Penyelenggaraan Lokakarya Penyempurnaan AD/ART DNIKS dan Penyelenggaraan Bersama BKKS Yogyakarta International Conference on Street Children di Yogyakarta, September 1996 yang dihadiri oleh 18 negara asing dan dari 27 propinsi di Indonesia.

1996: Menghadiri Konferensi International ICSW (International Council on Social Welfare) ke-27 di Hongkong pada bulan Juli 1996

1996: Menghadiri Konferensi Rehabilitation International di Auckland, New Zeland dalam rangka persiapan bagi DNIKS sebagai tuan rumah Konferensi Asia dan Pasifik untuk ICSW tahun 1997 di Jakarta

1998: Program "Tanggap Krisis" Respons cepat DNIKS terhadap krisis ekonomi 1997-1998 yang membantu ribuan keluarga terdampak.

2005: Reformasi Internal DNIKS Perubahan mendasar dalam struktur dan tata kelola DNIKS untuk menjadi lebih profesional dan partisipatif.

2010: Pendirian Institut Kesejahteraan Sosial DNIKS Lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan kapasitas para praktisi kesejahteraan sosial melalui program pelatihan dan sertifikasi.

2011: 5 Juli 2011 Pernerbitan Notaris Pernyataan Tentang Anggaran Dasar DNIKS oleh H. Muhammad Cholis Hasan (Ketua Bidang Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat) dan Dr. Rohadi Haryanto, M.Sc (Sekretaris Jenderal).

2014: Terbit Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bersama DNIKS Sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkam kesejahteraan sosial

antara Kemensos RI dengan DNIKS sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2015: Peluncuran "Indeks Kesejahteraan Sosial Indonesia" Instrumen pengukuran komprehensif yang menjadi acuan dalam evaluasi kebijakan dan program kesejahteraan sosial.

2020: Inisiatif "DNIKS Digital" Transformasi digital dalam pelayanan DNIKS, termasuk aplikasi mobile dan platform kolaborasi online.

2024: 30 November 2024 terpilihnya Dr. H.A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H. sebagai Ketua Umum DNIKS Periode 2024-2029 secara aklamasi.

2025: 13 Maret 2025 Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-1 dengan tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAM Menuju Zero Kemiskinan 2035" dan Sub Tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Zakat" yang diisi oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA sebagai narasumber. Konferensi DNIKS dan Deklarasi Jakarta pada momentum ini sangat penting dengan menghasilkan "Deklarasi Jakarta tentang Kesejahteraan Sosial Indonesia" dan pencanangan visi "Zero Kemiskinan 2035" melalui implementasi Program Asta Bhakti DNIKS 2024-2029 yang mencakup konsolidasi organisasi, kaderisasi, akselerasi program pemerintah, mobilisasi publik, advokasi, kolaborasi akademik, sinergi dengan Orsos nasional, dan sosialisasi. Konferensi ini meneguhkan pendekatan

Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ipoleksosbudhankamrata sebagai landasan strategis untuk memperkuat peran DNIKS dalam mengakselerasi program perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial menuju Indonesia yang adil dan sejahtera.

2025: 21 Maret 2025 Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-2 dengan tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAM Menuju Zero Kemiskinan 2035" dan Sub Tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Struktur dan Kebijakan Negara" yang diisi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom yang menjelaskan bagaimana peran negara khususnya Kementerian Sosial melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial, serta upaya sistematis memperbaiki Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.

2025: 10 Mei 2025 Mukernas I DNIKS dengan tema "Koordinasi dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Sosial" yang dihadiri oleh Manteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang merupakan Ketua Badan Pakar DNIKS dan seluruh jajaran pengurus DNIKS Periode 2024-2029. Mukernas I ini diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Stratetgis (RENSTRA) DNIKS 2025-2029 untuk memperkuat peran DNIKS sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Mukernas ini juga menjadi wadah untuk meneguhkan 8 pilar ASTA BHAKTI dan rekomendasi-rekomendasi penting bagi pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menggerakkan kesejahteraan sosial menuju zero kemiskinan tahun 2035.

2025: 17 Juni 2025 Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-3 dengan tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAM Menuju Zero Kemiskinan 2035" dan Sub Tema "Kesejahteraan Sosial: Tujuan Nasional, Kenyataan, Tantangan dan Harapan" yang diisi oleh Franciscus Welirang (Chairman Indofood) yang merupakan Ketua Dewan Pengarah DNIKS dan Dr. Syahganda Nainggolan, M.Si (Direktur Great Institute).

2025: Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie mengurus Badan Hukum DNIKS sebagai Organisasi Kemasyarakatan berbentuk Perkumpulan dengan Akta Notaris untuk mendapatkan SK Menteri Hukum.

2025: Penyusunan dan Peluncuran Buku DNIKS Dari Masa ke Masa yang merupakan upaya mendokumentasikan sejarah DNIKS sejak berdiri hingga saat ini dengan berbagai kegiatan dan terobosan sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial.

2025: Pemberian Penghargaan kepada Para Deklarator dan Ketua Umum DNIKS dari Masa ke Masa melalui keluarga mereka pada Acara Puncak HUT ke-58 DNIKS yang diselenggarakan pada 25 Juli 2025 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos RI.

DNIKS

1967

DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB VIII

ASTA BHAKTI DNIKS
2024 - 2029

Dalam periode kepengurusan 2024-2029, DNIKS di bawah kepemimpinan Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H. telah merumuskan "Kerangka Kerja Asta Bhakti" (Delapan Bakti) sebagai landasan strategis untuk mewujudkan visi Indonesia tanpa kemiskinan pada tahun 2035.

Program ini merupakan manifestasi dari pendekatan kesejahteraan sosial yang komprehensif dalam perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Kerakyatan).

Kerangka kerja ini didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kondisi kesejahteraan sosial Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membawa DNIKS ke tingkat yang lebih strategis dalam ekosistem kebijakan kesejahteraan sosial nasional.

BHAKTI 1

Konsolidasi Organisasi

TUJUAN

- Memperkuat struktur dan tata kelola Internal DNIKS

PROGRAM UTAMA

- Perubahan dan penyempurnaan AD/ART untuk memperkuat dasar hukum organisasi.
- Renovasi kantor DNIKS dan pengadaan peralatan kantor
- Peningkatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
- Digitalisasi manajemen organisasi (Sistem Informasi Orsos Terpadu) untuk efisiensi dan transparansi.
- Pengembangan database organisasi untuk memperkuat jejaring sosial.
- Penguatan kohesifitas Orsos anggota DNIKS untuk memperkuat solidaritas internal.
- Penyamaan visi, misi, dan persepsi DNIKS kepada anggota untuk sinergi dan kesatuan gerak.

BHAKTI 2

Kaderisasi

TUJUAN

- Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM serta kapasitas Organisasi Sosial Nasional (Orsosnas).

PROGRAM UTAMA

- Mengembangkan kepemimpinan pengurus DNIKS
- Sertifikasi kompetensi Orsosnas anggota untuk peningkatan profesionalisme
- Inkubasi kader muda dan relawan untuk regenerasi kepemimpinan nasional.

BHAKTI 3

Aksi dan Akselarasi Program Sosial Pemerintah

TUJUAN

- Mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

PROGRAM UTAMA

- Pendampingan akses program jaminan sosial untuk kelompok rentan.
- Bantuan sosial darurat dan rehabilitasi komunitas rentan pasca bencana.
- Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas untuk kemandirian sosial.

BHAKTI 4

Mobilisasi dan Partisipasi Publik/Fundraising

TUJUAN

- Menyebarkan kegiatan dan nilai-nilai DNIKS ke masyarakat luas.

PROGRAM UTAMA

- Kampanye digital (media sosial, konten) dan event sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.
- Platform donasi publik online (aplikasi Pergerakan Nasional Berbagi) untuk memperluas jangkauan dukungan.
- Kemitraan CSR dan filantropi untuk memperkuat dukungan finansial.

BHAKTI 5

Pemberdayaan dan Advokasi

TUJUAN

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan, penguatan kesadaran publik, dan advokasi kebijakan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PROGRAM UTAMA

- Bantuan hukum komunitas marjinal untuk memperkuat suara masyarakat rentan
- Workshop dan forum kebijakan untuk memperluas jaringan advokasi
- Buletin dan siaran kebijakan untuk menyebarkan informasi penting

- Pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kemandirian ekonomi
- Pendampingan kelompok usaha masyarakat untuk keberlanjutan ekonomi
- Penguatan kapasitas organisasi sosial/masyarakat untuk kemandirian lembaga
- Program literasi digital untuk menjembatani kesenjangan informasi
- Sekolah kepemimpinan perempuan untuk kesetaraan gender
- Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan kewirausahaan sosial
- Fasilitas akses permodalan untuk usaha mikro masyarakat

BHAKTI 6

Reproduksi Gagasan Bersama Cendekiawan dan Perguruan Tinggi

TUJUAN

- Menghasilkan pemikiran, riset, dan inovasi sosial berbasis data.

PROGRAM UTAMA

- Riset kolaboratif untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.
- Forum ilmiah dan simposium nasional serta internasional untuk memperluas diskusi sosial.
- Publikasi jurnal sosial untuk memperkuat literasi sosial nasional.

BHAKTI 7

Kolaborasi dan Sinergi dengan Organisasi Sosial Non-Anggota DNIKS

TUJUAN

- Memperluas jejaring dan sinergi program sosial dengan organisasi sosial lain.

PROGRAM UTAMA

- Forum nasional lintas organisasi untuk memperkuat koordinasi dan sinergi
- Proyek kolaboratiftematik untuk memaksimalkan dampak sosial.
- Pembentukan aliansi tematik untuk merespon isu sosial secara lebih cepat dan efektif.

BHAKTI 8

Sosialisasi dan Publikasi

TUJUAN

- Menyebarluaskan kegiatan dan nilai-nilai DNIKS ke masyarakat luas.

PROGRAM UTAMA

- Produksi konten media dan multimedia untuk memperluas jangkauan informasi
- Kemitraan media untuk memperkuat jaringan komunikasi sosial
- Penguatan website dan sistem informasi publik untuk transparansi dan aksesibilitas.

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB IX

AKTIVITAS DAN KEGIATAN DNIKS PERIODE 2024-2029

Effendy Choirie (Gus Choi) terpilih menjadi Ketua Umum DNIKS, 30 November 2024

Sejak terpilihnya Dr. H.A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H. sebagai Ketua Umum pada Musyawarah Nasional DNIKS tanggal 30 November 2024, DNIKS Periode 2024-2029 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dalam tujuh bulan kepemimpinannya, DNIKS telah mencapai berbagai milestone penting yang menjadi fondasi bagi upaya pencapaian visi "Zero Kemiskinan 2035".

Berikut adalah berbagi aktivitas dan pencapaian DNIKS Periode 2024-2029 dalam tujuh bulan terakhir:

- **Sosialisasi Kepengurusan Baru**: Melakukan proses sosialisasi kepada relasi dan jaringan untuk bergabung menjadi pengurus DNIKS, memperluas basis dukungan dan partisipasi.
- **Rapat Formatur**: Menyelenggarakan serangkaian rapat formatur untuk membahas format struktur organisasi, melakukan inventarisasi nama calon pengurus, dan melakukan finalisasi susunan pengurus secara inklusif.

- **Silaturrahim dengan Ketua Badan Pertimbangan**: Mengadakan kunjungan kepada Prof. Haryono Suyono selaku Ketua Badan Pertimbangan DNIKS dan melakukan wawancara mendalam untuk mendokumentasikan sejarah DNIKS.

- **Koordinasi dengan Kementerian Sosial**: Melaksanakan beberapa pertemuan koordinasi dengan Menteri Sosial, H. Syaifullah Yusuf untuk membahas posisi dan eksistensi DNIKS, konsolidasi kepengurusan, dan potensi sinergi program kesejahteraan sosial.

- **Penandatanganan MoU dengan PT Telkom**: Membuat kesepakatan formal dengan PT Telkom dalam pengelolaan Aplikasi Gerakan Indonesia Berbagi (GIB) dan membentuk Yayasan GIB sebagai badan pelaksana program.

- **Audiensi dan Sharing Pengalaman INH dengan DNIKS**: International Networking for Humanitarian (INH) melakukan audiensi dengan DNIKS dalam rangka penyamaan visi dan persepsi tentang kesejahteraan sosial dan perjuangan kemanusiaan. Selain itu, INH berbagi pengalaman terkait rencana pelaksanaan Aplikasi Gerakan Indonesia Berbagi (GIB) yang rencananya akan diluncurkan oleh DNIKS.

- **Penandatangan MoU antara DNIKS dengan INH**: Setelah adanya kesamaan visi dan perjuangan, International Networking for Humanitarian (INH) dengan DNIKS melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka meningkatkan peran serta kedua lembaga dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat untuk pembelajaran dan pengembangan program.

- **Pertemuan dengan Anggota Badan Pengarah**: Melaksanakan dialog strategis dengan Dr. KH. Asad Said Ali, Mantan Wakil Kepala BIN, yang menjadi anggota Badan Pengarah DNIKS.

- **Silaturrahim dengan Hashim Djojohadikusumo**: Bersama Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, mengadakan pertemuan dengan Bapak Hashim Djojohadikusumo yang berhasil memperoleh komitmennya untuk menjadi Ketua Badan Pengarah DNIKS.

- **Ta'aruf dan Konsolidasi Pengurus**: Menyelenggarakan beberapa pertemuan perkenalan dan konsolidasi antar pengurus untuk membangun kesamaan visi dan kekompakan tim.

- **Perumusan Program Kerja**: Melakukan serangkaian rapat pengurus untuk menyusun program kerja dan menyiapkan konsep baru untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) DNIKS.

- **Penyusunan Kerangka Kerja Strategis**: Merumuskan "ASTA BAKTI DNIKS 2024-2029" sebagai delapan pilar program strategis yang mencakup konsolidasi, kaderisasi, akselerasi program pemerintah, mobilisasi partisipasi publik, advokasi, reproduksi ide kesejahteraan sosial, kolaborasi dengan organisasi sosial, dan sosialisasi.

- **Focus Group Discussion**: Menyelenggarakan FGD dengan peserta terbatas untuk sinkronisasi Kerangka Kerja ASTA BAKTI DNIKS, memastikan koherensi dan efektivitas program.

- **Koordinasi dengan Badan Perwakilan Anggota**: Mengadakan rapat dengan Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menghasilkan persetujuan terhadap Kerangka Kerja ASTA BAKTI DNIKS 2024-2029.

- **Pengembangan Jaringan Organisasi Sosial**: Menghadiri berbagai undangan dari organisasi sosial anggota maupun non-anggota untuk memperluas jejaring dan memperkuat sinergi antar lembaga.

- **Menjalin silaturahim dengan berbagai pihak, tokoh, pengusaha, birokrat, ekonom, akademisi, dan berbagai stakeholder dalam rangka bersama-sama mendorong kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

- **Menghidupkan dan memakmurkan kantor DNIKS** sebagai pusat aktivitas dengan mendorong kehadiran pengurus minimal tiga hari seminggu untuk membangun kebersamaan dan sinergi.

- **Merenovasi secara mandiri berbagai kerusakan yang ada di kantor DNIKS**.

- **Tumpengan dalam rangka tasyakuran pengurus DNIKS menjelang bulan puasa pada Februari 2025.**

- **Kegiatan Spiritual**: Mengadakan kegiatan pembacaan Al-Qur'an, khususnya Surah Yasin pada malam Nisfu Sya'ban, dan selamatan dengan simbol pemotongan tumpeng besar sebagai penguatan nilai-nilai spiritual organisasi.

- **Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial I**: Menyelenggarakan konferensi nasional pertama pada 13 Maret 2025 dengan sub-tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Zakat" yang diisi oleh Ketua BAZNAS Pusat Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA.

- **Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial II**: Melaksanakan konferensi nasional kedua pada 21 Maret 2025 dengan sub-tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Struktur dan Kebijakan Negara" yang diisi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Prof. Agus Zainal Arifin.

- **Silaturrahim dengan Menteri PPMI**: Mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Abdul Kadir Karding, yang menyatakan kesediaannya menjadi Ketua Badan Pakar DNIKS.

- **Bakti Sosial Ramadhan**: Menyelenggarakan kegiatan bakti sosial kolaboratif dengan PW Fatayat NU DKI Jakarta berupa Buka Puasa Bersama, Khitanan Massal, distribusi 1.000 mukena untuk masjid dan musholla, serta pembagian sembako pada 23 Maret 2025.

- **Kunjungan ke BK3S Jawa Timur**: Ketua Umum DNIKS melakukan kunjungan kerja dan diskusi dengan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur pada 8 April 2025 untuk memperkuat jejaring dan koordinasi program.

- **Rapat Pleno dan Halal Bihalal**: Mengadakan Rapat Pleno dan Halal Bihalal Pengurus DNIKS pada 11 April 2025 dengan agenda persiapan Mukernas DNIKS, penentuan job description pengurus, pembentukan Tim Penyusunan Sejarah DNIKS, pembentukan Tim Pengurusan Status Badan Hukum DNIKS, dan penetapan Yayasan Gerakan Indonesia Berbagi.

- **Kunjungan ke BK3S DKI Jakarta**: Melaksanakan kunjungan dan diskusi dengan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) DKI Jakarta pada 15 April 2025 guna membangun sinergi program dan penguatan jejaring di tingkat provinsi.

- **Silaturahim dan Rapat Persiapan Mukernas DNIKS** di Kediaman Bu Henny Heryani di Komplek Northridge Golf Sentul City Bogor.

- **Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DNIKS dengan tema "Koordinasi dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Sosial"** dalam rangka mengesahkan Rencana Stratetgis (RENSTRA) DNIKS 2025-2029 dalam bentuk 8 pilar ASTABHAKTI dan penyampaian 8 Rekomendasi Mukernas I DNIKS, pada Sabtu, 10 Mei 2025 di kantor DNIKS.

- **Ketua Umum dan Sejumlah Pengurus DNIKS menjadi motivator** dalam acara HUT Garuda Mas Anugrah (UMK Produk Kesehatan) pada Senin, 14 Mei 2025 di Novotel Mangga Dua Jakarta.

- **Rapat Koordinasi Pengurus DNIKS dengan Menteri Sosial beserta jajaran Dirjen dan Direktur Kemensos RI** dalam rangka persiapan HUT DNIKS ke-58, koordinasi program dan kolaborasi DNIKS-Kemensos, juga terkait operasional dan renovasi kantor DNIKS, pada Rabu, 21 Mei 2025 di kantor Kemensos RI.

- **Rapat Koordinasi Pengurus DNIKS dengan Hashim Djojohadikusumo** yang merupakan Ketua Penasehat DNIKS, pada 27 Mei 2025 di kantor Pak Hashim. Pak Hashim diminta oleh pengurus untuk menjadi bagian dari pendiri DNIKS Berbadan Hukum dalam bentuk Akta Notaris dan SK Perkumpulan dari Kementerian Hukum RI

- **Rapat Koordinasi Pengurus DNIKS dengan Franky Welirang** yang merupakan Ketua Badan Pengarah DNIKS, pada Jumat, 30 Mei 2025 di kantor Indofood/Indocement. Pak Franky bersedia menjadi bagian dari pendiri DNIKS Berbadan Hukum dalam bentuk Akta Notaris dan SK Perkumpulan dari Kementerian Hukum RI.

- **Rapat Koordinasi Lanjutan Pengurus DNIKS dengan Franky Welirang (Ketua Badan Pengarah DNIKS)** pada 2 Juni 2025 di kantor Indofood/Indocement.

- **Menerima Kunjungan Walikota Padang Panjang dan Ketua LKKS Padang Panjang** di kantor DNIKS pada 3 Juni 2025 dalam rangka konsolidasi struktural dan koordinasi berbagai kegiatan kesejahteraan sosial.

- **Pemotongan dan pembagian daging qurban pada momen Idul Adha 1446 H** yang diselenggarakan pada Minggu, 8 Juni 2025 di kantor DNIKS. DNIKS memotong hewan qurban berupa 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang dibagikan kepada pengurus, anggota Orsosnas, tukang ojek, dan masyarakat sekitar kantor DNIKS.

- **Menerima kunjungan Ketua PW Muslimat NU DKI Jakarta dan jajaran pengurus** dalam rangka silaturahim dan diskusi dengan Ketua Umum DNIKS dan jajaran pengurus, pada 13 Juni 2024 di kantor DNIKS. Muslimat NU DKI Jakarta menyatakan kesiapannya dalam rangka "Berjihad Melawan Kemiskinan" bersama DNIKS.

- **Ketua Umum DNIKS menerima kunjungan dan berdiskusi dengan Ketua Umum PPDI** Norman Yulian dan jajaran pengurus, pada 13 Juni 2025 di kantor DNIKS.

- **Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ke-3** dengan tema "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAM Menuju Zero Kemiskinan 2035" dan Sub Tema "Kesejahteraan Sosial: Tujuan Nasional, Kenyataan, Tantangan dan Harapan" yang diisi oleh Franciscus Welirang (Chairman Indofood) yang merupakan Ketua Dewan Pengarah DNIKS dan Dr. Syahganda Nainggolan, M.Si (Direktur Great Institute) pada Selasa, 17 Juni 2025. Agenda ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie yang dirayakan oleh para pengurus dan peserta konferensi dengan doa dan pemotongan kue ulang tahun.

- **Menerima Kunjungan Pengurus Yayasan Giri Raharjo Bersinar Gresik** yang merupakan yayasan rehabilitasi sosial untuk korban narkoba, pada 21 Juni 2025 di kantor DNIKS.

- **FGD para pegiat media dan eks-wartawan Harian Umum Berita Yudha** bersama jajaran Pengurus DNIKS dengan tema "Menjilid Kenangan dan FGD Bersama DNIKS", pada 21 Juni 2025 di kantor DNIKS.

- **Rapat Jajaran Pengurus DNIKS dengan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI** Dra. Mira Riyati Kurniasih, M.Si untuk Persiapan HUT DNIKS ke-58 yang akan difasilitasi oleh Kemensos RI, pada 23 Juni 2023 di Kantor Kementerian Sosial Salemba Jakarta Pusat.

- Waketum DNIKS Rudi Andries dan Ketua DNIKS Thamrin Ferly menerima Ketum PORTADIN Hendratmoko terkait distribusi bantuan dana untuk UMKM Portadin. DNIKS mengapresiasi bantuan Rp 139 juta untuk pemberdayaan 31 UMKM karena UMKM adalah tulang punggung perekomomian, pada 30 Juni 2025.

- **Rombongan Porturin bersilaturahim dengan jajaran pengurus DNIKS** dalam rangka laporan persiapan South East Asia Deaf Games yang akan mepertandingkan 6 cabang olahraga pada Senin, 30 Juni 2025 di kantor DNIKS.

- **Rapat Pleno Badan Pengurus DNIKS** dalam rangka Persiapan HUT DNIKS dan Evaluasi Pengurus Periode 2024-2029 pada Kamis, 3 Juli 2025 di kantor DNIKS.

- **Pembacaan Sholawat Jibril Rutin DNIKS setiap malam Jumat** di kantor DNIKS sejak April 2025.

- **Peluncuran dan Bedah Buku "DNIKS dari Masa ke Masa" sekaligus Tasyakuran HUT ke-58 DNIKS** pada Jumat, 17 Juli 2025 di kantor DNIKS.

- **Turnamen Catur Kategori Non Master dan Aktivis dalam rangka Membangun Komunitas Sosial yang bertepatan dengan Hari Catur Internasional,** sebagai rangkaian acara HUT ke-58 DNIKS pada Minggu, 20 Juli 2025 di kantor DNIKS.

- **Silaturahim dan Audiensi DNIKS dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dalam rangka pembentukan Gugus Tugas Kesejahteraan Sosial,** pada Rabu, 23 Juli 2025 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

BAPPENAS

BAPPENAS

- **Rapat DNIKS dengan Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos RI dan IPSPI (Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia) dalam rangka kerja sama pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)** bagi para pendamping sosial, pekerja sosial, dan relawan sosial di Indonesia, pada Senin, 21 Juli 2025 di Gedung Pusdiklat Kemensos Jl. Radio Dalam Raya Jakarta Selatan.

- **Acara Puncak HUT ke-58 DNIKS "Sejahtera untuk Semua"** yang diselenggarakan secara meriah dan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan para menteri-wakil menteri seperti Hashim Djojohadikusumo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Ketua BAZNAS RI, dan lain sebagainya. Acara ini juga dihadiri oleh para keluarga Deklator dan Ketua Umum DNIKS dari masa ke masa untuk menerima penghargaan dari DNIKS, pada Jum'at, 25 Juli 2025 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat.

- **Kunjungan DNIKS bersama IPSPI (Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia) ke BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)** untuk berdiskusi terkait rencana pendirian LSP Pekerja Sosial, pada Kamis, 31 Juli 2025 di Kantor BNSP Jl. Letjen MT Haryono Jakarta Selatan.

- **Ketua DNIKS Mulyadin Permana membantu mendampingi, mengarahkan, dan memfasilitatsi Panitia ASEAN DEAF GAMES 2025 yang diselenggarakan oleh PORTURIN** untuk bertemu dan mendapatkan support pemerintah dan berbagai stakeholder sampai pada pelaksanaan pada 21-26 Agustus 2025.

- **Rapat Persiapan Turnamen Golf DNIKS yang akan memperebutkan Piala Presiden, Piala Menteri Sosial, Piala Menteri P2MI, Piala Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan sebagainya,** pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Kantor DNIKS.

- **Sekretaris Jenderal DNIKS hadir sebagai narasumber dalam acara LAUNCHING GERAKAN KOPRI PEDULI & SANTUNAN: Bakti KOPRI Menyambut 8 Dekade Kemerdekaan Republik Indonesia,** pada Jum'at, 15 Agustus 2025 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat.

- **Rapat DNIKS dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam rangka penyusunan Peta Jalan AI (Artificial Intelligence) Nasional untuk Disabilitas,** pada Selasa, 19 Agustus 2025 di Kantor DNIKS

- **Sekretaris Jenderal DNIKS menjadi Narasumber pada kegiatan Webinar Nasional ke-53 "LANSIA MERDEKA, MANDIRI SOSIAL, EKONOMI",** pada Rabu, 20 Agustus 2025 melalui Aplikasi Zoom.

- **Rapat Pembahasan Materi Proposal dan Flyer sekaligus Penandatanganan Kerja Sama (PKS) rencana pelaksanaan Turnamen Charity Golf HUT ke-58 DNIKS** dengan PT. Micetro Karya Indonesia, pada Kamis, 21 Agustus 2025 di Kantor DNIKS.

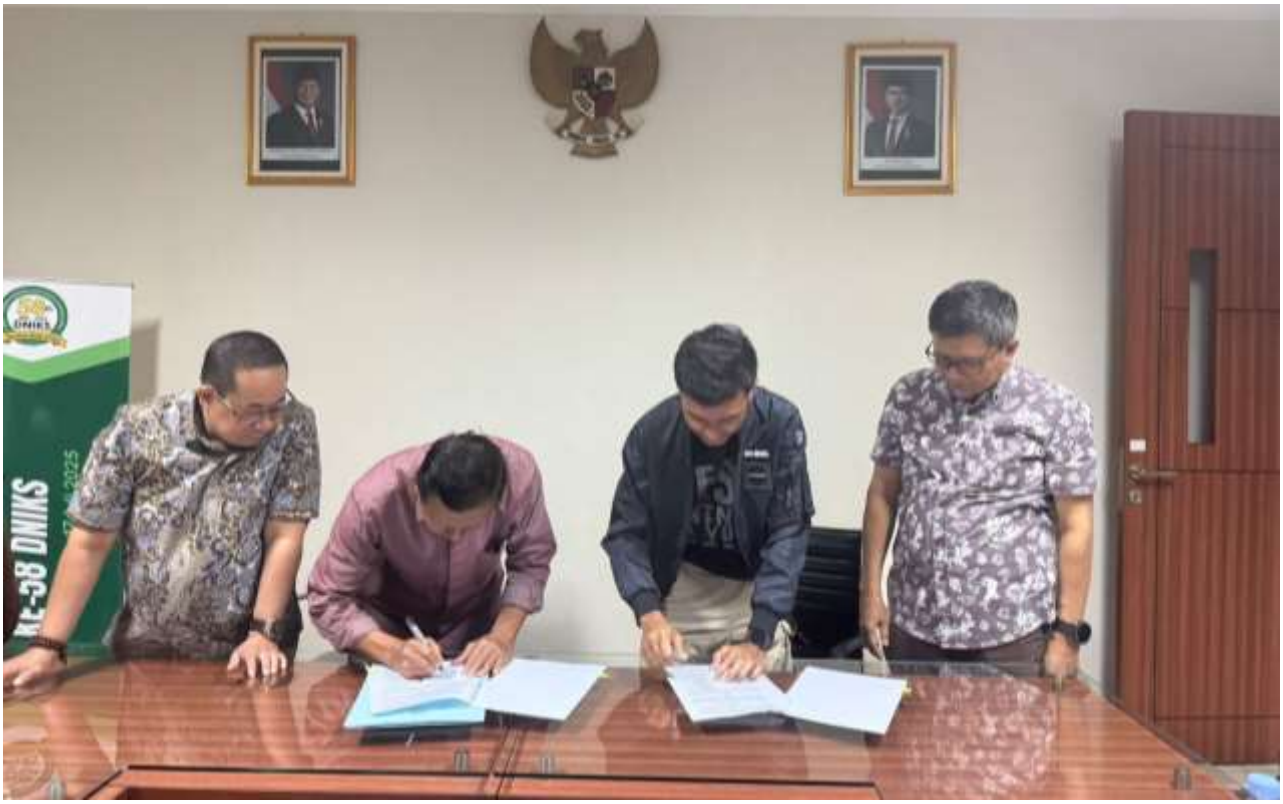
KE-58 DNIKS

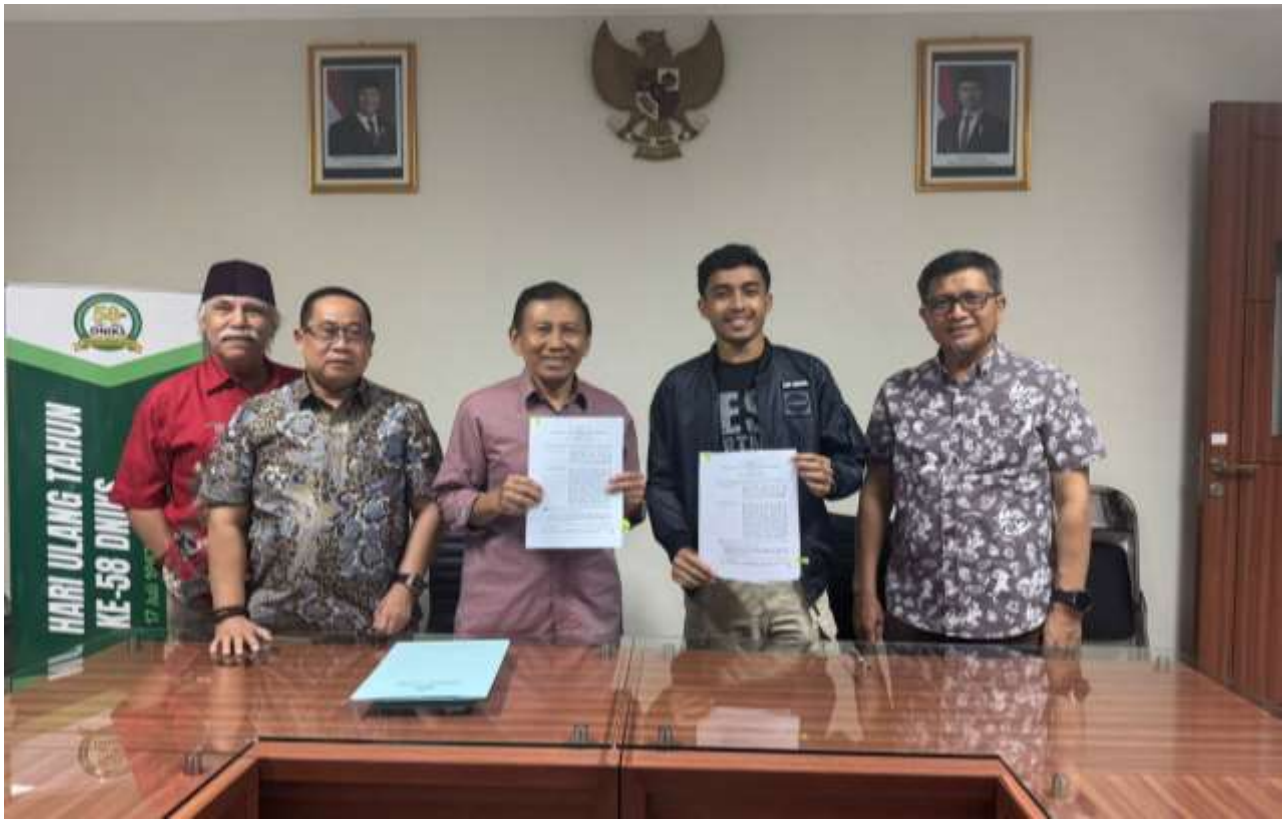
HARI ULANG TAHUN
KE-58 DNIKS

- **Gegap Gembita Opening Ceremony ASEAN DEAF GAMES 2025 dan persiapan pertandingan Kontingen Tuna Rungu se-ASEAN** yang diselenggarakan oleh PORTURIN dan didukung oleh DNIKS, pada Kamis, 21 Agustus 2025 di GOR Universitas Negeri Jakarta.

2025 JAKARTA
LAOS

2025 JAKARTA
2ND SEA DEAF GAMES
20 - 28 AUGUST 2025
ADSF

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB X

HUT KE-58 DNIKS :
"SEJAHTERA UNTUK SEMUA"

Memasuki usia ke-58 tahun, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi katalisator dalam perjuangan mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia. Perayaan HUT ke-58 DNIKS pada tahun 2025 ini mengangkat tema besar "Sejahtera untuk Semua" yang mencerminkan visi dan misi organisasi dalam membantu pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan.

Rangkaian acara perayaan HUT ke-58 dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan syukuran dan peluncuran

buku pada 17 Juli 2025, turnamen catur pada 20 Juli 2025, hingga puncak acara pada Jum'at, 25 Juli 2025 di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Keseluruhan rangkaian acara ini menunjukkan komitmen DNIKS dalam membangun sinergi antara berbagai elemen masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Puncak perayaan HUT ke-58 DNIKS ini dihadiri oleh jajaran lengkap kepengurusan DNIKS dan berbagai tokoh penting dari pemerintahan, swasta, dan masyarakat.

Kehadiran jajaran pengurus dan kepemimpinan lengkap DNIKS mencerminkan sinergi kuat antara berbagai elemen masyarakat dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan sosial dari berbagai aspek kehidupan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Para tokoh yang hadir, yaitu Ketua Badan Penasehat Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Badan Penasehat sekaligus Menteri Sosial H. Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Badan Penasehat sekaligus Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono, Ketua Badan Pengarah Franciscus Welirang, Ketua Badan Pakar sekaligus Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Ketua Umum Effendy Choirie, Sekretaris Jenderal Sudarto, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof. Dr. Noor Ahmad, Wakil Ketua Badan Pengarah sekaligus Ketua PBNU KH. Masyhuri Malik, para birokrat, teknokrat, akademisi, pimpinan universitas, pimpinan BUMN, pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Mahasiswa, dan juga pimpinan Organisasi Sosial Nasional (Orsosnas).

Apresiasi untuk Para Pejuang Kesejahteraan Sosial

Ketua Panitia HUT ke-58 DNIKS, Dian Novita Susanto, dalam sambutannya memberikan apresiasi mendalam kepada para pejuang kesejahteraan sosial yang telah mendedikasikan hidupnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan dan dukungan.

Dian mengatakan bahwa para pejuang kesejahteraan sosial merupakan mitra penting pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tanpa peran aktif mereka, program kesejahteraan sosial akan sulit berjalan efektif. Semangat pengabdian dan dedikasi mereka sangat berarti dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Penghargaan untuk Tokoh Bersejarah

Sebagai bentuk penghargaan, DNIKS memberikan apresiasi kepada para pendiri dan deklarator DNIKS serta para mantan Ketua Umum dari masa ke masa. Panitia melakukan penelusuran jejak sejarah yang mendalam, mencari kontak keluarga para tokoh tersebut, dan menghadirkan perwakilan keluarga dalam acara perayaan ini.

Dian menjelaskan bahwa panitia berupaya mencari kontak keluarga dan jejak sejarah, sampai berhasil menghadirkan keluarga yang mewakili para tokoh tersebut. Upaya ini menunjukkan komitmen DNIKS untuk menjaga memori kolektif dan menghormati jasa para pendahulu yang telah berjuang membangun fondasi organisasi.

Anggota keluarga dari para tokoh pendiri DNIKS dan ketua umum dari masa ke masa yang hadir yaitu Muhammad Fuad Nasar putra deklarator DNIKS Nasaruddin Latif, Eka Trisny Edyanti Nurdin Nasution cucu Johana Sunarti A.H. Nasution, Moh. Sjaifurrachman Noer putra Raden Panji H. Mohammad Noer, Akbar Wiraguna putra Brigadir Jenderal TNI (Purn.) H. Gatot Soeherman, Tengku Nurliyana Habsjah sebagai perwakilan keluarga Letnan Jenderal TNI (Purn.) Bustanil Arifin, Fajar Wiryono Haryono Suyono putra Prof. Dr. Haryono Suyono, RM. Sentot Janinto Modjo perwakilan keluarga Tantyo Adji P. Sudharmono, dan Dr. Hendratmoko, M.Si sendiri sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DNIKS tahun 2023 - 2024.

Dewan Nasional Indo

Dewan Nasional Indonesia u

Hari Ulang Tahun ke-
DNIKS 58
ewan Nasional Indonesia untuk Kesejahtera

Hari Ulang Tahun ke-
DNIKS 58

sia untuk Kesejahteraan

ntuk Kesejahteraan Sosial

Kemeriahan dan penghargaan pada acara Puncak HUT ke-58 DNIKS ini dipersembahkan untuk para deklarator, para pejuang, para pengurus, dan para ketua umum DNIKS dari masa ke masa yang telah berjuang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong berbagai program, kegiatan, dukungan, advokasi, dan regulasi terkait kesejahteraan sosial di Indonesia sejak berdirinya DNIKS hingga di masa-masa yang akan datang.

Panggilan untuk Tokoh Masyarakat

Ketua Umum DNIKS, A. Effendy Choirie, memberikan tantangan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kaum cendekiawan untuk menjadi penggerak kesejahteraan sosial. Hal ini sangat penting mengingat para relawan sosial bekerja secara sukarela untuk mendampingi masyarakat, terutama warga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Gus Choi menegaskan ajakannya kepada semua pihak untuk bersatu padu dan bergerak dengan ikhlas dalam membantu

mengentaskan kemiskinan. Sebagai pemimpin yang diberi amanah oleh Menteri Sosial untuk memimpin DNIKS, ia menegaskan bahwa DNIKS akan menjadi alat perjuangan untuk menyukseskan program Kementerian Sosial dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial.

Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah

Gus Choi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sangat memperhatikan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Ia menegaskan bahwa salah satu cara memberantas kemiskinan adalah melalui pendidikan, karena itu DNIKS mendukung keberadaan Sekolah Rakyat (SR) yang dikomandoi Mensos, begitu juga dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan ini menunjukkan bahwa harapan bagi tercapainya zero kemiskinan yang ingin diperjuangankan oleh DNIKS mendapatkan jalannya melalui berbagi program pemerintah para era Presiden Prabowo. Selanjutnya, tinggal bagaimana pemerintah menjalankan program-program kesejahteraan sosial secara konsisten dan berdampak langsung sampai lapisan masyarakat paling bawah. Idealnya, dalam menjalankan program-program sosial seperti bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, pemerintah perlu menjalin sinergi yang kuat dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional seperti DNIKS sebagai representasi masyarakat dalam implementasi berbagai agenda kesejahteraan sosial tersebut.

Komitmen Pemerintah: Landasan Moral dari Pidato Pelantikan Presiden

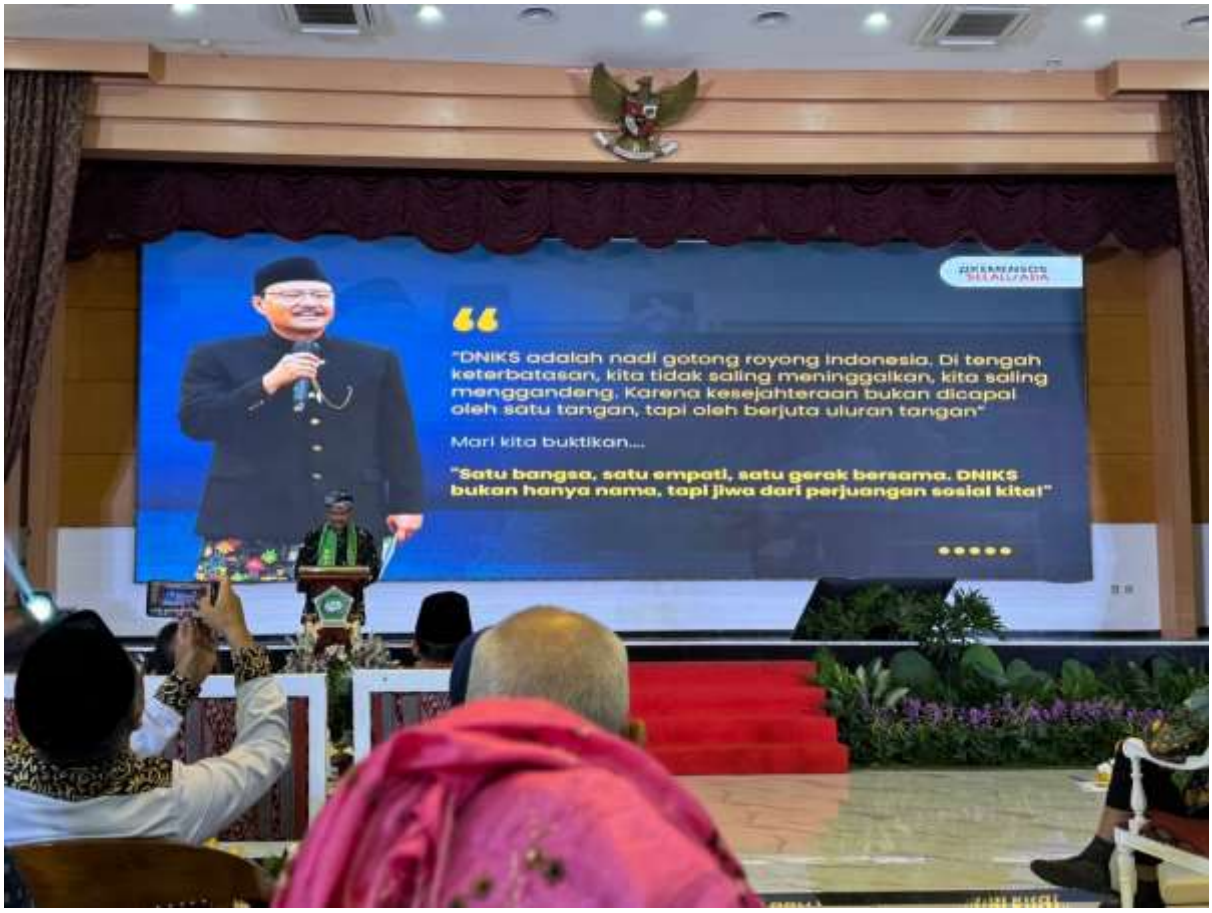

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam pidato kunci pada HUT ke-58 DNIKS, menegaskan komitmen teguh pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Beliau mengajak seluruh hadirin untuk merenungkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat dilantik pada Oktober 2024.

Mensos menekankan pentingnya merenungkan apa yang pernah disampaikan Presiden Prabowo saat pelantikan pada tahun 2024, yang kemudian ia sampaikan dalam pidato sambutannya di Gedung Aneka Bakti, Kemensos.

Visi Presiden untuk Kesejahteraan Rakyat

Mensos Gus Ipul mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi landasan moral dan politik bagi seluruh program kesejahteraan sosial. Presiden menyatakan bahwa terlalu banyak saudara-saudara bangsa yang berada di garis kemiskinan, terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan pagi, dan terlalu banyak anak-anak yang tidak memiliki pakaian layak untuk sekolah.

Presiden menegaskan bahwa tidak boleh aliran bantuan tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan. Negara harus menjamin dan melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati dan kemakmuran yang sesungguhnya.

"Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk sekolah. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan. Negara harus menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati dan kemakmuran yang sebenar-benarnya."

Pernyataan ini menjadi panduan fundamental bagi DNIKS dan seluruh stakeholder dalam menjalankan program-program kesejahteraan sosial.

Kisah Nayla: Inspirasi di Balik Program Sekolah Rakyat

Dalam sambutannya, Ketua Badan Penasehat DNIKS, Hashim Djojohadikusumo, membagikan kisah yang sangat menyentuh hati tentang seorang anak bernama Nayla dari keluarga miskin yang tidak dapat bersekolah. Kisah ini diungkap dari pertemuan pribadi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Hashim, di mana mereka membahas kondisi seorang ibu yang hanya memiliki penghasilan Rp 600.000 per bulan namun harus menghidupi dan memberi makan tiga orang anak.

Hashim mengenang dengan penuh haru bahwa Prabowo berkata kepadanya bahwa jika bukan mereka yang menolong, siapa lagi yang akan menolong.

"Prabowo berkata kepada saya, 'Shim, kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi?"

Percakapan sederhana namun penuh makna tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya program Sekolah Rakyat (SR) yang kini dikelola langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Hashim menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk tanggung jawab moral Prabowo terhadap rakyat kecil, melalui pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling miskin.

Selanjutnya, Hashim menyinggung soal misi DNIKS yang bertujuan mulia, yakni membantu pemerintah

mempercepat pengentasan kemiskinan sehingga ia bersedia ketika diminta menjadi Ketua Badan Penasehat DNIKS.

"Saya dan istri, sudah lama berkecimpung dalam kegiatan sosial masyarakat, terutama membantu pendidikan, sosial, dan budaya. Jadi, pada saat diminta menjadi Ketua Badan Penasehat DNIKS, saya bersedia menerimanya."

Refleksi dan Komitmen Masa Depan

HUT ke-58 DNIKS dengan tema "Sejahtera untuk Semua" menjadi momentum penting untuk merefleksikan transformasi paradigma kesejahteraan sosial di Indonesia. Dari pendekatan yang bersifat karitatif tradisional, DNIKS kini mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif

dengan fokus pada pemberdayaan mental, pendidikan, dan transformasi struktural.

Dukungan DNIKS terhadap program Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan komitmen organisasi untuk mengintegrasikan upayanya dengan program-program nasional yang lebih besar. Pendekatan ini mencerminkan kematangan organisasi dalam memahami bahwa pencapaian kesejahteraan sosial memerlukan sinergi antara berbagai level dan sektor.

Kemudian, peluncuran buku "DNIKS dari Masa ke Masa" menunjukkan kesadaran organisasi akan pentingnya dokumentasi sebagai warisan intelektual. Meskipun menghadapi tantangan minimnya dokumentasi historis, upaya ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa pengalaman dan pembelajaran DNIKS dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Menuju Indonesia Sejahtera

HUT ke-58 DNIKS menjadi bukti nyata evolusi organisasi dari sebuah lembaga pendamping menjadi katalisator perubahan sosial yang komprehensif. Dengan motto "Sejahtera untuk Semua", DNIKS tidak hanya berkomitmen pada program-program bantuan material, tetapi juga pada transformasi mental dan struktural yang dapat menciptakan perubahan berkelanjutan.

Kisah inspiratif di balik lahirnya program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa kepedulian terhadap nasib rakyat kecil harus dimulai dari empati yang mendalam dan diwujudkan dalam tindakan nyata yang sistematis. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil seperti

DNIKS, dan seluruh elemen bangsa, cita-cita untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan bukanlah utopia, melainkan target yang dapat dicapai.

Di usianya yang ke-58 tahun, DNIKS siap menghadapi tantangan masa depan dengan semangat yang semakin menggebu, paradigma yang semakin matang, dan komitmen yang semakin kuat untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Organisasi ini telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dalam perjuangan kesejahteraan sosial.

Dengan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dan komitmen untuk terus berinovasi dalam pendekatan kesejahteraan sosial, DNIKS siap menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Indonesia yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga sejahtera secara sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyatnya.

Rangkaian Acara HUT ke-58 DNIKS

Sebelum acara puncak HUT ke-58 DNIKS diselenggarakan pada 25 Juli 2025 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos RI, ada beberapa rangkaian acara HUT yang terlaksana, yaitu Peluncuran Buku "DNIKS dari Masa ke Masa" dan Tasyakuran HUT ke-58 DNIKS, juga pertandingan catur untuk kategori aktivis dan non master yang bertempat di kantor DNIKS Gambir Jakarta Pusat.

Peluncuran Buku "DNIKS dari Masa ke Masa" dan Tasyakuran HUT ke-58 DNIKS

Rangkaian perayaan HUT ke-58 DNIKS dimulai dengan acara syukuran dan peluncuran buku "DNIKS Dari Masa ke Masa: 17 Juli 1967 - 17 Juli 2025" yang diselenggarakan di Kantor DNIKS, Jakarta Pusat, pada Jumat, 17 Juli 2025. Acara ini merupakan momentum penting bagi DNIKS untuk merefleksikan perjalanan panjang organisasi sebagai katalisator dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial.

Wakil Ketua Umum DNIKS, Dian Novita Susanto, yang didampingi oleh Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie (Gus Choi), Wakil Ketua Umum Hendratmoko, dan Ketua Badan Penasehat (BPA) Siswadi Abdurrochim, menggarisbawahi

pentingnya transformasi mindset sebagai kunci untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang masih melanda sebagian masyarakat Indonesia.

Dian menyampaikan rasa syukur bahwa DNIKS telah berdiri selama 58 tahun dan menggambarkan syukuran tersebut sebagai momentum bagi DNIKS untuk terus berperan sebagai katalisator dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial.

Perbaikan Mentalitas sebagai Kunci Transformasi

Salah satu isu sentral yang diangkat dalam acara syukuran ini adalah pentingnya memperbaiki mental dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dian Novita Susanto menekankan bahwa DNIKS mendorong masyarakat agar tidak terjebak pada cara berpikir pasrah atas nasib. Ia menyatakan bahwa DNIKS berupaya mendobrak pandangan keliru bahwa rasa syukur, ikhlas, dan sabar bermakna pasrah menerima nasib. Menurutnya, cara pemikiran lama tersebut harus dibuang karena nasib dapat diubah dengan semangat berikhtiar atau berusaha.

Konsep ini menjadi sangat fundamental dalam pendekatan DNIKS terhadap pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini meyakini bahwa perubahan kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa pembebasan pola pikir dari kemiskinan, pembebasan dari mental yang ingin terus melanggengkan kemiskinan. Mental tersebut antara lain meliputi kebiasaan meminta-minta, mental bergantung pada bantuan sosial, mental tidak mau berusaha, serta mental yang menganggap segala sesuatu susah dan sulit.

Dian menegaskan bahwa kesejahteraan tidak akan tercapai jika pola pikir masyarakat belum merdeka dan sejahtera. Oleh karena itu, mendobrak mindset tersebut menjadi sangat penting, dengan mendorong masyarakat untuk berusaha dan berani menghadapi tantangan.

Perubahan mindset ini menjadi bagian integral dari Asta Bhakti DNIKS, yaitu menciptakan gagasan-gagasan baru secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa DNIKS tidak hanya fokus pada bantuan material, tetapi juga pada transformasi mental dan intelektual masyarakat.

Simbolisme Angka 58 dan Visi Kesejahteraan

Dian juga mengaitkan angka 58 secara simbolis dengan kebebasan dan kekuatan. Ia menjelaskan bahwa momentum 58 tahun ini, ketika dikaitkan dengan kesejahteraan, dapat dipandang sebagai proses transisi yang membawa masyarakat menuju kemapanan ekonomi dan hidup yang sejahtera, sesuai dengan motto DNIKS "Sejahtera Untuk Semua".

Interpretasi simbolis ini menunjukkan bahwa DNIKS memandang usia ke-58 tahun bukan hanya sebagai pencapaian temporal, tetapi sebagai momen transformasi menuju tingkat kematangan organisasi yang lebih tinggi dalam misi kesejahteraan sosial.

Tantangan Dokumentasi Sejarah DNIKS

Mulyadin Permana, Penyusun Buku DNIKS dari Masa ke Masa, mengungkapkan tantangan signifikan dalam merampungkan buku tentang sejarah DNIKS ini. Minimnya dokumentasi sejarah membuatnya harus melakukan revisi berkali-kali demi menyajikan informasi yang lengkap dan akurat.

Mulyadin menyampaikan harapannya bahwa dengan selesainya buku tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap tentang upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, khususnya program-program yang dijalankan oleh DNIKS.

Upaya dokumentasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa sejarah dan nilai-nilai perjuangan DNIKS dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Filosofi Kesederhanaan dalam Tasyakuran HUT ke-58 DNIKS

Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie menuturkan bahwa acara syukuran diselenggarakan secara sederhana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi kegiatan seremonial berlebihan. Ia menjelaskan bahwa acara tersebut hanya berupa potong tumpeng dan doa bersama untuk para deklarator serta para pemimpin DNIKS terdahulu yang telah berjasa dan mengabdi untuk DNIKS.

Gus Choi memberikan makna mendalam atas kehadiran tumpeng dalam acara tersebut. Menurutnya, tumpeng secara keseluruhan bukan hanya sekadar hidangan, tetapi juga merupakan simbol budaya yang kaya akan makna dan nilai-nilai luhur.

Pendekatan sederhana ini mencerminkan komitmen DNIKS untuk fokus pada substansi daripada kemegahan, sejalan dengan misi organisasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Gus Choi menekankan bahwa buku sejarah DNIKS harus menjadi bacaan wajib bagi seluruh pengurus agar memahami akar perjuangan lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa para pengurus DNIKS harus membaca dan menghayati buku tersebut dengan baik. Menurutnya, seseorang tidak dapat mengaku paham tentang DNIKS jika tidak memahami sejarah pendirian organisasi, dan tidak dapat mengaku mengenal DNIKS jika belum mengetahui siapa saja para ketua umum yang pernah memimpin.

Penekanan ini menunjukkan bahwa DNIKS memandang pemahaman sejarah sebagai fondasi penting bagi kontinuitas dan efektivitas organisasi dalam menjalankan misinya.

Turnamen Catur Non Master dan Aktivis: Membangun Komunitas Sosial

Dalam rangka memperingati HUT ke-58 serta menyambut Hari Catur Internasional, DNIKS menggelar Turnamen Catur Aktivis Sosial dan Non Master di Aula DNIKS, Jakarta, pada Minggu, 20 Juli 2025. Turnamen ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari dua kategori: 30 aktivis sosial dan 30 pecatur non master dari berbagai kalangan.

Sekretaris Jenderal DNIKS, Sudarto, dalam sambutan pembukaan yang didampingi Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Catur Hatta Taliwang, menyampaikan bahwa turnamen ini telah menjadi agenda tahunan yang rutin

diselenggarakan sebagai bagian dari upaya DNIKS dalam mendorong semangat kepedulian sosial nasional.

Sudarto menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah hadir dan ikut meramaikan turnamen tersebut. Ia mengungkapkan harapan agar kegiatan ini terus menjadi wadah silaturahmi, pembinaan, dan semangat kebersamaan bagi semua pihak.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh DNIKS seperti Mulyadin Permana, Sudarman, Wakil Sekretaris Jenderal Sentot Mojo, serta aktivis sosial seperti Hamid Basyaib, Harris Motti, dan Ariady Achmad.

Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar aktivis dan masyarakat pecinta catur. Melalui kegiatan ini, DNIKS terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang-ruang positif yang mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Catur, Hatta Taliwang, menjelaskan bahwa turnamen ini bukan hanya mengembangkan keterampilan catur, namun juga menjalin persahabatan dan mempererat hubungan antar peserta. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun komunitas, berbagi pengetahuan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurut Hatta, turnamen ini juga mengangkat isu-isu sosial tertentu, seperti kesejahteraan sosial, masyarakat, buruh, dan lingkungan. Ia menekankan bahwa acara ini menjadi sebuah sarana edukasi. Pendekatan ini menunjukkan kreativitas DNIKS dalam mengintegrasikan kegiatan rekreatif dengan misi edukasi sosial.

Pada Acara Puncak HUT DNIKS ke-58, para juara pertandingan catur mendapatkan piala dari DNIKS yang diserahkan oleh para tokoh pengurus DNIK, yakni Wakil Ketua Badan Penasehat DNIKS Agus Jabo Priyono yang merupakan Wakil Menteri Sosial RI, Ketua Badan Pakar DNIKS Abdul Kadir Karding yang juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juga Wakil Ketua Umum DNIKS Rudi Andries dan Lukman Edy yang didampingi oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DNIKS.

Hari Ulang Tahun ke-
DNIKS 58

Semua

nal Indonesia untuk Kesejahteraan Sos
untuk Semua

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB XI

BAB XI
PIKIRAN DAN HARAPAN

Pendekatan IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA dalam Pemberantasan Kemiskinan

DNIKS menyadari bahwa pemberantasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan komprehensif yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Berikut adalah bagaimana DNIKS mengintegrasikan perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA dalam upaya mencapai "Zero Kemiskinan 2035":

a. Dimensi Ideologi

Penguatan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", sebagai landasan filosofis dan moral dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan sosial dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

b. Dimensi Politik

Transformasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan untuk lebih berpihak pada kepentingan kelompok miskin dan rentan, penguatan partisipasi politik kelompok marginal, serta reformasi sistem representasi politik yang memastikan aspirasi masyarakat miskin terakomodasi dalam

pengambilan keputusan, sehingga program-program pengentasan kemiskinan mendapat dukungan politik yang kuat dan berkelanjutan.

c. Dimensi Ekonomi

Pembangunan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial melalui redistribusi aset produktif, akses terhadap permodalan, pengembangan ekonomi rakyat dan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja layak yang mampu menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin, menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat sebagai fondasi kesejahteraan material.

d. Dimensi Sosial

Penguatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif, pengembangan pelayanan sosial dasar yang berkualitas dan terjangkau, serta pemberdayaan masyarakat untuk membangun modal sosial dan resiliensi komunitas, memungkinkan kelompok miskin memiliki jaring pengaman yang memadai sekaligus kapasitas untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

e. Dimensi Budaya

Transformasi nilai, norma, dan praktik budaya yang mendukung kesejahteraan sosial, pengembangan budaya gotong royong sebagai modal sosial dalam pengentasan kemiskinan, serta pelestarian dan revitalisasi kearifan lokal yang mendukung ketahanan masyarakat, menciptakan ekosistem budaya yang mendorong solidaritas sosial dan pemberdayaan kolektif.

f. Dimensi Pertahanan

Membangun sistem pertahanan yang berkontribusi pada ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, mengembangkan sinergitas antara kepentingan pertahanan dan pembangunan kesejahteraan, serta melibatkan komponen pertahanan dalam program-program pengentasan kemiskinan di daerah perbatasan dan terpencil, menjamin stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

g. Dimensi Keamanan

Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengembangan pendekatan keamanan yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok miskin dan rentan, serta penanggulangan praktik-praktik eksploitatif dan kriminal yang memperparah kemiskinan, memberi rasa aman bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungannya.

h. Pelibatan Rakyat Semesta

Memobilisasi partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media, pengembangan gerakan sosial masif untuk solidaritas dengan masyarakat miskin, serta membangun kesadaran kolektif bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.

Dengan mengintegrasikan kedelapan dimensi IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA ini, DNIKS membangun pendekatan yang holistik dan sistemik dalam upaya mencapai "Zero Kemiskinan 2035". Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi merupakan fenomena multidimensi yang memerlukan intervensi terintegrasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam gerakan nasional menuju Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

Peran DNIKS untuk Indonesia 2035

a. Pusat Pengetahuan dan Inovasi

DNIKS memposisikan diri sebagai pusat data dan informasi kesejahteraan sosial terkemuka, laboratorium inovasi program kesejahteraan sosial, dan sumber rujukan utama untuk pengetahuan dan praktik terbaik yang mendukung pencapaian visi "Zero Kemiskinan 2035" melalui pengembangan model-model inovatif dan berbasis bukti.

b. Pendorong Transformasi Sistem

DNIKS berperan sebagai katalisator perubahan sistemik dalam kesejahteraan sosial, fasilitator transformasi paradigma dan pendekatan, serta pengarah diskursus publik tentang kesejahteraan sosial yang mengintegrasikan berbagai aspek IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA untuk mendorong perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

c. Jembatan Multi-Pihak

DNIKS menjadi penghubung antara berbagai pemangku kepentingan, fasilitator dialog dan kolaborasi, serta mediator kepentingan yang berbeda untuk memobilisasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya mewujudkan "Zero Kemiskinan 2035" dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh bagi rakyat semesta.

d. Model Organisasi Modern

DNIKS menunjukkan diri sebagai contoh tata kelola organisasi yang baik, pelopor adopsi teknologi dan

pendekatan inovatif, serta organisasi pembelajar yang terus beradaptasi terhadap perubahan konteks dan tantangan baru dalam membangun kesejahteraan sosial Indonesia secara komprehensif dan inklusif.

Pilar Strategis untuk Mencapai Visi 2035

a. Advokasi dan Kebijakan

DNIKS berkomitmen mendorong transformasi kebijakan kesejahteraan sosial yang selaras dengan berbagai aspek IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA, mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung upaya penghapusan kemiskinan, serta mengadvokasi peningkatan anggaran untuk kesejahteraan sosial sebagai investasi strategis dalam mencapai "Zero Kemiskinan 2035" dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara holistik.

b. Inovasi dan Teknologi

DNIKS mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan sosial, mengembangkan solusi inovatif untuk masalah kesejahteraan sosial klasik, serta mendorong adopsi pendekatan dan metodologi baru yang adaptif terhadap berbagai konteks lokal namun tetap terintegrasi dalam kerangka strategis nasional menuju "Zero Kemiskinan 2035".

c. Kemitraan dan Kolaborasi

DNIKS memfasilitasi pengembangan platform kolaborasi multi-pihak yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, membangun sinergi program antar pemangku kepentingan untuk efektivitas dan efisiensi, serta memobilisasi sumber daya kolektif untuk mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial dalam berbagai dimensi IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA.

d. Pengetahuan dan Pembelajaran

DNIKS berkomitmen untuk pengembangan basis pengetahuan tentang kesejahteraan sosial yang komprehensif, dokumentasi dan diseminasi praktik terbaik untuk replikasi dan adaptasi di berbagai konteks, serta mendorong riset aksi partisipatif untuk solusi kontekstual yang relevan dengan beragam kondisi masyarakat Indonesia dalam upaya mencapai "Zero Kemiskinan 2035".

e. Pemberdayaan dan Partisipasi

DNIKS memprioritaskan penguatan agen perubahan di tingkat masyarakat sebagai ujung tombak gerakan pengentasan kemiskinan, memfasilitasi partisipasi kelompok marginal dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta mengembangkan model pemberdayaan yang efektif untuk membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat sebagai fondasi kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Paradoks Indonesia: Sumber Daya Melimpah, Pejabat Makin Kaya, Korupsi Merajalela, Rakyat Semakin Sengsara

Indonesia menghadapi paradoks yang sangat ironis. Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah dan potensi manusia yang besar, Indonesia seharusnya menjadi negara makmur dengan rakyat yang sejahtera. Namun kenyataannya, di tengah melimpahnya kekayaan alam, fenomena yang terjadi justru sebaliknya: para pejabat semakin memperkaya diri, korupsi merajalela di berbagai lini pemerintahan, sementara rakyat banyak justru semakin terjepit dalam kemiskinan dan penderitaan. DNIKS telah melakukan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan dari paradoks yang memprihatinkan ini.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal dasar yang luar biasa untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Kekayaan sumber daya alamnya mencakup mineral berharga seperti emas, tembaga, nikel, dan timah; sumber energi melimpah dari minyak, gas, panas bumi hingga energi terbarukan; hutan tropis yang menjadi rumah keanekaragaman hayati unik; serta potensi kelautan yang sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kekayaan ini dilengkapi dengan lahan pertanian subur berkat tanah vulkanik dan iklim tropis, status sebagai negara mega-biodiversitas dengan ribuan spesies endemik, serta bonus demografi berupa populasi usia produktif yang besar. Nilai potensi sumber daya alam Indonesia bahkan diperkirakan mencapai ratusan triliun dolar AS. Namun ironisnya, di balik kekayaan yang melimpah ini, Indonesia masih dihadapkan pada

realitas pahit berupa tingginya angka kemiskinan, ketimpangan yang semakin lebar, dan kesejahteraan rakyat yang jauh dari harapan.

Kajian DNIKS mengidentifikasi bahwa paradoks ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, yaitu :

Faktor Struktural

Faktor struktural menjadi akar masalah utama, di mana terjadi ketimpangan akut dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya yang terkonsentrasi pada segelintir elite dengan tata kelola yang sangat lemah. Eksploitasi sumber daya alam lebih berorientasi pada ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah, menciptakan ketergantungan tinggi pada investasi asing dengan posisi tawar yang lemah. Sistem ekonomi yang ada belum mampu mengakomodasi prinsip keadilan sosial, sehingga kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu saja.

Faktor Kebijakan

Permasalahan struktural ini diperparah oleh faktor kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Inkonsistensi kebijakan pembangunan antar periode pemerintahan membuat program-program kesejahteraan tidak berkelanjutan. Lemahnya penegakan hukum dan regulasi yang tidak konsisten membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya. Para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, sementara rakyat dibiarkan dalam kemiskinan. Ketidakseimbangan pembangunan yang bias ke Jawa dan

kota-kota besar semakin memperlebar jurang kesenjangan antar daerah.

Faktor Kapasitas

Faktor kapasitas juga menjadi kendala serius dalam mengatasi paradoks ini. Lemahnya kapasitas birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan kompleks membuat program pembangunan tidak berjalan efektif. Rendahnya kualitas SDM dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja menciptakan pengangguran struktural. Tantangan demografis berupa distribusi penduduk yang tidak merata dan urbanisasi masif menambah kompleksitas masalah. Infrastruktur yang belum memadai, terutama di luar Jawa, semakin mempersulit upaya pemerataan pembangunan.

Faktor Global

Situasi ini semakin diperburuk oleh faktor global yang tidak menguntungkan. Indonesia terjebak dalam ketidakadilan tata ekonomi global sebagai penyedia bahan mentah murah bagi negara-negara maju. Fluktuasi harga komoditas global yang tidak terprediksi membuat stabilitas ekonomi nasional rentan guncangan. Tekanan dari lembaga keuangan internasional yang mendesakkan kebijakan neoliberal semakin mempersempit ruang gerak pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang pro-rakyat. Ditambah lagi, perubahan iklim dan degradasi lingkungan global memberikan beban adaptasi yang sangat berat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Paradoks ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam mengelola kekayaan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara para pejabat dan elite ekonomi semakin kaya dari eksploitasi sumber daya, rakyat banyak justru semakin terjepit dalam kemiskinan struktural. Korupsi yang merajalela telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mencuri hak-hak rakyat atas kesejahteraan yang seharusnya mereka nikmati dari kekayaan alam negeri ini. Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola, penegakan hukum yang tegas, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, paradoks ini akan terus berlanjut dan semakin memperparah penderitaan rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang Perlu Dilestarikan dan Tantangan Masa Depan

Para tokoh DNIKS mengidentifikasi beberapa nilai inti yang perlu dilestarikan dan diperkuat oleh generasi penerus sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial di masa depan. Nilai-nilai ini bukan hanya warisan budaya yang perlu dijaga, tetapi juga modal sosial yang dapat menjadi kekuatan transformatif dalam membangun sistem kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif.

Nilai-nilai yang Perlu Dilestarikan

1. Keberpihakan pada yang Lemah

Keberpihakan pada yang lemah dan rentan merupakan esensi fundamental dari kerja kesejahteraan sosial yang tidak boleh tereduksi oleh dinamika politik dan ekonomi yang berubah. Nilai ini mencerminkan komitmen mendalam untuk memprioritaskan kelompok-kelompok paling rentan dalam setiap kebijakan dan program, tidak semata-mata sebagai objek bantuan tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup bermartabat. Keberpihakan ini diwujudkan melalui advokasi yang konsisten untuk keadilan sosial, bahkan ketika hal tersebut tidak populer secara politik atau ekonomi.

Pendekatan berbasis hak menjadi manifestasi konkret dari nilai ini, di mana setiap intervensi kesejahteraan sosial dipandang sebagai upaya untuk memenuhi hak asasi manusia, bukan sebagai belas kasihan atau charity. Empati dan kepedulian aktif yang ditunjukkan dalam implementasi

program harus diimbangi dengan penghargaan yang tinggi terhadap martabat manusia, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan respek terlepas dari kondisi sosial ekonominya. Generasi penerus diharapkan terus memperkuat nilai ini di tengah arus pragmatisme dan ekonomisme yang semakin dominan dalam pembangunan nasional, dimana seringkali pertimbangan efisiensi ekonomi mengalahkan kepentingan kemanusiaan.

2. Gotong Royong dan Solidaritas

Gotong royong dan solidaritas merupakan kekuatan kultural yang telah menjadi modal sosial fundamental bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Nilai ini termanifestasi dalam semangat saling membantu yang spontan ketika ada anggota komunitas yang menghadapi kesulitan, kerja sama komunal dalam menyelesaikan berbagai masalah bersama, serta kesediaan untuk berbagi tanggung jawab dalam membangun kesejahteraan bersama. Tradisi saling melindungi dalam kesulitan dan kebersamaan dalam suka maupun duka mencerminkan kekuatan ikatan sosial yang melampaui batas-batas individual dan keluarga.

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin urban dan individualistis, generasi penerus diharapkan dapat merevitalisasi dan mengadaptasi nilai gotong royong ini tanpa kehilangan esensinya. Tantangannya adalah bagaimana mentransformasi gotong royong tradisional yang berbasis kedekatan geografis dan kekeluargaan menjadi solidaritas modern yang dapat beroperasi dalam skala yang lebih luas dan lintas kelompok sosial. Hal ini memerlukan inovasi dalam mekanisme dan platform yang memungkinkan

terwujudnya solidaritas sosial dalam konteks kehidupan perkotaan yang dinamis dan heterogen.

3. Integrasi Spiritual dan Material

Keseimbangan antara dimensi spiritual dan material dalam konsep kesejahteraan merupakan karakteristik unik dari pendekatan kesejahteraan sosial Indonesia yang membedakannya dari model-model yang berkembang di negara lain. Integrasi ini meniscayakan pemahaman tentang kesejahteraan holistik yang tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi juga kebutuhan rohani, dimana kedua aspek tersebut saling terkait dan memperkuat. Nilai-nilai agama tidak dipandang sebagai ornamen tambahan tetapi sebagai bagian integral dari pendekatan kesejahteraan yang memberikan makna dan orientasi moral bagi setiap program.

Keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan moral menjadi prinsip penting yang memastikan bahwa pembangunan kesejahteraan tidak hanya menghasilkan kemakmuran material tetapi juga kemajuan spiritual dan moral masyarakat. Etika dan moralitas dalam pembangunan bukan hanya slogan tetapi panduan operasional yang mempengaruhi cara program dirancang dan diimplementasikan. Penghargaan terhadap dimensi transendental kehidupan memberikan perspektif yang lebih luas tentang tujuan hidup manusia yang melampaui kepentingan material semata. Generasi penerus diharapkan mampu mempertahankan integrasi ini di tengah tekanan materialisme dan konsumerisme global yang cenderung

mereduksi makna kesejahteraan pada indikator-indikator material semata.

4. Kemandirian dan Keberdayaan

Nilai kemandirian dan keberdayaan menekankan pentingnya pengembangan kapasitas dan agensi individu dan komunitas sebagai tujuan utama dari setiap intervensi kesejahteraan sosial. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh setiap orang, dengan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk berkontribusi dan mengubah kondisinya menjadi lebih baik. Pemberdayaan diprioritaskan di atas pendekatan yang menciptakan ketergantungan, sehingga setiap program dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalahnya sendiri.

Partisipasi aktif dalam penentuan nasib menjadi prinsip yang memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif dari program kesejahteraan tetapi menjadi aktor yang menentukan arah dan cara program dilaksanakan. Inisiatif dan kreativitas lokal didorong dan dihargai sebagai sumber inovasi yang paling relevan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap komunitas. Resiliensi dan ketangguhan dikembangkan melalui berbagai program yang tidak hanya mengatasi masalah sesaat tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Generasi penerus diharapkan memperkuat pendekatan pemberdayaan ini dan menghindari jebakan pendekatan bantuan karitatif yang

menciptakan ketergantungan dan mengurangi dignitas penerima bantuan.

5. Kebhinnekaan dan Inklusivitas

Nilai kebhinnekaan dan inklusivitas menjadi fondasi yang sangat penting dalam konteks Indonesia yang majemuk, dimana keberagaman etnis, agama, budaya, dan sosial ekonomi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Penghargaan terhadap keberagaman ini bukan hanya toleransi pasif tetapi apresiasi aktif terhadap kontribusi positif yang dapat diberikan oleh setiap kelompok dalam membangun kesejahteraan bersama. Pendekatan inklusif yang merangkul semua kelompok masyarakat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Dialog dan kerjasama lintas perbedaan menjadi metodologi utama dalam mengatasi berbagai tantangan kesejahteraan yang kompleks dan multidimensional. Pemahaman lintas budaya dan agama dikembangkan sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap praktisi kesejahteraan sosial untuk dapat bekerja secara efektif dalam konteks yang beragam. Penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan intoleransi menjadi sikap fundamental yang harus ditunjukkan secara konsisten, baik dalam level kebijakan maupun implementasi program. Generasi penerus diharapkan terus memperkuat nilai kebhinnekaan sebagai kekuatan yang memperkaya dan memperkuat pembangunan kesejahteraan sosial, bukan sebagai kendala yang mempersulit atau memecah belah upaya bersama.

Tantangan Masa Depan dan Kesiapan Menghadapinya

DNIKS mengidentifikasi beberapa tantangan masa depan dalam bidang kesejahteraan sosial yang memerlukan antisipasi dan persiapan yang matang dari generasi penerus. Tantangan-tantangan ini bukan hanya ancaman tetapi juga peluang untuk mengembangkan pendekatan kesejahteraan sosial yang lebih inovatif dan efektif.

1. Transformasi Dunia Kerja

Revolusi industri 4.0 dengan otomatisasi, digitalisasi, dan berkembangnya ekonomi gig telah mengubah fundamental dunia kerja dengan implikasi yang sangat luas terhadap kesejahteraan sosial. Hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional akibat otomatisasi dan artificial intelligence menciptakan displacement yang masif bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital. Sebaliknya, kemunculan bentuk-bentuk kerja baru yang lebih fleksibel seperti freelancing, gig economy, dan remote work memberikan peluang tetapi juga menciptakan kerentanan baru dalam hal jaminan sosial dan stabilitas pendapatan.

Kesenjangan keterampilan atau skill gap menjadi salah satu masalah paling krusial, dimana keterampilan yang dimiliki oleh sebagian besar tenaga kerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah dengan cepat. Kerentanan dalam pekerjaan non-standar seperti kontrak sementara, paruh waktu, dan kerja platform digital menciptakan tantangan baru dalam penyediaan

perlindungan sosial yang selama ini dirancang untuk pekerja dengan status employment yang stabil. Kesiapan yang diperlukan untuk menghadapi transformasi ini meliputi pengembangan sistem pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan dan adaptif, sistem perlindungan sosial yang dapat menyesuaikan dengan bentuk-bentuk kerja baru, regulasi yang mengakomodasi dan melindungi pekerja dalam ekonomi digital, pendidikan yang berorientasi pada keterampilan masa depan, serta kebijakan pasar kerja yang proaktif dalam menciptakan peluang kerja baru.

2. Perubahan Iklim dan Krisis Ekologi

Dampak perubahan iklim akan semakin dirasakan dan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap sistem kesejahteraan sosial di masa depan. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan kebakaran hutan tidak hanya menciptakan kerusakan infrastruktur tetapi juga gangguan jangka panjang terhadap sistem penghidupan masyarakat. Gangguan terhadap produksi pangan akibat perubahan pola cuaca dan degradasi lingkungan dapat memicu krisis pangan yang berdampak pada kemiskinan dan malnutrisi.

Fenomena pengungsi iklim dan migrasi paksa akan menjadi tantangan besar yang memerlukan sistem perlindungan sosial yang dapat menangani perpindahan populasi dalam skala besar. Kelangkaan air dan konflik sumber daya alam dapat memicu konflik sosial yang mengancam stabilitas dan kohesi sosial. Dampak kesehatan dari polusi dan degradasi lingkungan akan meningkatkan beban sistem kesehatan dan

menimbulkan biaya sosial yang sangat besar. Kesiapan yang diperlukan meliputi pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim, penciptaan pekerjaan hijau dan implementasi transisi berkeadilan menuju ekonomi rendah karbon, pengembangan model penghidupan berkelanjutan yang resilient terhadap dampak iklim, penguatan sistem pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan program kesejahteraan sosial, serta pembangunan ketahanan komunitas yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

3. Transisi Demografis

Perubahan struktur demografi Indonesia membawa tantangan dan peluang yang sangat kompleks bagi sistem kesejahteraan sosial. Populasi yang menua di beberapa wilayah, terutama daerah urban dan berkembang, menciptakan kebutuhan akan sistem perawatan lansia yang komprehensif dan berkelanjutan. Sebaliknya, ledakan populasi pemuda di wilayah lain memerlukan strategi ketenagakerjaan dan pengembangan keterampilan yang masif untuk mencegah pengangguran dan ketidakstabilan sosial.

Urbanisasi yang berlangsung dengan cepat mengubah struktur sosial dan kebutuhan layanan, dimana sistem kesejahteraan yang dirancang untuk masyarakat rural harus beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan urban. Perubahan struktur keluarga dari extended family menjadi nuclear family atau bahkan single-person household mengubah sistem dukungan sosial tradisional dan memerlukan adaptasi dalam desain program kesejahteraan.

Migrasi internal dan internasional yang masif menciptakan tantangan dalam hal portabilitas layanan sosial dan perlindungan bagi migrant workers. Kesiapan yang diperlukan meliputi pengembangan pendekatan siklus hidup untuk perlindungan sosial yang mengakomodasi kebutuhan setiap tahap kehidupan, pembangunan sistem perawatan lansia yang terjangkau dan berkualitas, pengembangan strategi ketenagakerjaan pemuda yang komprehensif, adaptasi layanan sosial untuk kebutuhan masyarakat perkotaan, serta pengembangan tata kelola migrasi yang melindungi hak dan kesejahteraan migran.

4. Ketimpangan 4.0

Era digital telah melahirkan bentuk-bentuk ketimpangan baru yang lebih kompleks dan sulit dideteksi dibandingkan ketimpangan tradisional. Kesenjangan digital dan ketimpangan informasi menciptakan divide yang sangat fundamental antara mereka yang memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dengan mereka yang tidak. Konsentrasi kekayaan data di tangan segelintir korporasi teknologi besar menciptakan bentuk kekuasaan ekonomi baru yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan politik.

Bias dan diskriminasi yang tertanam dalam algoritma dapat memperpetual dan bahkan memperkuat ketimpangan yang sudah ada, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas dan marginal. Akses yang tidak merata terhadap manfaat teknologi seperti artificial intelligence, automation, dan digital platforms dapat memperdalam gap antara mereka yang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan

kesejahteraan dengan mereka yang menjadi korban displacement teknologi. Bentuk-bentuk baru eksklusi sosial muncul ketika akses terhadap layanan dasar semakin digitalized tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan atau akses untuk menggunakannya. Kesiapan yang diperlukan meliputi pengembangan kebijakan inklusi digital yang memastikan akses universal terhadap teknologi, pembangunan framework keadilan dan hak data yang melindungi privasi dan mencegah eksploitasi, pengembangan sistem akuntabilitas algoritma yang transparan dan fair, promosi inovasi redistributif yang memastikan manfaat teknologi dapat dinikmati secara luas, serta pengembangan pendekatan teknologi yang secara eksplisit dirancang untuk mengurangi ketimpangan.

5. Pandemi dan Krisis Kesehatan

Pengalaman COVID-19 telah menunjukkan betapa rentannya sistem kesejahteraan sosial terhadap pandemi dan krisis kesehatan global. Risiko kemunculan penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali terus mengancam dengan potensi dampak yang sangat masif terhadap sistem kesehatan dan ekonomi. Resistensi antimikroba yang semakin meluas dapat membuat penyakit-penyakit yang sebelumnya dapat diobati menjadi sangat berbahaya dan costly untuk ditangani.

Ancaman kesehatan lintas batas memerlukan koordinasi internasional yang efektif dan sistem kesehatan yang resilient. Krisis kesehatan mental yang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda, memerlukan pendekatan kesejahteraan yang lebih holistik dan sensitif

terhadap aspek mental health. Tekanan pada sistem layanan kesehatan selama krisis dapat mengakibatkan collapse yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Kesiapan yang diperlukan meliputi pengembangan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap berbagai jenis guncangan kesehatan, integrasi yang lebih kuat antara sistem kesejahteraan dan kesehatan, penguatan kesiapsiagaan pandemi melalui early warning systems dan rapid response capabilities, pengembangan layanan kesehatan mental yang accessible dan affordable, serta pembangunan ketahanan kesehatan masyarakat melalui promosi gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit.

6. Polarisasi Sosial dan Politik

Fenomena polarisasi sosial dan politik yang semakin menguat di berbagai negara juga mengancam Indonesia dan dapat berdampak sangat serius terhadap kohesi sosial dan efektivitas program kesejahteraan. Meningkatnya populisme dan ekstremisme politik dapat menggerus dukungan terhadap program kesejahteraan yang berbasis solidaritas dan redistribusi. Politik identitas yang menguat dapat memecah belah masyarakat dan mengurangi dukungan untuk program kesejahteraan yang inklusif.

Penyebaran misinformasi dan disinformasi melalui media sosial dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan program pemerintah. Erosi kepercayaan pada institusi publik dapat mengurangi legitimasi dan efektivitas program kesejahteraan sosial. Konflik berbasis identitas dapat mengancam stabilitas sosial dan mengganggu implementasi program kesejahteraan. Kesiapan yang diperlukan meliputi

pengembangan program kohesi sosial yang memperkuat ikatan antar kelompok masyarakat, peningkatan literasi media dan kemampuan berpikir kritis masyarakat, fasilitasi dialog dan proses peacebuilding yang konstruktif, pengembangan tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif, serta implementasi strategi perubahan narasi yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan solidaritas.

Kapabilitas Kunci untuk Generasi Penerus

Menghadapi tantangan-tantangan kompleks di masa depan, generasi penerus perlu mengembangkan beberapa kapabilitas kunci yang akan memungkinkan mereka untuk memimpin transformasi kesejahteraan sosial secara efektif.

Kepemimpinan Adaptif menjadi kompetensi fundamental yang mencakup kemampuan memimpin dalam situasi ketidakpastian yang tinggi, pengambilan keputusan yang adaptif berdasarkan informasi yang terus berubah, kepemimpinan yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan, kemampuan memfasilitasi kolaborasi multipihak, dan pemikiran sistemis yang dapat memahami kompleksitas dan interdependensi berbagai faktor.

Kemampuan Inovasi yang meliputi design thinking untuk mengembangkan solusi yang user-centered, penguasaan metodologi inovasi sosial yang sistematis, kemampuan foresight dan strategic thinking untuk mengantisipasi masa depan, mindset eksperimentasi yang berani mencoba pendekatan baru, dan kemampuan scaling up yang dapat memperluas dampak inovasi.

Literasi Digital dan Teknologi yang mencakup kemampuan analisis data untuk decision making yang berbasis bukti, kemampuan mendesain layanan digital yang user-friendly dan inclusive, kemampuan menilai dampak teknologi terhadap masyarakat, pemahaman tentang artificial intelligence dan automation serta implikasinya, dan kesadaran tentang cybersecurity dan perlindungan data.

Kompetensi Antarbudaya yang meliputi sensitivitas dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai konteks budaya, kemampuan komunikasi yang efektif lintas perbedaan, keterampilan resolusi konflik yang konstruktif, kemampuan mengkontekstualisasi pendekatan global ke dalam realitas lokal, dan kemampuan mengimplementasikan praktik-praktik inklusif dalam setiap program.

Kemampuan Pemecahan Masalah Kompleks yang mencakup pemikiran sistemis untuk memahami root causes dan systemic solutions, kemampuan memfasilitasi kolaborasi multi-stakeholder yang efektif, pendekatan interdisipliner yang dapat mengintegrasikan berbagai perspektif dan expertise, literasi masa depan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan skenario-skenario yang mungkin terjadi, dan pemikiran resilience yang fokus pada pembangunan sistem yang dapat beradaptasi dan pulih dari berbagai guncangan.

Harapan dan Impian untuk Indonesia yang Lebih Sejahtera

Para tokoh DNIKS berbagi harapan dan impian mereka untuk masa depan kesejahteraan sosial Indonesia:

Hashim Djojohadikusumo (Ketua Penasehat DNIKS)

Hashim Djojohadikusumo memiliki visi yang sangat ideologis untuk Indonesia yang sejahtera, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan bangsa. Dalam pandangannya, "rakyat Indonesia harus bangga karena kita telah diberikan Pancasila, yang lahir dari pemikiran bijak para pendiri bangsa, sebagai pengikat perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya." Impiannya adalah mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur, dengan tujuan utama politik "untuk mensejahterakan rakyat yang tertindas, miskin, dan melarat" serta memajukan ekonomi agar Indonesia setara dengan negara-negara maju. Hashim sangat memahami pentingnya kebijakan afirmatif untuk mengentaskan ketimpangan sosial yang menurutnya saat ini "sudah sama dengan era kolonial, saat pribumi seperti budak dan VOC pemilik kekayaan." Ia meneruskan warisan ideologi ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, yang pada 1955 pernah

menargetkan munculnya kelas pengusaha pribumi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi warisan kolonial.

Visi kesejahteraan sosial Hashim terwujud konkret dalam dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis yang diyakininya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui target 8%. Program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan strategi ekonomi kerakyatan yang "ditujukan untuk menggerakkan ekonomi lewat keterlibatan UMKM, koperasi hingga badan usaha milik desa (Bumdes), bukan konglomerat." Hashim memimpikan program ini dapat menyediakan makanan layak untuk 82 juta warga Indonesia setiap hari, melalui keterlibatan ratusan triliun rupiah yang "dibelanjakan di pedesaan untuk mendorong ikut serta UMKM, koperasi dan bumdes," sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya beli. Sebagai filantropis yang telah mendedikasikan lebih dari 20 tahun hidupnya untuk berbagai isu sosial Indonesia melalui Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Hashim berkomitmen pada peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan pendidik, kesehatan dan gizi anak, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Harapannya adalah terciptanya Indonesia yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, yakni kemakmuran tidak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan merata untuk seluruh rakyat Indonesia melalui sistem ekonomi Pancasila yang mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme.

Saifullah Yusuf (Menteri Sosial RI - Penasehat DNIKS)

Saifullah Yusuf memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera melalui filosofi "wong cilik iso gemuyu" - yakni rakyat kecil dapat tersenyum dan hidup berkecukupan. Sebagai Menteri Sosial, ia memimpikan transformasi fundamental dari sistem perlindungan sosial yang bersifat karitatif menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Harapannya sederhana namun revolusioner: "Kita tidak ingin bansos hanya jadi alat mempertahankan kemiskinan. Tapi harus jadi alat untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, lewat pemberdayaan ekonomi." Impian ini diwujudkan melalui pendekatan yang lebih manusiawi - memberikan akses pelatihan, peralatan usaha, dan fasilitasi pemasaran sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan tetap bahkan membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Investasi jangka panjang menjadi kunci utama visi Gus Ipul melalui program inovatif Sekolah Rakyat, dengan konsep "anak-anak dari keluarga miskin ekstrem kita sekolahkan di boarding school, lengkap dengan asrama, makan, pendidikan karakter, dan keterampilan. Mereka kita siapkan jadi pemimpin masa depan." Program ini tidak hanya mencegah putus sekolah, tetapi menciptakan generasi yang siap memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya. Dengan semangat kesetiakawanan sosial dan gotong royong sebagai

fondasi kokoh bangsa Indonesia, ia mengajak seluruh pilar sosial untuk bekerja dengan target konkret - minimal 10 Keluarga Penerima Manfaat graduasi setiap tahunnya menuju kemandirian. Harapan besarnya adalah terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan.

Prof. Haryono Suyono (Ketua Badan Pertimbangan DNIKS)

Prof. Haryono Suyono memiliki visi transformatif untuk Indonesia yang sejahtera melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan berkelanjutan. Dari pengalaman panjangnya memimpin program Keluarga Berencana dan BKKBN, hingga mendirikan Yayasan

Damandiri bersama Presiden Soeharto, ia meyakini bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam membangun bangsa, dengan tiga gagasan pokok: mewarisi semangat perjuangan bangsa, pentingnya peran keluarga dalam kesejahteraan bangsa, serta upaya membangun keluarga yang tangguh dan mandiri. Impiannya adalah menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah, melainkan melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Prof. Haryono menekankan pentingnya DNIKS sebagai

koordinator swasta untuk kesejahteraan sosial, sehingga ada dua jalur yang berjalan simultan - jalur resmi melalui Kemensos dan dinas sosial, serta jalur masyarakat melalui DNIKS dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Visi kesejahteraan sosial Prof. Haryono diwujudkan konkret melalui program inovatif Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang bertujuan "membangun sumber daya manusia, utamanya dari keluarga kurang mampu, dengan menempatkan yayasan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bergotong-royong mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan taraf hidup mandiri." Program ini melibatkan ratusan perguruan tinggi dalam pembentukan ribuan Posdaya melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menyegarkan Posyandu, dan program Kebun Bergizi. Harapan besarnya adalah terciptanya kemandirian ekonomi keluarga prasejahtera melalui program tabungan dan kredit tanpa agunan (Takesra dan Kukesra), yakni keluarga miskin diajarkan menabung dan kemudian mendapat akses kredit untuk usaha mikro. Menghadapi era revolusi industri 4.0 dan disrupsi teknologi, Prof. Haryono menekankan perlunya "kerja sama, kolaborasi, dan menyatu pada program yang maju" dengan DNIKS yang dituntut membangun kerja sama internal maupun eksternal terutama dengan pemerintah di semua lapisan. Visinya adalah Indonesia yang tidak hanya mengatasi kemiskinan struktural, tetapi menciptakan masyarakat yang mandiri, demokratis, dan berbudaya melalui pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan bangsa.

Franciscus Welirang (Ketua Dewan Pengarah DNIKS)

Franciscus Welirang memiliki visi komprehensif tentang pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia yang sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Franky meyakini bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan sekedar kewajiban hukum atas ketentuan pemerintah atau publikasi sumbangan perusahaan, melainkan investasi berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan. Dalam pandangannya, Program CSR berpotensi dikembangkan dalam bentuk kemitraan dengan pola *Public Private Partnership* (PPP) antar perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi efektif bagi upaya pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dengan orientasi pada pendekatan *Triple Bottom Line - People, Planet, Profit (3P).*

Franky juga mengusulkan prinsip keadilan dalam dunia pendidikan, yaitu setiap sekolah atau kampus bagus dan elit di Republik ini harus menerima atau menyiapkan kuota untuk orang miskin menjadi siswa atau mahasiswanya. Gagasan ini bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mencegah timbulnya ketimpangan intelektual, sosial, dan ekonomi di kemudian hari. Selain itu, Franky percaya bahwa transformasi UKM dari sektor informal menjadi formal melalui skema kemitraan strategis dapat meningkatkan akses bisnis, jaringan, dan informasi

usaha. Cita-citanya adalah Indonesia yang di tahun 2024 baru mencapai sejumlah target yang dicanangkan dalam SDGs sebesar 62,5 persen, dapat mencapai keseluruhan program SDGs tersebut pada saat periode SDGs berakhir di tahun 2030, melalui kolaborasi sinergis antara semua pemangku kepentingan, sekaligus menciptakan masyarakat Indonesia yang damai, inklusif, dan sejahtera.

H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si (Ketua Badan Pakar DNIKS)

Abdul Kadir Karding memiliki visi holistik tentang kesejahteraan sosial Indonesia yang berfokus pada perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mewujudkan model ideal pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna menuju kesejahteraan melalui rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan dengan target terukur dan data terintegrasi. Karding meyakini bahwa sektor pekerja migran yang menghasilkan devisa terbesar kedua setelah migas dengan nilai mencapai Rp 257 triliun dapat menjadi kunci transformasi kesejahteraan nasional jika dikelola dengan penguatan kompetensi melalui program vokasi dan kerja sama pemerintah-ke-pemerintah (Government to Government).

Visi Karding untuk Indonesia yang lebih sejahtera tercermin dalam konsep "Desa Migran Emas" yang mengintegrasikan perlindungan pekerja migran dengan pembangunan ekonomi lokal, menciptakan model pengelolaan migrasi yang aman, legal, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi desa melalui pemanfaatan dana remitansi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan pengalaman sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI yang menangani bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, serta komitmennya pada Public Welfare affairs yang mencakup Employment-Science and Technology-Social-Culture-Women's Empowerment, Karding percaya bahwa transformasi BP2MI menjadi kementerian akan memperkuat kapasitas negara dalam mengurus pekerja migran secara fokus dari hulu ke hilir, menciptakan ekosistem perlindungan yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia

H. Sudarto, SM., S.Pd.I., M.M. (Sekretaris Jenderal DNIKS)

Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Kita memiliki beberapa harapan dan impian untuk Indonesia lebih sejahtera melalui DNIKS:

1. DNIKS dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang fokus pada peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
2. DNIKS dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan mengembangkan program-program yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
3. DNIKS dapat berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.
4. DNIKS dapat membantu mengembangkan masyarakat yang lebih berdaya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, melalui program-program yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat.
5. DNIKS dapat berperan sebagai wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial untuk meningkatkan efektivitas program-program kesejahteraan sosial.

Dengan peran dan fungsi DNIKS, diharapkan Indonesia dapat menjadi lebih sejahtera dan masyarakatnya dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

H. Siswadi Abdul Rochim, MBA (Ketua Badan Perwakilan Anggota DNIKS)

Implementasi Sila ke-5 dari Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Keadilan sosial memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan sosial, yang mencakup distribusi sumber daya yang adil, pengakuan hak-hak dasar, dan upaya mengurangi kesenjangan, merupakan fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Keadilan sosial juga merupakan upaya nyata guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, DNIKS sebagai lembaga koordinatif Organisasi Sosial Nasional memiliki peran strategis dalam kolaborasi dengan organisasi-organisasi sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Salah satu strategi yang harus dijalankan adalah dengan meningkatkan interaksi komunikasi untuk fasilitasi

pemberdayaan dan penguatan organisasi-organisasi sosial tingkat nasional maupun organisasi-organisasi tingkat propinsi, kabupaten & kota melalui perumusan standardisasi organisasi dan standardisasi kompetensi sebagai relawan sosial.

Standarisasi organisasi memastikan adanya struktur, prosedur, dan sistem yang jelas dalam pengelolaan kegiatan relawan, sementara standarisasi kompetensi menjamin bahwa relawan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial secara efektif.

Tantangan besar untuk mewujudkan langkah-langkah strategis tersebut adalah kemampuan penggalangan dana dari masyarakat maupun dari sumber-sumber lainnya.

Dr. Hj. Cri Puspa Dewi Motik, M.A., M.Si (Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DNIKS Periode 2013-2017; Wakil Ketua Umum DNIKS Periode 2017-2021)

Dewi Motik memiliki visi transformatif tentang kesejahteraan sosial Indonesia yang dimulai dari pembentukan mental kemandirian bangsa. Ia meyakini bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mental bangsa yang selama 300 tahun dijajah VOC sehingga tercipta mentalitas peminta-minta. Dewi Motik menekankan pentingnya kemandirian sebagai fondasi utama, baik bagi masyarakat umum maupun pengurus organisasi sosial seperti DNIKS. Cita-cita mulia pendiri DNIKS yang ia dukung adalah memikirkan orang-orang yang tidak mampu untuk dibuat mampu, memajukan mereka yang memiliki kekurangan melalui pendidikan agar dapat mandiri dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Dewi Motik sangat menekankan pentingnya kerja sama dan networking dalam membangun kesejahteraan sosial, bukan mengandalkan bantuan pemerintah semata. Berdasarkan pengalamannya mendirikan dan memimpin 10 organisasi perempuan termasuk IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KOWANI, Koperasi Wanita Indonesia, dan sebagainya, ia percaya bahwa organisasi kesejahteraan sosial harus mampu menjalin kemitraan secara mandiri dengan

berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Gagasannya tentang DNIKS adalah organisasi yang tidak hanya mengutamakan konsep dan teori, tetapi *action* nyata yang dapat memberdayakan masyarakat, terutama dalam era digital dan AI saat ini. Dewi Motik berharap pengurus DNIKS tidak boleh tangan di bawah, tetapi tangan di atas untuk memberi bagi kesejahteraan sosial, harus bisa menjalin kerja sama dan membangun network, serta mampu membangun program-program berkualitas yang dapat menarik dukungan masyarakat dan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Edwil S. Djamoeddin (Sekretaris Jenderal DNIKS Periode 2018-2021)

Edwil S. Djamoeddin memiliki visi kesejahteraan sosial Indonesia yang bertumpu pada penguatan kelembagaan dan kolaborasi multi-pihak melalui DNIKS sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Sebagai mantan Sekretaris Jenderal DNIKS dan mantan anggota DPRD Provinsi Kepri dua periode, ia meyakini bahwa DNIKS sebagai organisasi sukarelawan yang bertugas menyantuni fakir miskin dan disabilitas harus dikelola oleh pengurus yang memiliki jiwa sosial tinggi. Pandangannya tentang kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada pemberian

bantuan charity semata, tetapi pada pembangunan sistem koordinatif yang melibatkan semua Organisasi Sosial Nasional (Orsosnas), BK3S, dan LKKS di seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menciptakan jejaring kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.

Edwil menekankan pentingnya kemandirian organisasi kesejahteraan sosial dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi nasional. Pengalamannya menyaksikan transformasi DNIKS dari era Orde Baru yang mendapat dukungan dana besar dari yayasan-yayasan Pak Harto hingga periode pasca-2017 yang harus mengandalkan patungan pengurus dan bantuan terbatas Kemensos, membuatnya memahami bahwa kesejahteraan sosial tidak boleh bergantung pada satu sumber pendanaan. Harapannya adalah terciptanya model pembiayaan kesejahteraan sosial yang diversifikatif melalui kemitraan dengan CSR perusahaan, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun mengakui kendala legal formal DNIKS yang belum memiliki akte notaris untuk menjalankan aktivitas usaha dan menerima hibah, Edwil tetap optimis bahwa dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan networking yang lebih luas, Indonesia dapat mencapai kesejahteraan sosial yang merata melalui sinergi antara pemerintah, organisasi sosial, dan dunia usaha dalam semangat gotong royong nasional.

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. (Ketua BAZNAS RI)

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. memiliki visi transformatif tentang kesejahteraan sosial Indonesia melalui optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai Ketua BAZNAS, ia meyakini bahwa potensi zakat nasional yang mencapai Rp 327 triliun per tahun dapat menjadi kekuatan dahsyat untuk mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan jika dikelola secara profesional dan transparan. Visinya terwujud melalui 10 program prioritas BAZNAS yang mencakup Rumah Sehat BAZNAS tanpa kasir, BAZNAS Microfinance berbasis masjid, Desa Kampung Zakat, Santri Preneur, hingga program pembangunan rumah layak huni dengan bantuan Rp 25 juta per keluarga miskin, yang kesemuanya dirancang untuk menciptakan ekosistem kesejahteraan yang holistik dan berkeadilan.

Noor Achmad menekankan pentingnya sinergi multi-stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata, khususnya kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil seperti DNIKS. Harapannya adalah terciptanya sistem pengelolaan zakat yang inovatif dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, terutama program makan bergizi yang dicanangkan Presiden Prabowo yang sangat strategis untuk menciptakan generasi sehat dan produktif. Dengan 34 BAZNAS provinsi, sekitar 490 BAZNAS

kabupaten/kota, dan ribuan Unit Pengumpul Zakat yang tersebar hingga ke masjid-masjid, ia optimis Indonesia dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan memanfaatkan potensi kedermawanan masyarakat Indonesia yang diakui dunia internasional sebagai yang tertinggi untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

DNIKS
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB XII

LAMPIRAN – LAMPIRAN

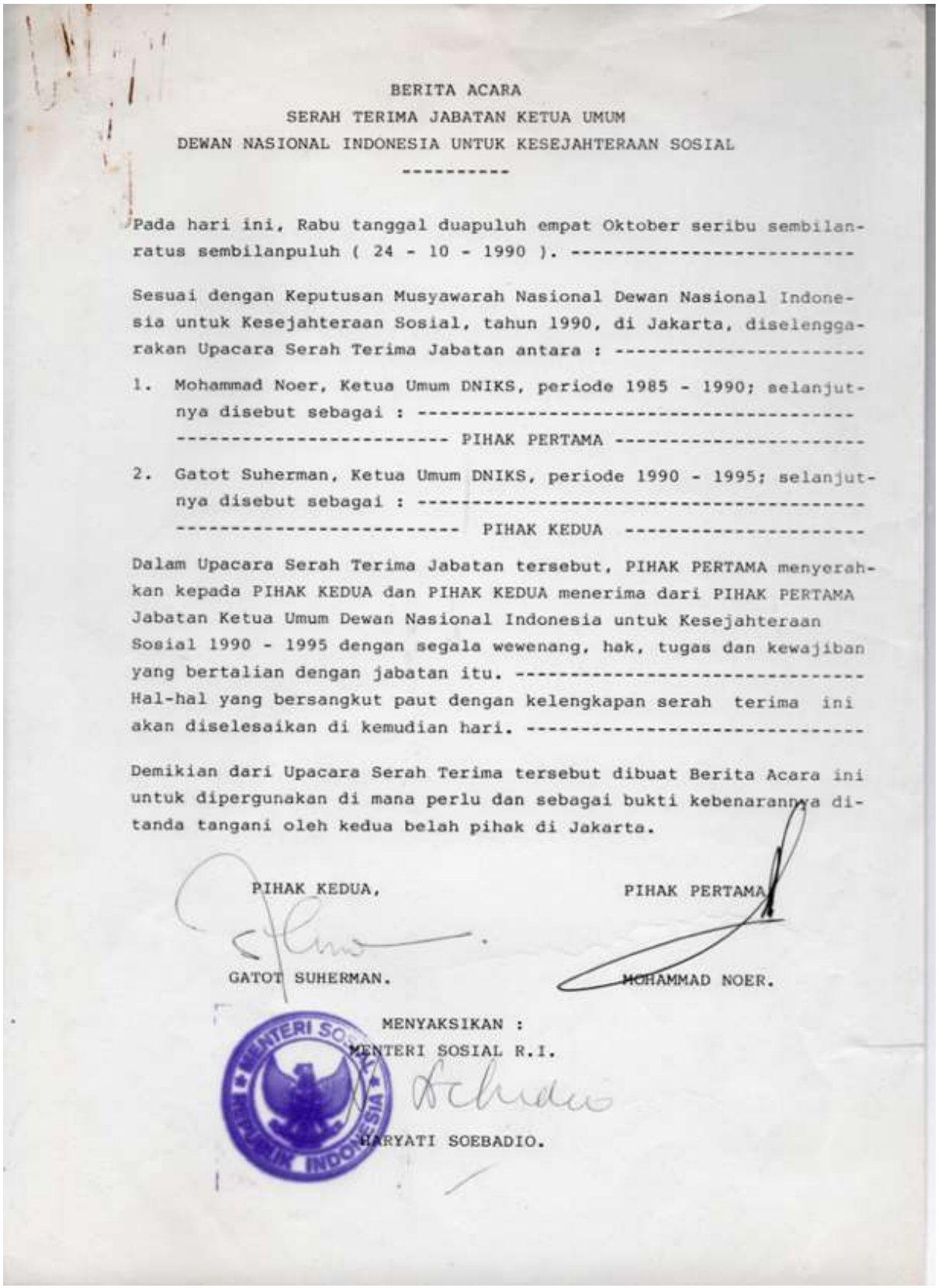

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN KETUA UMUM
DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh empat Oktober seribu sembilan-ratus sembilanpuluh (24 - 10 - 1990). ----------

Sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, tahun 1990, di Jakarta, diselenggarakan Upacara Serah Terima Jabatan antara : ----------

1. Mohammad Noer, Ketua Umum DNIKS, periode 1985 - 1990; selanjutnya disebut sebagai : ----------
   ---------- PIHAK PERTAMA ----------
2. Gatot Suherman, Ketua Umum DNIKS, periode 1990 - 1995; selanjutnya disebut sebagai : ----------
   ---------- PIHAK KEDUA ----------

Dalam Upacara Serah Terima Jabatan tersebut, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA Jabatan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial 1990 - 1995 dengan segala wewenang, hak, tugas dan kewajiban yang bertalian dengan jabatan itu. ----------
Hal-hal yang bersangkut paut dengan kelengkapan serah terima ini akan diselesaikan di kemudian hari. ----------

Demikian dari Upacara Serah Terima tersebut dibuat Berita Acara ini untuk dipergunakan di mana perlu dan sebagai bukti kebenarannya ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta.

PIHAK KEDUA,

GATOT SUHERMAN.

PIHAK PERTAMA,

MOHAMMAD NOER.

MENYAKSIKAN :
MENTERI SOSIAL R.I.

HARYATI SOEBADIO.

DNIKS

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

INDONESIAN NATIONAL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE

Jl. Tanah Abang Timur 15, Jakarta 10110

Telepon : 021-3844718, 3850631, Fax. : 021-3450863. Cable Address : DNIKS/JKT

e-mail : dniks.67@gmail.com, dniks_67@yahoo.com website : http://www.dniks.or.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
KETUA UMUM
BADAN PENGURUS DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS)
PERIODE 2013-2017
KEPADA KETUA UMUM DNIKS PERIODE 2017 – 2021

Pada hari ini Senin, tanggal delapan belas September dua ribu tujuh belas (18-09-2017) sesuai hasil Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Nomor : 1/672/SK-MUNAS/2017 tanggal 17 -18 September 2017 di Banjarmasin Kalimantan Selatan diselenggarakan acara Serah Terima yang dilakukan oleh :

1. Prof. DR. Haryono Suyono, Ketua Umum Badan Pengurus DNIKS periode 2013-2017, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Tantyo Adji Sudharmono, Ketua Badan Pengurus DNIKS periode 2017-2021, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam acara serah terima tersebut, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA Jabatan Ketua Umum Badan Pengurus DNIKS periode 2017-2021 dengan segala wewenang, hak, dan kewajiban yang bertalian dengan jabatan itu, dengan kepengurusan Badan pengursu DNIKS 2017-2021 tersebut.
Hal-hal yang bersangkut paut dengan kelengkapan serah terima ini akan diselenggarakan di kemudian hari.

Dalam acara Serah Terima ini dibuat Berita Acara dan sebagai bukti kebenarannya ditandatangani oleh kedua belah pihak .

Banjarmasin, 18 September 2017

PIHAK KEDUA

Tantyo Adji Sudharmono

PIHAK PERTAMA

Prof. DR. Haryono Suyono

Dirjen Pemberdayaan Sosial
Kementerian Sosial

Drs. Hartono Laras

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN KETUA UMUM
DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

-Pada hari ini, Kamis tanggal sembilanbelas September seribu sembilanratus delapanpuluh lima (19-9-1985). ----------

-Sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional Dewan Nasional - Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, tahun 1985, di Jakarta terutama yang mengenai Susunan Pengurus DNIKS 1985 - 1990, susunan mana telah pula dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1985, nomor 54/HUK/1985, tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Nasional - Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, diselenggarakan upacara serah terima jabatan antara : ----------

1.-Ny. J.S.NASUTION, Ketua Umum DNIKS, periode 1970-1985; selanjutnya disebut sebagai : ----------
---------- Pihak Pertama----------

2.-MOHAMMAD NOER, Ketua Umum DNIKS, periode 1985-1990;-selanjutnya disebut sebagai : ----------
---------- Pihak Kedua ----------

Dalam upacara Serah Terima Jabatan tersebut, Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama Jabatan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial 1985/1990 dengan segala wewenang, hak,tugas dan kewajiban yang bertalian dengan jabatan itu. --------
Hal-hal yang bersangkut paut dengan kelengkapan serah terima ini akan diselesaikan di kemudian hari. ----------

Demikian dari Upacara Serah Terima tersebut dibuat Berita Acara ini untuk dipergunakan dimana perlu dan sebagai bukti kebenarannya ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta.

PIHAK KEDUA

(MOHAMMAD NOER)

PIHAK PERTAMA

(NY. J.S. NASUTION)

MENYAKSIKAN :

JUSUF TALIB, SH.
DIREKTUR JENDERAL BINA
BANTUAN SOSIAL DEPARTEMEN SOSIAL R.I.

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Indonesian National Council on Social Welfare)
Jl. Tanah Abang Timur 15 Phone: 373956, 376563, 350798, 344718
Jakarta 10110 — Indonesia Cable Address: DNIKS JKT

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASA BHAKTI 1990 - 1995

PELINDUNG	: IBU TIEN SOEHARTO
PEMBINA	: MENTERI SOSIAL RI
KETUA UMUM	: H. GATOT SUHERMAN
KATUA HARIAN	: Dr. BAHRAWI WONGSOKUSUMO, MPH
SEKRETARIS JENDERAL	: DRS. S O E T A D I
BENDAHARA	: SU'UDDY SADAT, B.Sc
PUSAT PENELITIAN DAN INFORMASI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL	: DR. NY. YAUMIL C. AGOES ACHIR
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL	: DRS. M. S O E H O D O
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL	: ABDULLAH SYARWANI, SH

Jakarta, 10 Desember 1991
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL,

H. GATOT SUHERMAN
Ketua Umum.

DRS. SOETADI
Sekretaris Jenderal.

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Indonesian National Council on Social Welfare)
Jl. Tanah Abang Timur no. 15 Tel. 3846556, 3844718.
Jakarta 10110 - Indonesia. Alamat kawat : DNIKS/JKT. Fax: 021 3450863.

Nomor : 1/169/PDN/96 Jakarta, 18 September 1996
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Bantuan**

Kepada :
Yth. Bapak Presiden Soeharto
Jl. Cendana No. 8
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Sejak permulaan tahun 1996, sesuai dengan petunjuk Bapak, kami telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Sejak kami menerima tugas tersebut keadaan kantor DNIKS dalam keadaan terlantar dan kondisi keuangan (-) Rp 3.420.255,19.

Sehubungan dengan tugas kami sebagai Ketua Umum DNIKS, perkenankan kami melaporkan secara singkat beberapa hal penting kepada Bapak :

1. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa anggota Badan Penyantun dan Badan Penasehat DNIKS, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kami baru berhasil mengumpulkan dana sumbangan sebesar Rp 1 milyar yang akan kami pergunakan baik untuk membiayai kegiatan rutin kantor DNIKS maupun membantu pembiayaan beberapa kegiatan organisasi sosial yang terkait dengan koordinasi DNIKS.

2. Renovasi kantor DNIKS agar layak berfungsi sebagai kantor Dewan guna mendukung kelancaran kegiatan organisasi di tingkat nasional/pusat. Biaya renovasi disumbang oleh beberapa anggota Badan Penasehat DNIKS yang menelan biaya ± Rp 700.000.000,00

3. Menyelenggarakan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi nasional BKKKS (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) Propinsi dan Organisasi Sosial tingkat Nasional, Lokakarya Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DNIKS dan menyelenggarakan bersama BKKKS Yogyakarta International Conference on Street Children di Yogyakarta, September 1996 yang dihadiri oleh 18 negara asing dan dari 27 propinsi di Indonesia.

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Indonesian National Council on Social Welfare)
Jl. Tanah Abang Timur 15, Phone: 3846556, 3844718, 3850631; Fax: 021-3450863
Jakarta 10110 - Indonesia, Cable Address: DNIKS/JKT.

Jakarta, 22 Januari 2003

Nomor : 1/08/PMA/2003
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada Yth.
Bp. H. Soeharto
Ketua Yayasan Dharmais
Jl. Cendana
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya laporkan kepada Bapak, bahwa untuk kedua kalinya saya telah terpilih sebagai Ketua Umum Majelis DNIKS Periode 2002 – 2005.

Sejak semula saya berkeinginan melaporkan kepada Bapak bahwa Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) adalah suatu organisasi payung yang menentukan policy dan koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional. Sampai saat ini DNIKS hanya memiliki dana 1 (satu) milyar sebagai Deposito Bank yang diperoleh dari sumbangan para donatur pada waktu yang lalu.

Semula DNIKS memperoleh dana bantuan sebanyak Rp. 20.000.000,-/bulan dari Departemen Sosial RI untuk kebutuhan rutin kantor DNIKS. Sejak tahun 1998, DNIKS tidak lagi memperoleh dana tersebut. Saat ini untuk memperoleh bantuan dari para pengusaha sangat sulit, tidak seperti waktu yang lalu. Oleh karena itu bersama ini saya mohon bantuan Bapak untuk dapat membantu DNIKS yang jumlahnya saya serahkan pada kebijaksanaan Bapak, dari Yayasan Dharmais, yang peranannya sangat besar dalam membantu Panti Asuhan dan lain-lain di seluruh Indonesia.

Atas dukungan Bapak yang tidak terhingga, saya ucapkan terima kasih.

DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ketua Umum Majelis

Bustanil Arifin, S.H.

C.C. : Yth. Bp. H. Soedharmono S.H.
(Ketua I Yayasan Dharmais)

S E P A T A H K A T A

Ketua Umum D.N.I.K.S.
Ny. J.S. Nasution
pada
Acara serah - terima
Jabatan K.U. D.N.I.K.S.
19 September 1985

Yth.: DirJen Bina Bantuan Sosial Bpk. Jusuf Talib, SH
Yth.: Bpk. Mohammad Noer
Yth.: Pengurus DNIKS
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia
Ass. w.w.

Terlebih dahulu kami ucapkan terimakah atas kehadiran Saudara-saudara sekalian pada acara serah terima tugas dan tanggung jawab Ketua Umum DNIKS sehubungan dengan Keputusan Musyawarah Nasional DNIKS pada tanggal 10 Juli 1985 yanglalu. Khususnya terimakasih dan penghargaan kami kepada DirJen Bina Bantuan Sosial Bpk. Jusuf Talib, SH atas kehadirannya a/n Menteri Sosial RI.

Kepada Bpk. Mohammad Noer, Bpk. Sardjono Soeprapto dan anggota-anggota DNIKS yang sekarang, kami sampaikan "Selamat datang di Kantor DNIKS yang sederhana ini.

Saudara-saudara sekalian.

Acara serah terima jabatan Ketua Umum DNIKS pada tanggal 19 September 1985 ini adalah bertepatan pula dengan tanggal yang sama pada tahun 1984, S.K. Mensos no. 58/HUK/KEP/IX/1984 tentang DNIKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial RI Ibu Nani Soedarsono, SH.

Acara yang sederhana tetapi penuh arti ini merupakan tonggak penting baik bagi perkembangan DNIKS maupun bagi seluruh anggota pengurus DNIKS, khususnya bagi pribadi saya sebagai seorang tenaga sosial sukarela.

Pada acara ini perkenankanlah saya menyinggung sebentar sejarah yang telah kita lalui dan melahirkan harapan-harapan bagi masa mendatang.

Sekedar sejarah

Saya mencatat bahwa di tempat inilah, dengan meminjam satu kamar, DNIKS dimulai ± 18 tahun yanglalu langkah-langkah pertamanya.

Mengenai kaderisasi dan peremajaan sosiawan sukarelawan atau lebih kita kenal T.S.S. pada kenyataannya tidaklah mudah di bidang sosial, karena adalah berarti mengorbankan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Dapat dimengerti, bahwa bagi kebanyakan kita usaha penghidupan keluarga sendiri telah menuntut waktu dan tenaganya. Khususnya untuk mereka yang masih muda dan banyak diantara mereka yang ingin bekerja dan merintis kariernya. Maka sebagian T.S.S. kita masih terdiri dari teman-teman tiga zaman. Saya pribadi bersyukur dengan pengalaman yang dapat saya peroleh selama menjadi T.S.S. di kalangan BPKKS dan DNIKS ini, sehingga saya dapat lebih mendalami langsung usaha berbagai sub bidang sosial kita.

Urgensi penggarapan kaderisasi dan peremajaan masyarakat T.S.S. kita masih tetap merupakan program prioritas DNIKS/BKKKS demi penanggapan tantangan-tantangan sosial yang terus meningkat di depan kita dimasa-masa mendatang.

Saudara-saudara sekalian.

Perkenankanlah saya a/n semua anggota Pengurus DNIKS yang sebentar lagi bersama-sama dengan saya mengundurkan diri menyerahkan tongkat estafet kebaktian sosial kepada Pengurus DNIKS periode 1985-1990 dengan ucapan: Selamat bekerja kepada Ketua Umum, Ketua-ketua dan Pengurus DNIKS yang telah dikukuhkan dengan S.K. Mensos nomor: 54 tahun 1985. Semoga dengan bimbingan dan lindungan YME Bapak Noer Cs akan selalu menikmati kesehatan serta kesegaran, sehingga dapat untuk 5 tahun mendatang mencurahkan sepenuh tenaga dan fikiran dalam menjawab tantangan sosial yang begitu luas dalam masyarakat kita dengan menggalang swadaya serta gotong royong masyarakat sendiri dan dengan irama pembangunan nasional kita. Kepada semua teman yang selama ini bersama saya mengemban tugas DNIKS ini dengan semangat kebersamaan dan setiakawanan saya sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Tiada kata yang dapat melukiskan perasaan hati saya terhadap saudara-saudara kawan seperjuangan dalam bidang sosial yang indah ini. Bertugas bersama saudara-saudara sekalian dengan segala suka-dukanya selama belasan tahun merupakan pengalaman dan kenangan yang sangat indah bagi saya, yang saya yakini sebagai kebersamaan dan kesetiakawanan

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDONESIAN NATIONAL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE
Jl. Tanah Abang Timur 15, Jakarta 10110
Telepon : 021-3844718, 3850631, Fax. : 021-3450863, Cable Address : DNIKS/JKT
e-mail : dniks.67@gmail.com, dniks_67@yahoo.com website : http://www.dniks.or.id

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEJARAH DNIKS

Menyadari bahwa perwujudan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 belum spenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan. Bahwasanya untuk mencapai terwujudnya tujuan tersebut adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab bangsa Indonesia untuk menyempurnakan usaha-usaha kesejahteraan soial. Oleh sebab itu dihimpunlah segala potensi kemanusiaan dan keberadaan di dalam suatu wahana nasional yang berbentuk Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang di awali oleh Piagam Pendirian Komite Nasional Kesejahteraan Sosial tertanggal 17 Juli 1967.

DNIKS ini terbentuk dengan terlebih dahulu oleh pemikiran dari para delegasi Indonesia sesuai memenuhi undangan The thirtienth International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare) suatu organisasi Kesejahteraan sosial tingkat dunia atau international, di Washington DC. Para mantan delegasi Indonesia yang terdiri dari Mr. Soemantri Praptokoesomo, A.M. Pasila,S.TH. Djajat Drajat, Mr. Alwi Sutan Oesman, Dr. Salekan. Mr. Ijas Suahnada, Narasaruddin Latif, pada tanggal 8 Juli 1967 meresmikan pembentukan Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (KNKS), dengan penandatangan Piagam Pendiriannya oleh ke Tujuh orang

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERSAMA DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT NASIONAL

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang 11 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 72/HUK/2010, sebagai pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, telah ditetapkan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional.

Untuk dapat terselenggaranya kesejahteraan sosial oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial secara terpadu dan berkelanjutan, perlu adanya kerjasama antara Lembaga dimaksud dengan Kementerian Sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tindaklanjutnya ditetapkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bersama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial Sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional.

B. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan mensinergikan dan mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. Dasar

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 72/HUK/2010 tentang Pengukuhan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional.

DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDONESIAN NATIONAL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE
Jl. Tanah Abang Timur 15, Jakarta 10110
Telepon : 021-3844718, 3850631, Fax. : 021-3450863, Cable Address : DNIKS/JKT
e-mail : dniks.67@gmail.com, dniks_67@yahoo.com website : http://www.dniks.or.id

Jakarta, 18 September 2015

Nomor : 2/597/PMA/2015
Perihal : Pengusulan Peraturan Presiden tentang DNIKS
Lapiran : 1 buku

Kepada Yth.
Ibu Dra. Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial Republik Indonesia
di Jakarta.

Dengan hormat,

Pertama-tama perkenankanlah kami atas nama Pengurus DNIKS bersama Organisasi Sosial Tingkat Nasional menghaturkan terima kasih atas perkenan Ibu Menteri yang telah memberikan perhatian dengan hadir dalam berbagai acara serta sambutan yang positif atas kegiatan yang akhir-akhir ini kami lancarkan dalam rangka membantu kesejahteraan para penyandang disabilitas, seperti Peresmian Gedung Sekolah untuk Anak-2 Tuna Grahita dari Yayasan Asih Budi di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, serta Pelaksanaan Makan Malam dalam rangka Penghimpunan Dana GAUN 2015 di Restoran Paradis di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Kegiatan di atas pada hakekatnya baru sebagian kecil dari program kerja yang telah kami susun untuk menggalang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan koordinasi kami sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tingkat Nasional sesuai amanat UU No. 11 th 2009 Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu melalui surat ini kami mohon perkenan Ibu Menteri sesuai dengan sambutan Ibu sampaikan dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VII di Padang Sumatera Barat bulan Juli 2015 yang lalu, untuk memproses penyusunan rancangan penetapan DNIKS sebagai LKKS Nasional melalui Peraturan Presiden. Demikian juga status BK3S Provinsi dan K3S Kabupaten/Kota sebagai LKKS Provinsi dan LKKS Kabupaten/Kota. Kami yakin dengan pengukuhan atau pengaturan melalui Perpres tersebut DNIKS maupun BK3S Provinsi dan K3S Kabupaten/Kota akan dapat lebih berperan membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Perpres tersebut sesuai permintaan Pusat Kajian Hukum Kementerian Sosial, bersama surat ini kami haturkan buku "Kilas Balik Empat Dasa Warsa Perjalanan DNIKS" yang ditulis pada tahun 2009, yang antara lain memuat latar belakang sejarah maupun ruang lingkup peran yang dilakukan termasuk status DNIKS sebagai anggota "International Council of Social Welfare" (ICSW) seperti tertulis di hal 43. Sesuai statusnya sebagai anggota DNIKS disebut sebagai "Indonesian Nasional Council of Social Welfare (INCSW) dan untuk memenuhi kewajibannya DNIKS setiap tahun selalu membayar iuran kepada organisasi internasional tersebut (copy terlampir).

Demikian, atas perhatian dan perkenan Ibu Menteri memenuhi permohonan ini kami haturkan terima kasih.

Ketua Umum DNIKS

Prof. Dr. Haryono Suyono

Tembusan Yth:
1. Sekjen Kementerian Sosial
2. Pusat Kajian Hukum Kementerian Sosial.

Lampiran 2.

PERKEMBANGAN KEPENGURUSAN DNIKS.

I. DNIKS adalah kelanjutan dari "KOMITE NASIONAL untuk KESEJAHTERAAN SOSIAL" yang didirikan berdasarkan "Piagam Pendirian", 17 Juli'67.
Piagam Pendirian ini ditanda tangani oleh :

1. Mr. Alwi Sutan Osman
2. Dr. Salekan
3. Mr. Ijas Suhanda
4. Djadjat Dradjat
5. A.M. Pasila S.Th.
6. Nasarudin Latif
7. Mr. Sumantri Praptokusumo.

Guna memperkuat Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial, Kelompok Pendiri ini kemudian menghubungi Ibu A.H. Nasution, agar bersedia menjadi Ketua.
Komite berkembang menjadi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, dan menjadi anggauta ICSW (International Council ch Social Welfare) pada tahun 1967, terutama atas desakan-desakan dari S.D. Gokhale, Assistant Secretary untuk Asia & Western Pacific, serta tokoh-tokoh Nederland, yaitu Ny. Klompe (enteri CRM) dan Jan Beekman (Sekretaris Nederlandse Raad voor Maatschappelijk Welzijn).

II. Berdasarkan Instruksi Menteri Sosial, Bapak Dr.A.M. Tambunan,SH, DNIKS menyelenggarakan Musyawarah Nasional pertama bertempat di ruang Rekreasi Departemen Social RI, pada tanggal 27 - 28 April 1970.
Sebagai salah satu persiapam untuk terselenggaranya Musyawarah, DNIKS telah menghubungi berbagai Organisasi Besar dan Lembaga Pendidikan, sekaligus membbentuk suatu "Pengurus Sementara" yang berfungsi sampai terselenggaranya Musyawarah dimana akan diadakan juga Pemilihan Pengurus.
Susunan Pengurus Sementara itu adalah :

Ketua Umum : Ny. A.H. Nasution
Ketua I : Prof. Sumantri Praptokusumo

Ketua II	:	Dr. Salekan
Ketua III	:	Ny. Memot Tanumijaya
Sekjen.	:	I. Suhanda,SH
Sekretaris	:	Djadjat Dradjat
Bendahara	:	dra. Vera I. Wullur
Anggauta	:	Ir. J. Sudiman (mewakili MAWI)
		Nazarudin Latif
		L. Rudolph (FIS-UI)
		Ny. Tambunan Hutagalung (DGI)
		A.M. Pasila S.Th. (Dep.Sosial)
		Bapak Mantra (Paridada Hindu Dharma)
		Drs. Waskito (Dep. P&K)
		Ny. Oyong RS (PAB)
		Ny. Rita Thung,SH (Yayasan Santikara)
		Nn. Enny Supit (ASK Widuri).

III. Pada Musyawarah Nasional tahun 1970, secara khusus terca pada agenda Musyawarah acara Pemilihan Pengurus. Dan ole Musyawarah telah ditunjuk 3 formatur yang kemudian menyu suatu kepengurusan DNIKS.
Formatur yang ditunjuk adalah :

1. Ny. A.H. Nasution
2. Prof. Sumantri Praptokusumo
3. Mr. Ijas Suhanda.

Oleh para formatur kemudian disusun Pengurus sebagai ber:

Ketua Umum	:	Ny. A.H. Nasution
Ketua I	:	Ijas Suhanda,SH
Ketua II	:	C.L. Rudolph
Sekjen.	:	Prof.Sumantri Praptokusumo
Bendahara	:	Mr. Hamid Algadri
Anggauta	:	Ny. Memet Tanumijaya
		dra. Vera I. Wullur
		Ny. Tambunan Hutagalung
		Drs. Robby Tulus

Drs. Agung Juwono
dr. Gambiro Prawirosudirdjo
Drs. Djoko Kusnadi
Frans Harsono, M.Ed.

IV. Pada tahun-tahun berikutnya susunan Pengurus hasil pemilihan Musyawarah telah mengalami berbagai perubahan. Ada yang mengundurkan diri karena berbagai kesibukan tugas, ada yang pindah keluar negeri atau bertugas keluar negeri untuk 1 atau 2 tahun dan sekembalinya ditempat, barulah mulai aktif kembali.
Ada pula tambahan anggauta-anggauta baru, misalnya pada tahun 1976, Pengurus DNIKS diperkuat dengan anggauta-anggauta Humas :
Ny. S.M. Siregar dan Ny. Surya Karta Legawa.

V. Pada tahun 1980 tercatat suatu kepengurusan yang disederhanakan, terdiri dari anggauta yang membantu secara aktif dalam kegiatan sehari-hari atau pun sewaktu-waktu, yaitu :

Ketua Umum : Ibu A.H. Nasution
Wakil Ketua : Bpk. Mr. Hamid Algadri (merangkap DenNahara)
Pejabat Sekjen : Bpk. M. Dartojo
Anggauta : Ibu Vera I. Wullur (merangkap Ketua Badan pengolahan dan Pengembangan)
Ibu S.M. Siregar (merangkap Humas)
Ibu M.G.Suria Karta Legawa (merangkap Humas)
Ibu Sri Soedarsono (merangkap Bidang Dana)
Ibu Tambunan Hutagalung
Bpk. Soetardjo Soeromarto (menggantikan Bapak Suhanda)
Prof.Dr. Gambiro Prawirosudirdjo
Ibu C. Utaryo.

VI. Dan akhirnya, dalam rapat Pengurus Harian DNIKS pada tanggal 27 Pebruari 1982 diputuskan untuk menambah anggota Pengurus Pleno dengan sejumlah orang, sehingga susunan Pengurus sejak itu menjadi:

Ketua Umum	: Ibu A.H. Nasution
Ketua I (non-aktif)	: Bpk. Suhanda Ijas
Ketua II	: Bpk. Mr. Hamid Algadri (merangkap Bendahara)
Pejabat Sekjen(non-aktif)	: Bpk. M. Dartojo
Anggauta	: Ibu Vera Wullur
	Prof.Dr.G. Ambiro Prawirosudirdjo
	Ibu Tambunan Hutagalung
	Ibu S.M. Siregar
	Ibu M.G.Suria Karta Legawa
	Ibu Sri Sudarsono
	Bpk. Soetardjo S.
	Ibu C. Utaryo
ditambah dengan	: Ibu T. Sajono (sejak 1973 dalam lingkungan DNIKS sebagai anggauta Biro Penca).
	Dr. Hendarto Hendarmin (sejak 197 dalam Biro Penca)
	Ibu Soes Abdurachman (sejak 1978 dalam lingkungan DNIKS pada BPP)
	Ibu S.L. Hanafiah (idem)
	Ibu M. Marjono (sejak 1977 dilingkungan DNIKS sebagai anggauta PK2 dan 1980 pada Panker Perlindungan Anak).
	Bpk. Koesbiono Sarmanhadi,SH (sejak 1981 dalam Biro Penca).

---o----

/at

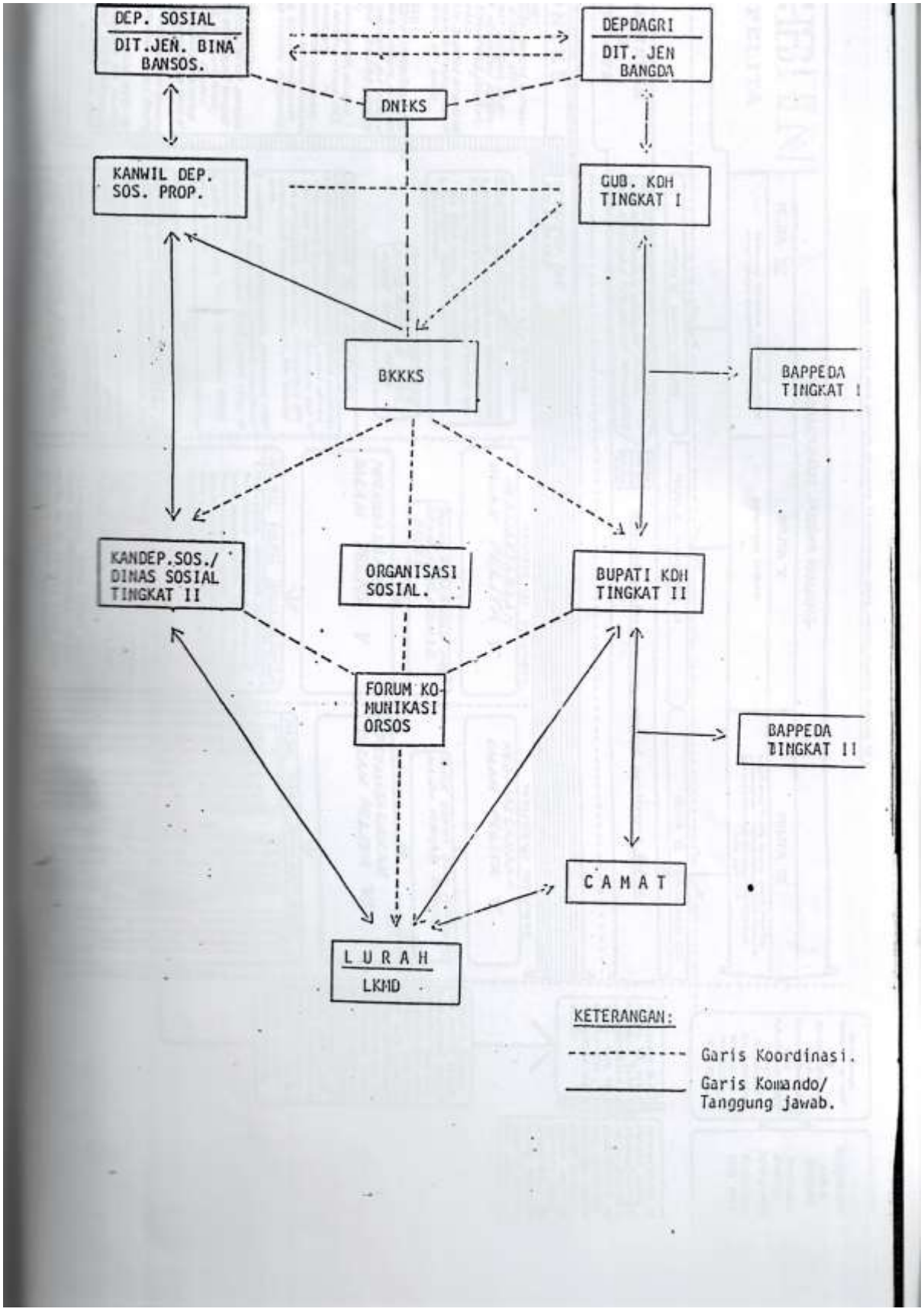
DEP. SOSIAL
DIT.JEN. BINA BANSOS.
DEPDAGRI
DIT. JEN BANGDA
DNIKS
KANWIL DEP. SOS. PROP.
GUB. KDH TINGKAT I
BKKKS
BAPPEDA TINGKAT I
KANDEP.SOS./ DINAS SOSIAL TINGKAT II
ORGANISASI SOSIAL.
BUPATI KDH TINGKAT II
FORUM KOMUNIKASI ORSOS
BAPPEDA TINGKAT II
CAMAT
LURAH
LKMD
KETERANGAN:
Garis Koordinasi.
Garis Komando/ Tanggung jawab.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 72 / HUK / 2010

TENTANG

PENGUKUHAN DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS) SEBAGAI LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT NASIONAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial sebagai wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, perlu dibentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah yang bersifat terbuka, independen, dan mandiri;

b. bahwa Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang berdiri sejak tanggal 17 Juli 1967 telah melaksanakan tugas sebagai lembaga kesejahteraan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pengukuhan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial Republik Indonesia;

Memperhatikan :

1. Surat dari Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Nomor 4/104/PDN/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Surat Pengukuhan DNIKS;

2. Laporan Kepengurusan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Periode 2009-2013 Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-VI pada tanggal 6-8 Oktober 2009 di Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGUKUHAN DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS) SEBAGAI LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT NASIONAL.

PERTAMA : Mengukuhkan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional.

KEDUA : Kelengkapan organisasi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

KETIGA : Dengan dikukuhkannya Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional, maka ketentuan bahwa Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Organisasi Sosial Tingkat Nasional di Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/KEP/IX/1984 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2010
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA

2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
5. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
6. Kepala Dinas/Instansi Sosial di seluruh Indonesia.
7. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.
8. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

TENTANG PENYUSUN

Dr (Cand). Mulyadin Permana, M.Si adalah seorang akademisi, peneliti, dan pemimpin organisasi dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam bidang administrasi publik, antropologi, dan pengembangan masyarakat. Lahir di Bima, pada 7 Juli 1987, ia telah mengabdikan kariernya untuk memahami dan memperbaiki dinamika sosial-politik Indonesia melalui penelitian, advokasi kebijakan, dan kepemimpinan organisasi.

Mulyadin menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta (2006-2010) dengan fokus pada ilmu Tarbiyah, yang memberikan fondasi pemahaman tentang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Ia juga mengambil studi hukum di Universitas Islam Jakarta (2009-2011) yang memperkuat pemahamannya tentang kerangka regulasi dan kebijakan publik.

Passion-nya terhadap antropologi dan studi sosial membawanya melanjutkan pendidikan Magister Antropologi di Universitas

Indonesia (2013-2015) yang mengkhususkan diri pada etnografi dan penelitian lapangan. Saat ini, ia sedang menyelesaikan program Doktor Antropologi di universitas yang sama (2018-sekarang) dengan fokus penelitian pada antropologi urban terkait dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan adaptasi terhadap modernisasi.

Sejak 2014, Mulyadin bekerja di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Tenaga Ahli yang menyediakan analisis kebijakan strategis dan saran mengenai masalah legislatif, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Posisi ini memungkinkannya untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan undang-undang dan pengawasan implementasi program pemerintah. Secara akademik, ia aktif melakukan berbagai penelitian etnografi tentang fenomena sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Penelitiannya mencakup topik-topik inovatif seperti antropologi multispesies, adaptasi budaya terhadap bencana, dinamika konflik sosial, dan berbagai dinamika masyarakat dalam kajian antropologi urban.

Mulyadin memiliki rekam jejak kepemimpinan yang impresif di berbagai organisasi, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PeranNU (Pergerakan Aktivis Nahdliyin Nusantara) periode 2023-2028 dan Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan DNIKS periode 2024-2029. Di tingkat wilayah, ia memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LPTNU) DKI Jakarta, Koordinator Bidang Pengembangan dan Kerjasama BP-PKU MUI DKI Jakarta, dan aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. Pengalaman kepemimpinannya juga mencakup posisi

sebagai Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta.
Sebagai akademisi produktif, Mulyadin telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang berkualitas. Karya-karyanya mencakup penelitian tentang "*Web of Life Beyond Species Boundaries: A Multispecies Anthropology of Marine Pollution, Adaptation, and Transformation in Fisherman-Fish-Sea Relationship in Jakarta Bay*", "*Cultural Adaptation of Flood in Kampung Pulo East Jakarta*", dan berbagai studi tentang konflik sosial dan transformasi budaya. Selain karya ilmiah, ia juga aktif menulis artikel opini tentang isu-isu strategis nasional dan telah berkontribusi dalam penyusunan beberapa buku, termasuk buku kinerja tahunan lembaga legislatif dan panduan program pemerintah.

Melalui berbagai peran yang diembannya, Mulyadin konsisten menunjukkan komitmen terhadap pembangunan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyusunan buku "DNIKS Dari Masa ke Masa" merupakan manifestasi dari dedikasi akademis dan praktisnya untuk mendokumentasikan sejarah organisasi sosial Indonesia dan menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Visinya tentang Indonesia yang sejahtera tidak hanya tercermin dalam karya akademisnya, tetapi juga dalam kepemimpinan organisasi dan advokasi kebijakan yang dilakukannya. Sebagai generasi muda yang memahami dinamika perubahan sosial, ia berkomitmen untuk menjembatani pengetahuan akademis dengan praktik pembangunan yang membumi.

Supported by :

JAPFA

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk

DNIKS
1967
DEWAN NASIONAL INDONESIA
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL